



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tahun Anggaran 2025





LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025

**Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman. Telp. (0274)868405, 865473 Pesawat 1245,
Fax. (0274) 865473 Kode Pos 55511**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman menyajikan informasi tentang komitmen kinerja sebagaimana diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam tahun 2025. LKjIP disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah serta berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021 – 2026.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi berpedoman pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah usaha mikro dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pelaksanaan urusan dimaksud sebagaimana dijabarkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun secara periodik yang berisi rincian kinerja utama Pemerintah Daerah beserta target kinerja, program, dan anggaran Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Bupati Sleman. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempertanggungjawabkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan Indikator Kinerja.

LKjIP sebagai laporan akuntabilitas kinerja disusun dalam rangka menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja kepada seluruh *stakeholder*. Selain itu, laporan ini juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

LKjIP Tahun 2025 merupakan tahun transisi dari pelaksanaan Renstra Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Tahun 2025 – 2029. Sehingga pada LKjIP Tahun

2025 ini memuat laporan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2021–2026 dan Renstra Tahun 2025 – 2029. Akuntabilitas Kinerja memuat hasil pengukuran kinerja yang membandingkan antara rencana/target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Selain itu, pengukuran kinerja juga membandingkan (*benchmarking*) antara data capaian kinerja tahun 2025 dengan data capaian kinerja dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan data capaian kinerja Nasional sepanjang datanya tersedia.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2025 sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2021– 2026

Berdasarkan Renstra Tahun 2021– 2026, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki 2 tujuan dan 3 sasaran yang terdiri dari 8 indikator kinerja. Realisasi kinerja atas tujuan dan sasaran tersebut meliputi: capaian kinerja $\geq 95\%$ sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran atau 75% dari total capaian kinerja; dan capaian kinerja $< 80\%$ sebanyak 1 sasaran atau sebesar 25% dari total capaian kinerja. Hal ini dikarenakan pendataan pelaku usaha mikro dalam Satu Data UMKM pada bulan Agustus 2025 sedang dilakukan updating (validasi).

2. Hasil pengukuran kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2025– 2029

Berdasarkan Renstra Tahun 2025– 2029, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki 1 tujuan dan 3 sasaran yang terdiri dari 6 indikator kinerja. Realisasi kinerja atas tujuan dan sasaran tersebut meliputi: capaian kinerja $\geq 95\%$ sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran atau 100% dari total capaian kinerja. Hal ini menunjukkan **capaian kinerja Tahun 2025 seluruhnya mampu memenuhi target tujuan dan sasaran tahun 2025** berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Artinya, terjadi peningkatan kinerja kelembagaan ekonomi lokal melalui meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, berkembangnya usaha koperasi dan berkembangnya UMKM di Kabupaten Sleman.

3. Realisasi anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.779.184.920,00 dari total anggaran sebesar Rp15.251.001.053,46 atau capaian kinerja keuangan sebesar 96,65%. **Capaian kinerja keuangan sebesar 96,65% tahun anggaran 2025 meningkat**

5,85% dari capaian keuangan tahun anggaran 2024 sebesar 90,80%

Capaian kinerja keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah **menduduki peringkat teratas (peringkat 1)** dalam kinerja keuangan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan dalam melakukan mitigasi realisasi keuangan menggunakan 2 indikator, yaitu berdasarkan anggaran kas dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ perihal Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

LKjIP ini turut menginformasikan Program yang mendukung Tujuan/Sasaran, realisasi anggaran, faktor yang memengaruhi capaian kinerja baik capaian tujuan/sasaran maupun capaian indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, berikut bukti pendukung yang berupa dokumentasi atas kegiatan dan prestasi yang berhasil diperoleh.

Adapun capaian kinerja yang masih perlu ditingkatkan, yakni tujuan/sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas UMKM”, sehubungan dengan capaian kinerja 2,4%. Hal ini dikarenakan pendataan pelaku usaha mikro dalam Satu Data UMKM pada bulan Agustus 2025 sedang dilakukan updating (validasi), sehingga perlu pencermatan dalam proses validasi data tersebut tanpa sekaligus pendataan pelaku usaha mikro baru dalam Satu Data UMKM.

Analisis efisiensi yang dilakukan dalam LKjIP ini menghasilkan data bahwa dari keseluruhan 1 tujuan dan 3 sasaran seluruhnya tercapai dengan realisasi keuangan 96,65%. Hal ini menunjukkan ketepatan dalam perencanaan anggaran dan kegiatan serta adanya langkah mitigasi dalam memastikan realisasi anggaran setiap bulannya. Mitigasi realisasi keuangan dilakukan dengan:

1. Evaluasi realisasi anggaran setiap bulannya dengan menggunakan 2 indikator, yaitu Indikator angkas dan indikator percepatan penyerapan anggaran dan pertumbuhan ekonomi (TW I : 15%, TW II : 50%, TW III : 75%, TW IV : 100%).
2. Mengatur strategi pencairan uang (melalui GU/TU/LS) utamanya di triwulan ke IV agar proses pencairan uang di TW IV dapat berajalan lancar dan optimal.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat terbantu dengan adanya kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, misalnya Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. Keberhasilan capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga tidak terlepas dari adanya kebijakan integrasi sistem perencanaan, keuangan, monitoring evaluasi, dan kinerja, Penerapan e-government dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, rekomendasi sebagaimana disampaikan dalam Lembar Hasil Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, telah ditindaklanjuti dengan berkelanjutan, termasuk direncanakan untuk dilaksanakan dalam tahun 2026.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan media untuk menyampaikan hasil kinerja Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas pada tahun 2025 yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sleman.

Kami menyadari bahwa LKjIP ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu masukan dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di masa yang akan datang. Semoga LkjiP ini bermanfaat bagi *stakeholder* yang berkepentingan.

Sleman, 26 Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah



Sutiasih, SP., MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP.19670405 199803 2 007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
RINGKASAN EKSEKUTIF		ii
KATA PENGANTAR		vi
DAFTAR ISI		vii
DAFTAR TABEL		x
DAFTAR GAMBAR		xvi
 BAB. I. PENDAHULUAN		 1
1.1. Profil Singkat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		1
1.2 Isu Strategis		4
 BAB. II. PERENCANAAN KINERJA		 13
2.1. Perencanaan Strategis Tahun 2025		13
2.1.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026		13
2.1.2. Rencana Strategis Tahun 2025-2029		15
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)		20
2.2.1. Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis 2021-2026		20
2.2.2. Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis 2025-2029		21
2.3. Perjanjian Kinerja		22
2.3.1. Perjanjian Kinerja Periode 2021-2026		22
2.3.2. Perjanjian Kinerja Periode 2025-2029		23
 BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA		 25
3.1. Capaian Kinerja		25
3.1.1. Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama		27
3.1.1.1. Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Periode 2021-2026		27

3.1.1.2.	Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Periode 2025-2029	31
3.1.2.	Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	34
3.2.	Analisis Pengukuran Kinerja	38
3.2.1.	Analisis Pengukuran Kinerja Periode 2021- 2025	38
3.2.2.	Analisis Pengukuran Kinerja Periode 2025- 2029	60
3.3.	Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran	78
3.3.1.	Analisis Efisiensi Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2025	78
3.3.2.	Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Periode 2025-2029	85
3.4.	Analisis Program/Kegiatan	90
3.4.1.	Analisis Program/Kegiatan Periode 2021- 2025	90
3.4.2.	Analisis Program/Kegiatan Periode 2025- 2029	109
3.5.	Inovasi	130
3.6.	Dukungan Terhadap Tema Prioritas Nasional	132
3.6.1.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	132
3.6.2.	Pengentasan Kemiskinan	136
3.6.3.	Peningkatan Investasi	140
3.6.4.	Ketahanan Pangan	145
3.6.5.	Hilirisasi	148
3.7.	Publikasi	152
3.8.	Penghargaan	153
3.9.	Manfaat / Outcome	155
BAB. IV.	PENUTUP	156
4.1.	Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Tahun 2025	156

4.2.	Tindak Lanjut atas Rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2024		158
4.3.	Langkah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Masa Mendatang		158
4.3.1.	Pelayanan Akses Permodalan UMKM melalui Dana Penguatan Modal		158
4.3.2.	Penyesuaian Sub Kegiatan		159
LAMPIRAN			 162

DAFTAR TABEL

Tabel.1.2.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	8
Tabel.2.1.1.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	13
Tabel.2.1.1.2	Tujuan dan Sasaran pada Renstra 2021-2026	15
Tabel.2.1.2.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029	16
Tabel.2.1.2.3	Indikator, Definisi Operasional, dan Target Dinas Koperasi, Usha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029	17
Tabel.2.2.1.1	1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025	20
Tabel.2.2.2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025	21
Tabel.2.3.1.1	Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Tahun 2025	22
Tabel.2.3.2.1	Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Tahun 2025	23
Tabel.3.1.1.1.1	Daftar Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	28
Tabel.3.1.1.1.2	Rincian Data Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	29
Tabel.3.1.1.2.1	Daftar Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	32

Tabel.3.1.1.2.2	Rincian Data Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		33
Tabel.3.1.2.1	Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)		35
Tabel.3.1.2.2	Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)		37
Tabel.3.2.1.1	Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Tujuan 1		38
Tabel.3.2.1.2	Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Indikator Tujuan 1 berdasarkan Perubahan Target 2025		39
Tabel.3.2.1.3	Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Tujuan 1 Tahun 2021-2025		39
Tabel 3.2.1.4	Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Sasaran 1 berdasarkan Target Jangka Menengah		41
Tabel 3.2.1.5	Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Sasaran 1 berdasarkan Perubahan Target 2026		42
Tabel 3.2.1.6	Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1 Tahun 2021-2024		42
Tabel 3.2.1.7	Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Tujuan 2 berdasarkan Target Jangka Menengah		45
Tabel 3.2.1.8	Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Tujuan 2 berdasarkan Perubahan Target 2025		45

Tabel 3.2.1.9	Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Tujuan 2 Tahun 2021-2024	46
Tabel 3.2.1.10	Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Sasaran 2 berdasarkan Target Jangka Menengah	51
Tabel 3.2.1.11	Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Sasaran 2 berdasarkan Perubahan Target 2025	52
Tabel 3.2.1.12	Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2 Tahun 2021-2025	52
Tabel 3.2.1.13	Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Sasaran 3 berdasarkan Target Jangka Menengah	56
Tabel 3.2.1.14	Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Sasaran 3 berdasarkan Perubahan Target 2025	56
Tabel 3.2.1.15	Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3 Tahun 2021-2025	57
Tabel 3.2.2.1	Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Tujuan berdasarkan Target Jangka Menengah	61
Tabel 3.2.2.2	Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Tujuan berdasarkan Perubahan Target 2026	61
Tabel 3.2.2.3	Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Tujuan Tahun 2021-2025	62
Tabel 3.2.2.4	Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Sasaran 1	67
Tabel 3.2.2.5	Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Indikator Sasaran 1	67

	berdasarkan Perubahan Target 2026	
Tabel 3.2.2.6	Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Tujuan 1 Tahun 2021-2025	68
Tabel 3.2.2.7	Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Sasaran 1 berdasarkan Target Jangka Menengah	72
Tabel 3.2.2.8	Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Sasaran 1 berdasarkan Perubahan Target 2026	72
Tabel 3.2.2.9	Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1 Tahun 2021-2025	72
Tabel 3.2.2.10	Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Sasaran 3 berdasarkan Target Jangka Menengah	76
Tabel 3.2.2.11	Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Sasaran 3 berdasarkan Perubahan Target 2026	76
Tabel 3.2.2.12	Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3 Tahun 2021-2025	76
Tabel 3.3.1.1	Realisasi Anggaran Tahun 2025	79
Tabel 3.3.2.1	Realisasi Anggaran Tahun 2025	85
Tabel 3.4.1.1	Realisasi Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025	90
Tabel 3.4.2.1	Realisasi Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025	110
Tabel 3.6.1.1	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Mendukung Upaya P3DN	133

Tabel 3.6.1.2	Alokasi Anggaran Program yang Mendukung P3DN Tahun 2025		133
Tabel 3.6.1.3	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dan 2025		135
Tabel 3.6.2.1	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Mendukung Upaya Pengentasan Kemiskinan		136
Tabel 3.6.2.2	Alokasi Anggaran Program yang Mendukung Pengentasan Kemiskinan Tahun 2025		137
Tabel 3.6.2.3	Jumlah KK Miskin yang Mengikuti Pelatihan Tahun 2025 (Minta Mb Rina)		138
Tabel 3.6.2.4	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dan 2025		140
Tabel 3.6.3.1	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Mendukung Upaya Peningkatan Investasi		141
Tabel 3.6.3.2	Alokasi Anggaran Program yang Mendukung Peningkatan Investasi Tahun 2025		142
Tabel 3.6.3.3	Kerja Sama yang Mendukung Peningkatan Investasi Tahun 2025		144
Tabel 3.6.3.4	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dan 2025		145
Tabel 3.6.4.1	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Mendukung Ketahanan Pangan		146
Tabel 3.6.4.2	Alokasi Anggaran Program yang Mendukung Ketahanan Pangan Tahun 2025		146
Tabel 3.6.4.3	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024 dan 2025		148
Tabel 3.6.5.1	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Mendukung Upaya Peningkatan Investasi		149

Tabel 3.6.5.2	Alokasi Anggaran Program yang Mendukung Peningkatan Investasi Tahun 2025	149
Tabel 3.6.5.3	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 dan 2024	152
Tabel 4.2.1	Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	158

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 .1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2
Gambar 1.1.2	Komposisi ASN	3
Gambar 1.1 3	Komposisi ASN berdasarkan Jenis Kelamin	4
Gambar 1.1.4	Komposisi ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan	4
Gambar 3.2.1.1	Kegiatan Penyusunan Ssitem data terpadu mendukung Sasaran 1	44
Gambar 3.2.1.2	Kegiatan Tahun 2025 dalam Rangka Mencapai Sasaran 3	48
Gambar 3.2.1.3	Kegiatan Pelatihan UMKM Tahun 2025 dalam Rangka Mencapai Sasaran II	50
Gambar 3.2 .1	Kegiatan Pelatihan Koperasi dan UMKM Tahun 2025 dalam Rangka Mencapai Tujuan 1	54
Gambar 3.2.1.4	Kegiatan Pelatihan UMKM Tahun 2025 dalam Rangka Mencapai Sasaran III	60
Gambar 3.2.2.1	Kegiatan Pelatihan Koperasi dan UMKM Tahun 2025 dalam Rangka Mencapai Tujuan 1	66
Gambar 3.2.2.2	Kegiatan Penyusunan Ssitem data terpadu mendukung Sasaran 1	71
Gambar 3.2.2.3	Kegiatan Pelatihan UMKM Tahun 2025 dalam Rangka Mencapai Sasaran II	75
Gambar 3.2.2.4	Kegiatan Tahun 2025 dalam Rangka Mencapai Sasaran 3	78
Gambar. 3.5.1	Pengembangan Sleman Mart	131
Gambar.3.6.1.1	Contoh menu “Produk Lokal”	134

Gambar 3.6.3.1	Pendampingan Pengurusan Badan Hukum KDMP	143
Gambar 3.6.4.1	Contoh Inovasi	147
Gambar 3.6.5.1	Contoh UMKM Yang Terdaftar Dalam Sleman Mart	150
Gambar 3.9.1	Capaian Outcome 2025	155

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Profil Singkat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi berpedoman pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah usaha mikro dan berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
3. Bidang Koperasi;
4. Bidang Usaha Mikro; dan
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Struktur organisasi dan kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didasarkan pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas. Berdasarkan regulasi tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Sedangkan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
- c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:

Gambar 1.1 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



(Sumber: Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas)

Sumber Daya Manusia

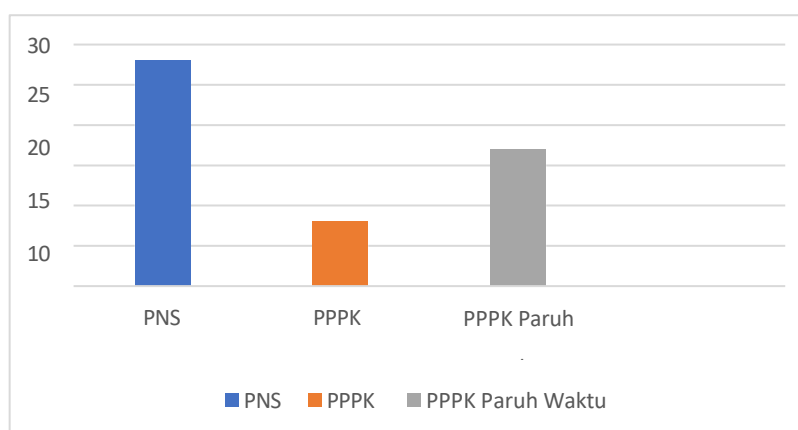
Sumber daya manusia merupakan salah satu modal utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan data per 31 Desember 2025, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki 53 ASN dengan rincian sebagai berikut:

- a. PNS sejumlah 28 orang, yang terdiri dari 7 laki-laki dan 21 Perempuan
- b. PPPK sejumlah 8 orang, dan
- c. PPPK Paruh Waktu sejumlah 17 orang.

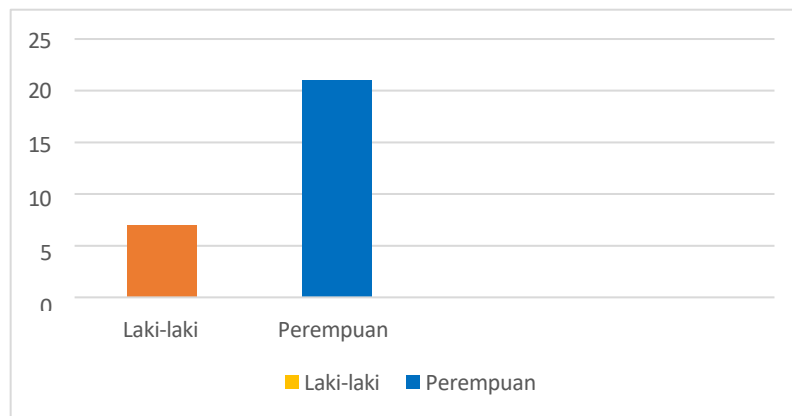
Dari sejumlah 28 PNS, terdapat 6 orang Pejabat Struktural yang seluruhnya perempuan. Pejabat Struktural tersebut meliputi 1 orang pejabat eselon II.b, 1 orang pejabat eselon III.a, 2 orang pejabat eselon III.b, dan 2 orang pejabat eselon IV.a. Selain pejabat struktural, juga terdapat 2 orang Pengawas Koperasi Ahli Muda, 1 orang pengembang kewirausahaan ahli muda dan 3 orang penelaah teknis kebijakan yang terdiri dari 1 laki-laki dan 5 perempuan yang seluruhnya selaku Ketua Tim Kerja.

Komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah per akhir bulan Desember tahun 2025 digambarkan dalam grafik berdasarkan Jenis Kelamin, berdasarkan Golongan, dan berdasarkan Tingkat Pendidikan sebagai berikut :

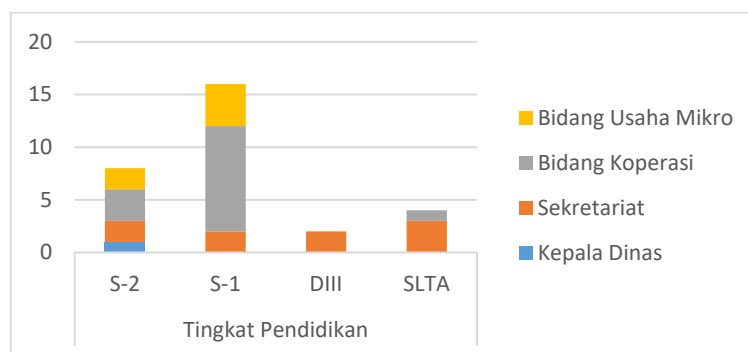
Gambar 1.1 2 Komposisi ASN



Gambar 1.1 3 Komposisi ASN berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 1.1 4 Komposisi ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan



1.2 Isu Strategis

Pembangunan Kabupaten Sleman saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki peran strategis dalam menjawab Isu Strategis sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman baik Tahun 2021-2026 maupun Tahun 2025 - 2029 (RPJMD 2021-2026 dan RPJMD 2025 - 2029).

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana dijabarkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun secara periodik berisi rincian kinerja utama Pemerintah Daerah beserta target kinerja, program, dan anggaran Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan

Bupati, serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan dengan Indikator Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Kinerja tahun 2025 merupakan tahap akhir periode pembangunan Pemerintah Kabupaten Sleman yang ditetapkan dalam Visi Kabupaten Sleman 2021-2026: *“Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong”*, sekaligus menyongsong arah pembangunan dalam masa 5 (lima) tahun mendatang melalui Visi Kabupaten Sleman 2025-2029:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”.

Isu Strategis yang terkait dengan Urusan Pemerintah yang diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam RPJMD Periode 2025-2029, yakni:

a) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Pemerintah RI menerbitkan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menindaklanjuti amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Keputusan Bupati Sleman yang telah diubah beberapa kali, terakhir keputusan Bupati Sleman Nomor 1.9/Kep.KDH/A/2025 Tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Sleman. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menjadi salah satu anggota Tim tersebut yang bertugas salah satunya untuk pembinaan dan pengembangan UMKM.

b) Pengentasan kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu strategis daerah yang dalam penanganannya membutuhkan sinergitas dari berbagai stakeholder termasuk salah satunya peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dengan indikator tujuan meningkatkan Rasio kewirausahaan daerah dan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB dapat mendukung program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sleman. Kegiatan usaha koperasi dan UKM memiliki peran untuk

meningkatkan kontribusinya bagi perekonomian daerah terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat memberikan sumbangsih nyata bagi pengentasan kemiskinan.

c) Koperasi Desa Merah Putih

Pendirian Koperasi Desa Merah Putih dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi, modernisasi manajemen sistem perkoperasian, menekan harga ditingkat konsumen, meningkatkan harga ditingkat petani hingga NTP atau kesejahteraan petani naik, menekan pergerakan tengkulak, memperpendek rantai pasok, meningkatkan inklusi keuangan, menjadi akselerator, konsolidator, dan agregator UMKM, serta menekan tingkat kemiskinan ekstrem.

d) Pembangunan Pusat layanan usaha terpadu (PLUT)

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Bupati dapat membentuk PLUT Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Kabupaten Sleman telah memenangkan beauty contest untuk mendapat DAK Fisik guna pembangunan PLUT pada tahun 2023 dan telah dilakukan pembangunan PLUT pada tahun 2024 sebanyak 16 sapras yang menjadi mandatory dari Kemenkop UKM.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan PLUT KUKM, pada tahun 2025 Dinas Koperasi menambahkan 2 sapras (yaitu akses disabilitas dan landscape) melalui dana APBD. Namun demikian, tantangan saat ini adalah mengoptimalkan peran PLUT KUKM sebagai layanan usaha terpadu bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai sektor.

e) Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Penguatan Modal

Salah satu permasalahan yang ditemui dalam rangka pengembangan usaha baik koperasi maupun usaha mikro adalah permasalahan permodalan. Modal

menjadi stimulus utama dalam pengembangan sebuah usaha. Dalam rangka pembinaan kepada koperasi dan usaha mikro, Dinas Koperasi UKM menjadi salah satu Perangkat Daerah teknis yang ditunjuk melayani penerbitan rekomendasi pengajuan Dana Penguatan Modal berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 54.2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal. Dalam rangka menjaga akuntabilitas dan ketepatan penyaluran Dana Penguatan Modal, maka diperlukan pedoman dalam penerbitan rekomendasi. Pedoman ini diperlukan untuk menetapkan indikator, parameter dan SOP pelayanan penerbitan rekomendasi Dana Penguatan Modal.

Arah pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Sleman dalam masa lima tahun ditetapkan dalam Visi Kabupaten Sleman yang dituangkan dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMD 2025 – 2029. Visi yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong”. Sedangkan visi yang tertuang dalam RPJMD 2025 – 2029 yaitu “Membangun Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan Visi, Misi dan Program Strategis Kabupaten Sleman. Salah satu program strategis Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 yaitu “peningkatan akses dan kapasitas UMKM dan penciptaan wirausaha muda”. Program strategis ini bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan wirausaha masyarakat untuk menciptakan kemandirian ekonomi.

Peran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diimplementasikan melalui penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kemampuan kewirausahaan pelaku usaha, dan membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah tersebut didukung dengan 8 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM),

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, dan Program Perberdayaan Dan Perlindungan Koperasi. Selengkapnya disajikan dalam table berikut ini:

Tabel 1.2 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

VISI ; "Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong"					
Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana guna menjamin pembangunan yang berkeadilan	Meningkatkan Kinerja Kelembagaan Ekonomi Lokal		Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan usaha Menengah (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
2. Mewujudkan keadilan social ekonomi masyarakat					Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
					Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
					Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
			Program Pengembangan UMKM	pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil	fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi

3. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota
4. Pemajuan kebudayaan dalam semangat kebhinekaan toleransi, dan keistimewaan			Program pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Fasilitasi Kunjungan Tamu
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD

					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Pemeliharaan Mebel
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Berkembangnya usaha koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi

					Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotannya dalam daerah kabupaten/kota	peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi
		Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah	Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan usaha Menengah (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
					Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
					Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
					Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2025

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan misi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah menyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 yang berakhir pada 18 September 2025, dan Renstra Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029.

2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan utama, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah dan Berkembangnya UMKM dan Koperasi.

Tabel 2.1.1.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI ; "Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong"			
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Pendampingan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi	Meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi keuangan, aset dan kepegawaian serta administrasi umum berbasis elektronik dan pengembangan aplikasi

		Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan pelayanan berbasis elektronik dan pengembangan aplikasi
Misi 3 : Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Berkembangnya UMKM dan Koperasi	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi	Pendampingan dan identifikasi koperasi	• Jumlah koperasi aktif meningkat • Transformasi koperasi modern yang menerapkan IT • Pelayanan terpadu untuk koperasi • Meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota dalam mengembangkan koperasi melalui kompetensi manajerial, pemasaran, kemitraan dan berbasis IT
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas UMKM	Peningkatan pangsa pasar domestik dan <i>go international</i>	• Riset pasar dan identifikasi serta kategorisasi produk beserta strategi pemasarannya • Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelaku wirausaha dan pada bidang ekonomi kreatif
		Penyediaan sentra dan ruang konsultasi dan inkubasi	• Memaksimalkan PLUT Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab Sleman • Memaksimalkan PLUT untuk UKM
		Peningkatan fasilitasi UKM untuk mendapatkan kemudahan legalitas, permodalan dan	• Mengembangkan kerjasama antar pelaku usaha guna melakukan diversifikasi produk • Membuat kompetisi seperti UKM award atau sejenisnya

- Memfasilitasi ketersediaan hilirisasi produk

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1.1. 1 Tujuan dan Sasaran pada Renstra 2021-2026

[illegible]

2.1.2 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil evaluasi atas Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Tahun 2021-2026 dan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan misi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah menyusun Renstra Tahun 2022-2029 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

yang telah ditetapkan memiliki tujuan utama, yaitu Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Ekonomi Lokal

Pada tahun 2025, dilakukan evaluasi atas penetapan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan definisi operasional pada Renstra Tahun 2021 – 2026. Adapun **perubahan IKU pada Renstra 2025 – 2029 berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:**

1. Penetapan tujuan didasarkan pada urusan dan **mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Sleman.**
2. Pemilihan indikator kinerja diupayakan pada indikator kinerja yang **mendukung pencapaian target program strategis daerah.**
3. Pemilihan indikator kinerja diupayakan pada indikator kinerja yang **memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.**

Dari hasil telaah terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan, isu-isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, serta tugas dan fungsi; dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Renstra Tahun 2025-2029, yaitu:

Tabel 2.1.2. 2 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN OPD	SASARAN	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4
Meningkatnya kinerja sektor sekunder	Meningkatkan kinerja kelembagaan ekonomi lokal		Rasio kewirausahaan daerah
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP;
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN OPD	SASARAN	INDIKATOR
-1	-2	-3	-4
		Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah	Rasio pelaku usaha mikro
		Berkembangnya usaha koperasi	Rasio keanggotaan koperasi

Tabel 2.1.2 3 Indikator, Definisi Operasional, dan Target Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-4				-5	-6	-7	-8	-9	-10	
Rasio Kewirausahaan Daerah	Kewirausahaan adalah kemampuan individu berinovasi dalam kegiatan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja	Jumlah pelaku usaha dibantu buruh tetap, dibagi total angkatan kerja x 100%	%	4,74	4,89	5,02	5,14	5,24	5,34	Satu Data UMKM dan BPS
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Volume usaha koperasi adalah total nilai pendapatan dari barang dan jasa usaha koperasi dalam 1 tahun	Volume usaha koperasi (semua yang domisili di Sleman) dibagi PDRB ADHB, dikali 100%	%	2,38 - 2,51	2,39 - 2,55	2,4 - 2,58	2,41 - 2,61	2,42 - 2,64	2,43 - 2,66	ODS Koperasi dan BPS
Rasio pelaku usaha mikro	Pelaku usaha mikro adalah Individu yang memiliki usaha dengan kategori mikro	Jumlah pelaku usaha mikro dibagi jumlah penduduk usia produktif dikalikan 100	%	14.1	14.3	14.4	14.6	14.8	15	Satu Data UMKM dan BPS

Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-4				-5	-6	-7	-8	-9	-10	
Berkembangnya usaha koperasi	Rasio keanggotaan koperasi	Jumlah Individu yang menjadi anggota dan tergabung dalam koperasi dibuktikan dengan tercatat dalam anggaran dasar koperasi	%	22.5	22.5	22.6	22.6	22.6	22.6	ODS Koperasi dan BPS
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Survei Kepuasan Masyarakat adalah angka yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan	Angka hasil survey IKM yang dilakukan Perangkat Daerah	Indeks	86.00	86.01	86.03	86.05	86.07	86.10	Survei
Predikat AKIP	Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian PAN RB atas Laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap	Penilaian AKIP oleh Inspektorat Daerah		A 83.40	A 83.50	A 83.60	A 83.80	A 83.90	A 84.00	Menpan RB

Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-4				-5	-6	-7	-8	-9	-10	
	instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Predikat AKIP terdiri dari: 1. predikat AA nilai absolute= >85-100 interpretasi= memuaskan 2. predikat A nilai absolute= >75-85 interpretasi= sangat baik 3. predikat B nilai absolute= >65-75 interpretasi= baik 4. predikat CC nilai absolute= >50-65 interpretasi= cukup baik 5. predikat D nilai absolute= 0-30 interpretasi= kurang									

Selaras dengan ketentuan dalam Peraturan MenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa salah satu kondisi untuk merevisi atau melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja yakni dalam hal terjadi perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan demikian, penyampaian pengukuran kinerja dalam LKJIP Tahun 2025 ini memuat hasil penghitungan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap Target Tahun 2025, dan target jangka menengah, serta Perjanjian Kinerja (perubahan terakhir atas perjanjian kinerja) yang memuat akhir periode RPJMD Tahun 2021-2026 maupun awal periode RPJMD 2025-2029.

Serangkaian tindak lanjut dalam target kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2025 merupakan upaya mewujudkan asas akuntabilitas kinerja dalam mendukung implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Sleman, sebagai instansi yang “telah dianggap mampu memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil” (LHE AKIP KemenpanRB, 2024).

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.2.1. Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis 2021-2026

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tercantum dalam dokumen Rencana Strategis sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 sebagai tahun akhir Renstra 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.2.1. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Awal 2025	Target Perubahan 2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	86,28	86,28
2	Predikat AKIP	Predikat	83,40 (A)	83,40 (A)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Awal 2025	Target Perubahan 2025
3	Rasio keanggotaan koperasi	Persentase	22,53%	22,53%
4	Rasio pelaku usaha mikro	Persentase	11%	15
5	Jumlah koperasi baru	Koperasi	5	5
6	Persentase peningkatan asset koperasi	Persentase	0,5%	0,5%
7	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha mikro	Persentase	5%	5%
8	Peningkatan omset pelaku usaha mikro	Persentase	0,05%	0,05%

2.2.2. Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis 2025-2029

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tercantum dalam dokumen Rencana Strategis sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025
1	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persentase	4,74%
2	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persentase	2,38%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	86,28
4	Predikat AKIP	Predikat	83,40 (A)
5	Rasio Pelaku Usaha Mikro	Persentase	14,10%
6	Rasio Keanggotaan Koperasi	Persentase	22,50%

2.3 Perjanjian Kinerja

2.3.1 Periode 2021-2026

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 beserta Perubahannya disusun mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman dan perubahannya, dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2025 (termasuk perubahan atas APBD), sebagaimana tergambar dalam tabel 2.3 1 di bawah ini:

Tabel 2.3.1.1 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Tahun 2025

No.	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Tujuan/	Target 2025
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah			1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	86,28
		1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2.	Predikat AKIP	A 83,40
2.	Berkembangnya UMKM dan Koperasi			1.	Rasio keanggotaan Koperasi	22,50%
				2.	Rasio pelaku usaha mikro	14,10%
		1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi	1.	Jumlah koperasi baru	5
				2.	Persentase peningkatan asset koperasi	0,5%

No.	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Tujuan/	Target 2025
		2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas UMKM	1.	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha mikro	5%
				2.	Peningkatan omset pelaku usaha mikro	0,05%

2.3.2. Periode 2025-2029

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 periode 2025-2029 merupakan bagian dari naskah Perubahan atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun menindaklanjuti pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025-2029, dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2025 (termasuk perubahan atas dokumen tersebut), sebagaimana tergambar dalam tabel 2.3.2.1 di bawah ini:

Tabel 2.3.2.1. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Tahun 2025

No.	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Tujuan/	Target 2025
1.	Meningkatkan Kinerja Kelembagaan Ekonomi Lokal			1.	Rasio Kewirausahaan Daerah	4,74%
				2.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	2,38%
		1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat	1.	Predikat AKIP	A 83,40

No	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Tujuan/	Target 2025
			daerah			
				2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	86,28
		2.	Berkembangnya usaha koperasi	1.	Rasio Keanggotaan Koperasi	22,50%
		3.	Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah	1.	Rasio Pelaku Usaha Mikro	14,10%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab III ini disajikan Capaian Kinerja dan Analisis Pengukuran Kinerja atas realisasi kinerja pada indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran. Analisis meliputi analisis pencapaian kinerja yang memuat analisis mengenai faktor penghambat, faktor pendukung dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja, prestasi yang diperoleh, dan analisis efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Analisis pencapaian kinerja dalam LKJIP ini menyajikan hasil *benchmarking* antara realisasi capaian kinerja (nama perangkat daerah) tahun 2025 dengan capaian pada tahun sebelumnya, dengan capaian kinerja kabupaten/kota di wilayah Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dengan capaian kinerja Pemerintah Pusat/Nasional sepanjang data yang relevan tersedia. Penyajian data *benchmarking* dilakukan dengan harapan dapat memotret secara komprehensif capaian di tingkat internal, regional, dan nasional.

Analisis Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya.

3.1 Capaian Kinerja

Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja

sasaran serta rencana capaiannya.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja Tujuan dan/atau Sasaran, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja Tujuan dan/atau Sasaran.

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bersifat positif yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik.

Berdasarkan perencanaan kinerja pada Bab II, terdapat 2 Rencana Strategis yang menjadi dasar evaluasi pelaksanaan kinerja pada tahun 2025. Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026, terdapat 2 Tujuan dan 3 Sasaran yang didukung dengan 8 IKU dan 8 indikator Perjanjian Kinerja. Pengukuran realisasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerjanya termasuk dengan Perubahannya.

Sedangkan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, terdapat 1 Tujuan dan 3 Sasaran yang didukung dengan 6 IKU dan 6 indikator Perjanjian Kinerja. Pengukuran realisasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerjanya termasuk dengan Perubahannya.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian

sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

3.1.1 Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama

3.1.1.1 Periode 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditentukan dan ditetapkan dari tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026/Perubahan RKPD Tahun 2025/Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, terdapat 8 (delapan) IKU ampunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Daftar IKU meliputi rincian IKU, satuan, definisi operasional dan rumus penghitungan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.1.1 1 berikut ini:

Tabel 3.1.1.1.1. Daftar Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Indeks yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yg dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survey yang sudah ditentukan
2.	Predikat AKIP	Predikat	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Hasil penilaian Kementerian PAN RB
3	Rasio keanggotaan koperasi	Persentase	Rasio keanggotaan koperasi adalah perbandingan antara jumlah anggota koperasi dengan jumlah penduduk usia produktif	Jumlah anggota koperasi dibagi jumlah penduduk usia produktif dikalikan seratus
4	Rasio pelaku usaha mikro	Persentase	Rasio pelaku usaha mikro adalah perbandingan antara jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah dengan jumlah penduduk usia produktif pada tahun n	Jumlah pelaku usaha mikro dibagi jumlah penduduk usia produktif dikalikan seratus
5	Jumlah koperasi baru	Koperasi	Koperasi baru adalah koperasi yang terbentuk pada tahun n	Jumlah koperasi baru pada tahun n
6	Persentase peningkatan asset koperasi	Persentase	Aset koperasi adalah harta koperasi yang diperoleh dalam periode tertentu	Jumlah asset koperasi tahun n dikurangi jumlah asset tahun n-1 dibagi jumlah asset tahun n-1 dikalikan seratus

7	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha mikro	Persentase	Peningkatan jumlah pelaku usaha mikro adalah penambahan pelaku usaha mikro yang terdata di Dinas Koperasi UKM	Jumlah pelaku usaha mikro tahun n dikurangi jumlah pelaku usaha mikro tahun n-1 dibagi jumlah pelaku usaha mikro tahun n-1 dikalikan seratus
8	Peningkatan omset pelaku usaha mikro	Persentase	Peningkatan jumlah omset pelaku usaha mikro adalah penambahan hasil penjualan pelaku usaha mikro	Jumlah omset tahun n dikurangi jumlah omset tahun n-1 dibagi jumlah omset tahun n-1 dikalikan seratus

Sedangkan rincian data IKU meliputi satuan, target dan perubahannya, realisasi tahun sebelumnya, capaian kinerja (realisasi tahun 2025), target jangka menengah, dan tingkat kemajuan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.1.1.2 berikut ini:

Tabel 3.1.1.1.2. Rincian Data Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi					Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah (Target Akhir RPJMD 2021-2026)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah
				2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	86,28	86,11	84,47	85,51	86,00	89,66	103,92	86,28	103,92
2.	Predikat AKIP	Predikat	A	A	A	A 83,40	A 83,40	A 83,60	100,24%	A	100,24
3.	Rasio keanggotaan koperasi	Persentase	15	1	1	22,51	21,26	23,57	104,63	22,53	104,63
4.	Rasio pelaku usaha mikro	Persentase	22,53	11	11,95	13,50	13,99	15,16*	101,1	15	101,1

5.	Jumlah koperasi baru	Koperasi	5	12	4	5	9	93*	1.860	5	1.860
6.	Persentase peningkatan asset koperasi	Persentase	0,5	0,5	-21,88	-0,85	2,25	1,34	267,52	0,5	267,52
7.	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha mikro	Persentase	5	5	5	21,23	0,35	0,12*	2,4	5	2,4
8.	Peningkatan omset pelaku usaha mikro	Persentase	0,05	0,05	0,77%	18,43	0,98%	0,90*	849,4	0,05	849,4
Rata-rata capaian										423,62%	

*) data per Agustus 2025

Analisis capaian kinerja IKU berdasarkan data dalam Tabel 3.1.1.1 2 dapat diketahui bahwa dari 8 IKU ampunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, **terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja kurang dari 100%**, yaitu: Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha mikro dengan persentase capaian kinerja 2,4%. Hal ini dikarenakan pada bulan Agustus 2025 **sedang dilakukan updating data usaha mikro dalam Satu Data UMKM**.

Analisis capaian kinerja berdasarkan data dalam Tabel 3.1.1.1 2 menunjukkan bahwa capaian kinerja IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hingga 5 (lima) tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 telah **mengalami tingkat kemajuan capaian indikator 423,62%** bila dibandingkan dengan target jangka menengah, dan sebesar 423,62% bila dibandingkan dengan perubahan atas target tahun 2025.

Bila diperhitungkan secara rata-rata keseluruhan, tingkat kemajuan terendah pada angka 2,4% (Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha mikro) dan tertinggi pada angka 1.860% (Jumlah koperasi baru) dalam hal dibandingkan dengan Target Jangka Menengah.

3.1.1.2 Periode 2025-2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditentukan dan ditetapkan dari tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029/Perubahan RKPD Tahun 2025/Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, terdapat 6 (enam) IKU ampunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Daftar IKU meliputi rincian IKU, satuan, definisi operasional dan rumus penghitungan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.1.2 1 berikut ini:

Tabel 3.1.1.2 1 Daftar Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Indeks yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yg dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survey yang sudah ditentukan
2.	Predikat AKIP	Predikat	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Hasil penilaian Kementerian PAN RB
3	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persentase	Kewirausahaan adalah kemampuan individu berinovasi dalam kegiatan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja	Jumlah pelaku usaha dibantu buruh tetap, dibagi total angkatan kerja x 100%
4	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persentase	Volume usaha koperasi adalah total nilai pendapatan dari barang dan jasa usaha koperasi dalam 1 tahun	Volume usaha koperasi (semua yang domisili di Sleman) dibagi PDRB ADHB, dikali 100%
5	Rasio pelaku usaha mikro	Persentase	Pelaku usaha mikro adalah Individu yang memiliki usaha dengan kategori mikro	Jumlah pelaku usaha mikro dibagi jumlah penduduk usia produktif dikalikan 100%
6	Rasio Keanggotaan Koperasi	Persentase	Jumlah Individu yang menjadi anggota dan tergabung dalam koperasi dibuktikan dengan tercatat dalam anggaran dasar koperasi	Jumlah anggota koperasi dibagi jumlah penduduk usia produktif dikalikan 100%

Sedangkan rincian data IKU meliputi satuan, target dan perubahannya, realisasi tahun sebelumnya, capaian kinerja (realisasi tahun 2025), target jangka menengah, dan tingkat kemajuan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.1 2 berikut ini:

Tabel 3.1.1.2 2 Rincian Data Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi					Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah (Target Akhir RPJMD 2025-2029)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah
				2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	86,28	86,11	84,47	85,51	86,00	89,66 %	103,92%	86,10%	104,13%
2.	Predikat AKIP	Predikat	A	A	A	A 83,40	A 83,40	A 83,60	100,24%	A	100,24%
3.	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persentase	4,74	-	-	-	-	4,77%	100,67%	5,34%	89,33%
4.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persentase	2,38	-	-	-	-	2,62%	110,08%	2,43%	107,82%
5.	Rasio pelaku usaha mikro	Persentase	14,10	11%	11,95%	13,50 %	13,99%	15,21 %	107,90%	15,00%	101,4%
6.	Rasio Keanggotaan Koperasi	Persentase	22,50	1%	1%	22,51 %	21,26%	23,57 %	104,76%	22,6%	104,29%
Rata-rata capaian									104,56%	101,16%	103,76%

Analisis capaian kinerja IKU berdasarkan data dalam Tabel 3.1.1.2 1 menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki 6 (enam) IKU. Dari 6 IKU tersebut, seluruhnya mampu memenuhi target sehingga capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mencapai 100%.

Analisis capaian kinerja berdasarkan data dalam Tabel 3.1.1.2 2, menunjukkan bahwa pada tahun 2025 merupakan masa transisi berakhirnya Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan berlakunya Rencana Startegis Tahun 2025-2029. Dalam Rencana Startegis Tahun 2025-2029 terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama karena pertimbangan untuk mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Sleman, mendukung pencapaian target program strategis daerah, dan memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga terdapat 2 Indikator Kinerja Utama yang tidak dapat ditampilkan data capaiannya (tidak terdapat *history*-nya) pada tahun 2021 s/d 2024, yaitu Indikator Rasio Kewirausahaan Daerah dan Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029, capaian Kinerja IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2025 **mengalami tingkat kemajuan capaian indikator 101,16% bila dibandingkan dengan target jangka menengah, dan sebesar 103,76% bila dibandingkan dengan perubahan atas target tahun 2026.**

Jika diperhitungkan secara rata-rata keseluruhan, tingkat kemajuan terendah pada Indikator Rasio Kewirausahaan Daerah dengan capaian 89,33% dan tingkat kemajuan tertinggi pada Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB dengan capaian 107,82% dalam hal dibandingkan dengan Target Jangka Menengah.

3.1.2 Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 beserta perubahannya disusun mengacu pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2025 beserta perubahannya. Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disajikan dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja tujuan dan sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan membandingkan antara target kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun 2025, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.1. Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)
						Target	Perubahan Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	86,28 %	86,28%	89,66%	103,92%
		1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	Predikat	A 83,40	A 83,40	A 83,60	100,24%
2.	Berkembangnya UMKM dan Koperasi			Rasio keanggotaan Koperasi	Persentase	22,53 %	22,53%	23,57%	104,63%

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)
						Target	Perubahan Target	Realisasi	
				Rasio pelaku usaha mikro	Persentase	15%	15%	15,16%	101,10%
Rata-rata capaian									102,87%
		2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi	Jumlah koperasi baru	Koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi	93	1860,0%
				Persentase peningkatan aset koperasi	Persentase	0,5%	0,5%	1,34%%	267,52%
Rata-rata capaian									1063.76 %
		3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas UMKM	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha mikro	Persentase	5%	5%	0,12%*	2,4%
				Peningkatan omset pelaku usaha mikro		0,05%	0,05%	0,42%	849,4%
Rata-rata capaian									425,90%
Rata-rata capaian keseluruhan									423,62%

*) merupakan angka realisasi bulan Agustus tahun 2025

Tabel 3.1.2.2. Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025
(Renstra 2025-2029)

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
						Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatkan Kinerja Kelembagaan Ekonomi Lokal			1. Rasio Kewirausahaan Daerah	Prosentase	4,74	4,77	100,67
				2. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Prosentase	2,38	2,62	110,08
		1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	Predikat	A 83,40	A 83,60	100,24%
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Prosentase	86,28	89,66	103,92
		2.	Berkembangnya usaha koperasi	Rasio Keanggotaan Koperasi	Prosentase	22,50	23,57	104,76
		3.	Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah	Rasio Pelaku Usaha Mikro	Prosentase	14,10	15,21	107,90

3.2 Analisis Pengukuran Kinerja

3.2.1. Periode 2021 – 2025

Tujuan 1:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah”

Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah didukung oleh 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah adalah Indeks yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yg dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survey yang sudah ditentukan.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah merupakan capaian kinerja per Desember 2025. Hal ini dikarenakan penilaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah hanya dilakukan per semester.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah sebesar 89,66% dari target indikator sebesar 86,28%. Capaian kinerja pada tahun 2025 sama dengan tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan perubahan target atas tahun 2025, yaitu dengan **capaian sebesar 103,92%.**

Tabel 3.2.1.1. Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Tujuan 1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	86,28 %	86,28%	IKM standar : 91,85% IKM rapat : 87,47%	103,92%	103,92%	86,28%

Tabel 3.2.1.2. Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Indikator Tujuan 1 berdasarkan Perubahan Target 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Perubahan Target 2025	Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	86,28%	86,28%	IKM standar : 91,85% IKM rapat : 87,47%	103,92%	103,92%	86,28%

Tabel 3.2.1.3. Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Tujuan 1 Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja					Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Persentase	106,43	98,31%	99,31%	99,78%	103,92%	86,28%	86,28%

Berdasarkan Tabel 3.2 menunjukkan bahwa rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Tahun 2021-2025 dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami tren positif. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan nilai secara gradual yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan.

Selain itu, jika dilihat dari capaian kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah sebesar 103,92% menunjukkan bahwa adanya keberhasilan pencapaian kedua Indikator tersebut terhadap target yang telah ditentukan.

Hasil *benchmarking* capaian kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah menunjukkan bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman sebesar 89,66%, sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada akhir tahun 2025 Kabupaten Gunung Kidul sebesar 90,02% (<https://www.google.com/search?q=predikat+apip+tahun+2025+kabupaten+gunun>

[gkidul&sca_esv=847abbe1d756c357&ei=ZohtacS7BeSy4-EPp92bwQl&oq=predikat+apip+tahun+2025+kabupaten+gunu&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJ3ByZWRpa2F0IGFwaXAqdGFodW4gMjAyNSBrYWJ1cGF0ZW4gZ3VudSoCCAAyBxAhGKABGAoyBxAhGKABGAoyBxAhGKABGApluBhQ1QNYywxwAXgAkAEAmAGrAaAB2QOqAQMyLjK4AQHIAQD4AQGYAgWgArYEwgIIEAAYsAMY7wXCAgsQABiABBiwAxiiBJgDAIlgGAZAGBZIHazEuNKAHpxayBwMwLjS4B64EwgcfMI0xLjTIBzOACAA&sclient=gws-wiz-serp\).](https://gkidul&sca_esv=847abbe1d756c357&ei=ZohtacS7BeSy4-EPp92bwQl&oq=predikat+apip+tahun+2025+kabupaten+gunu&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJ3ByZWRpa2F0IGFwaXAqdGFodW4gMjAyNSBrYWJ1cGF0ZW4gZ3VudSoCCAAyBxAhGKABGAoyBxAhGKABGAoyBxAhGKABGApluBhQ1QNYywxwAXgAkAEAmAGrAaAB2QOqAQMyLjK4AQHIAQD4AQGYAgWgArYEwgIIEAAYsAMY7wXCAgsQABiABBiwAxiiBJgDAIlgGAZAGBZIHazEuNKAHpxayBwMwLjS4B64EwgcfMI0xLjTIBzOACAA&sclient=gws-wiz-serp).)

Adapun **faktor pendukung** yang mempengaruhi pencapaian **Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah** antara lain:

1. Efisiensi anggaran dari kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan direvisi agar dapat dimanfaatkan untuk pembelian barang modal yang dapat melengkapi fasilitas ruang rapat, misalnya *smart* TV untuk mendukung fasilitas paparan materi rapat.
2. Pemahaman yang meningkat dari peserta kegiatan setelah dilakukan sosialisasi dan edukasi dalam pengisian kuesioner yang membutuhkan kemampuan teknologi (*barcode*).
3. Adanya peningkatan kuantitas bimtek salah satunya dari aspirasi DPRD yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UKM sehingga meningkatkan potensi jumlah peserta dalam pengisian kuesioner.

Sedangkan **faktor penghambat** yang mempengaruhi pencapaian **Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah** antara lain:

1. Dinas Koperasi UKM memiliki gedung kantor yang kurang representatif baik dari segi lokasi maupun ukuran gedung.
2. Terbatasnya anggaran bimtek yang berpengaruh pada tempat penyelenggaraan pelatihan.
3. Keterbatasan anggaran (selain Pokir, PUPM, dan aspirasi) dalam untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang peserta kegiatan tersebut merupakan sasaran dalam pengisian kuesioner.

Langkah kongkrit yang dilakukan Dinas Koperasi UKM sebagai upaya mengatasi kendala yang ada antara lain:

1. Dinas Koperasi UKM melakukan perubahan layout kantor sehingga sarana rapat lebih memadai.
2. Menjalinkan kerjasama dengan penyedia jasa akomodasi sehingga bisa mendapatkan harga sewa tempat sesuai anggaran Dinas yang tersedia.
3. Menjalinkan kerjasama dan/atau sponsorship dengan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan sehingga dapat menambah sasaran pengisian kuesioner.

Sasaran 1:

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah”

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh 1 indikator, yaitu Predikat AKIP. Predikat AKIP didapatkan dari Hasil penilaian Kementerian PAN RB. Realisasi Indikator Predikat AKIP merupakan capaian kinerja per Desember 2025. Hal ini dikarenakan penilaian Indikator Predikat AKIP hanya dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Realisasi Predikat AKIP sebesar A dari target sebesar A. Capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100,24% dengan tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah sebesar 100,24%, dan bila dibandingkan dengan Perubahan atas Target tahun 2025 sebesar 100,24%.

Tabel 3.2.1.4. Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Sasaran 1 berdasarkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Predikat AKIP	Predikat	A 83,40	A 83,40	A* 83,60	100,24%	100,24%	A

*) merupakan angka realisasi tahun 2024

Tabel 3.2.1.5. Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Sasaran 1 berdasarkan Perubahan Target 2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Perubahan Target 2025	Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Predikat AKIP	Predikat	A 83,40	A 83,40	A* 83,60	100,24%	100,24%	A

*) merupakan angka realisasi tahun 2024

Tabel 3.2.1.6. Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1 Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja					Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
Predikat AKIP	Persentase	100%	100%	100%	100%	100,24%	100,24%	A

Berdasarkan Tabel 3.2.1.6 menunjukkan bahwa rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Tahun 2021-2025 dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami tren positif. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan nilai secara gradual yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan.

Adapun **faktor pendukung** yang mempengaruhi pencapaian **Predikat AKIP** antara lain:

1. Terintegrasinya sistem perencanaan, keuangan, monitoring evaluasi, dan pelaksanaan kinerja.
2. Penentuan Indikator kinerja terukur, dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung visi misi Kabupaten Sleman
3. Penerapan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan.
4. Adanya komitmen pimpinan terkait penerapan budaya satriya ke dalam budaya kerja.
5. Penerapan manajemen resiko dan mitigasi resiko pada kegiatan yang berpotensi memiliki resiko tinggi yang nantinya dapat menimbulkan dampak negatif bagi organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

6. Penetapan SOP dan menjabarkan proses bisnis pada setiap kegiatan.
7. Penyusunan regulasi Kepala Dinas bagi kegiatan tertentu yang memiliki resiko tinggi, yaitu penetapan SK Kepala Dinas Nomor 86 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Rekomendasi Pengajuan Dana Penguatan Modal Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman.
8. Melakukan evaluasi dan penyesuaian sub kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja.

Sedangkan **faktor penghambat** yang mempengaruhi pencapaian Indikator **Predikat AKIP** antara lain:

1. Ketersediaan data yang tidak valid dan terkini.
2. Banyaknya data yang diperlukan untuk melakukan monev sekaligus menentukan target dalam perencanaan.
3. Adanya temuan dan rekomendasi dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas yaitu peningkatan target Indikator Kinerja Utama (IKU)

Langkah kongkrit yang dilakukan Dinas Koperasi UKM sebagai upaya mengatasi kendala yang ada antara lain:

1. Penyusunan sistem Satu Data UMKM untuk pendataan pelaku usaha UMKM.
2. Penyusunan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Target Reaslisasi Indikator (SIMETRI).
3. Melakukan evaluasi atas IKU renstra tahun sebelumnya dan melakukan perubahan IKU baik indikator dan/atau definisi operasionalnya yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Gambar 3.2.1.1. Kegiatan Penyusunan Sistem data terpadu mendukung Sasaran 1



Tujuan 2:

“Berkembangnya UMKM dan Koperasi”

Tujuan 2 yaitu Berkembangnya UMKM dan Koperasi didukung oleh 2 indikator kinerja, meliputi Indikator Rasio Keanggotaan Koperasi dan Indikator Rasio Pelaku Usaha Mikro.

Indikator Rasio Keanggotaan Koperasi adalah perbandingan antara jumlah anggota koperasi dengan jumlah penduduk usia produktif. Sedangkan Rasio Pelaku Usaha Mikro adalah perbandingan antara jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah dengan jumlah penduduk usia produktif pada tahun n.

Realisasi Indikator Rasio Keanggotaan Koperasi merupakan capaian kinerja per Desember 2025. Hal ini dikarenakan pendataan keanggotaan koperasi berdasarkan pada laporan RAT yang disusun oleh masing-masing koperasi setiap tahun sekali.

Realisasi **Indikator Rasio Keanggotaan Koperasi** sebesar 23,57% dari target sebesar 22,53%. Capaian kinerja pada tahun 2025 sama dengan tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah dan capaian

kinerja jika dibandingkan dengan perubahan target atas tahun 2025, yaitu dengan **capaian sebesar 104,63%.**

Realisasi **Indikator Rasio Pelaku Usaha Mikro (data per Agustus 2025)** sebesar 15,16% dari target sebesar 15%. Capaian kinerja pada tahun 2025 sama dengan tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan perubahan target atas tahun 2025, yaitu dengan **capaian sebesar 101,10%.**

Tabel 3.2.1.7. Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Tujuan 2 berdasarkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Rasio keanggotaan koperasi	Persentase	1%	22,53%	22,57%	104,63%	104,63%	22,53%
Rasio pelaku usaha mikro	Persentase	11%	15%	15,16%	101,10%	101,10%	15%
Rata-rata capaian kinerja					102,87%		

Tabel 3.2.1.8. Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Tujuan 2 berdasarkan Perubahan Target 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Perubahan Target 2025	Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Rasio keanggotaan koperasi	Persentase	1%	22,53%	22,57%	104,63%	104,63%	22,53%
Rasio pelaku usaha mikro	Persentase	11%	15%	15,16%	101,10%	101,10%	15%
Rata-rata capaian kinerja					102,87%		

Tabel 3.2.1.9. Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Tujuan 2 Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja					Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
Rasio keanggotaan koperasi	Persen tase	29,29%	100%	2046,36 %	94,49%	104,63%	22,53%	22,53%
Rasio pelaku usaha mikro	Persen tase	103,36 %	108,64%	122,69%	99,93%	101,10%	15%	15%

Berdasarkan Tabel 3.2.1.9. menunjukkan bahwa rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Rasio Keanggotaan Koperasi Tahun 2021-2025 mengalami penurunan pada tahun 2024 namun capain indikator kinerja kembali mengalami kenaikan pada tahun 2025. Sedangkan untuk Indikator Rasio Pelaku Usaha Mikro juga mengalami hal yang serupa, yaitu mengalami penurunan pada tahun 2024 namun capain indikator kinerja kembali mengalami kenaikan pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen untuk terus melakukan evaluasi, mitigasi langkah-langkah pencapaian target kinerja dan perbaikan kinerja pada tahun 2025.

Selain itu, jika dilihat dari capaian kinerja Indikator Rasio Keanggotaan Koperasi dan Indikator Rasio Pelaku Usaha Mikro masing-masing sebesar 104,63% dan 101,10% menunjukkan bahwa adanya keberhasilan pencapaian kedua Indikator tersebut terhadap target yang telah ditentukan.

Hasil *benchmarking* capaian kinerja Indikator Rasio Pelaku Usaha Mikro menunjukkan bahwa capaian Indikator Rasio Pelaku Usaha Mikro Kabupaten Sleman sebesar 15,21%, sedangkan Indikator Rasio Pelaku Usaha Mikro DIY sebesar 98,36% bersal dari data UMKM se DIY (https://www.google.com/search?q=rasio+jumlah+pelaku+usaha+mikro+diy+tahun+2025+provinsi+diy&sca_esv=847abbe1d756c357&ei=llltabWbBfuP4-EPoffr6Aw&ved=0ahUKEwi1tZ_EupaSAX7xzgGHah7Gs0Q4dUDCB&uact=5&oeq=rasio+jumlah+pelaku+usaha+mikro+diy+tahun+2025+provinsi+diy&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcuAIO3Jhc2lvIGp1bWxhaCBwZWxha3UgdXNhaGEgbWlrcm8gZGI5IHRhaHVuIDlwMjUgcHJvdmluc2kgZGI5MgUQABjvBTIFEAAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAAY7wVlyBIQqg1YkhRwAXgAkAEAmAF-

[oAH5BAoBAzluNbgBA8gBAPgBAZgCBqAC-ATCAggQABiwAxjvBcICCxAAGIAEGLADGKIEwgIIEAAYgAQYogSYAwCIBgQBgWSBwMxLjWgB4QrsgcDMC41uAfVBMiHBTItMS41yAdMgAgA&scient=gws-wiz-serp](https://www.google.com/search?q=AH5BAoBAzluNbgBA8gBAPgBAZgCBqAC-ATCAggQABiwAxjvBcICCxAAGIAEGLADGKIEwgIIEAAYgAQYogSYAwCIBgQBgWSBwMxLjWgB4QrsgcDMC41uAfVBMiHBTItMS41yAdMgAgA&scient=gws-wiz-serp)).

Adapun **faktor pendukung** yang mempengaruhi pencapaian **Indikator Rasio Keanggotaan Koperasi** antara lain:

1. Masing-masing koperasi memiliki rencana kerja dan target kenaikan jumlah anggota minimal 12 orang setiap tahunnya.
2. Masing-masing koperasi aktif mensosialisasikan koperasi kepada masyarakat setempat untuk bergabung menjadi anggota koperasi.
3. Peningkatan koperasi baru pada tahun 2024 sebanyak 9 koperasi yang berdampak pada peningkatan jumlah anggota koperasi yang tercatat pada tahun 2025.

Sedangkan **faktor penghambat** yang mempengaruhi pencapaian **Indikator Rasio Keanggotaan Koperasi** antara lain:

1. Adanya perubahan anggaran dasar koperasi dari koperasi primer kab/kota menjadi koperasi primer provinsi atau koperasi primer nasional yang mengakibatkan jumlah anggota koperasi primer kab/kota berpotensi mengalami penurunan.
2. Adanya isu negatif “investasi bodong” yang menyebar di masyarakat sehingga meningkatkan kecurigaan masyarakat terhadap kegiatan usaha koperasi.
3. Adanya koperasi yang tidak aktif. Koperasi yang tidak aktif ini ditindaklanjuti dengan rekomendasi pembubaran koperasi. Apabila koperasi dibubarkan maka akan berdampak pada jumlah anggota koperasi di Kabupaten Sleman.
4. Kompetensi sumber daya manusia Dinas Koperasi UKM yang masih perlu ditingkatkan agar dapat melakukan pembinaan terhadap koperasi dengan lebih baik sehingga koperasi di Kabupaten Sleman dapat menjalankan usahanya dan masuk dalam kategori “sehat”

Langkah kongkrit yang dilakukan Dinas Koperasi UKM sebagai upaya mengatasi kendala yang ada antara lain:

1. Memberikan pelatihan kompetensi kepada pengurus koperasi dan memfasilitasi penerbitan sertifikat kompetensinya dari BNSP untuk meningkatkan kemampuan pengurus koperasi menjalankan kegiatan usahanya dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi di Kabupaten Sleman.
2. Melaksanakan berbagai kegiatan untuk yang bersifat persuasif untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat bergabung dengan koperasi, misalnya sosialisasi dan magang internship.
3. Mengadakan pelatihan dan uji kompetensi bagi SDM Dinas Koperasi UKM dengan jabatan pengawas koperasi.

Gambar 3.2.1.2. Kegiatan Tahun 2025 dalam Rangka Mencapai Sasaran 3



Faktor pendukung yang mempengaruhi pencapaian **Indikator Rasio Pelaku Usaha Mikro** antara lain:

1. Operasionalisasi gedung PLUT KUKM Minggir yang dimanfaatkan untuk pelayanan konsultasi, pelatihan usaha, dan ruang pameran produk UMKM.
2. Dinas Koperasi UKM melakukan inovasi dengan melaksanakan kegiatan *non budgeter* dalam rangka penumbuhan kewirausahaan seperti; Gembira (Gerakan Pemuda Indonesia Berwirausaha) dan Satu Sama Bunda.
3. Kolaborasi dengan akademisi untuk pendampingan UMKM oleh akademisi.
4. Penambahan anggaran pelatihan penumbuhan kewirausahaan usaha mikro

dari aspirasi DPRD.

5. Penambahan SDM CPNS fungsional kewirausahaan yang dapat menambah kapasitas Dinas dalam melaksanakan berbagai kegiatan.

Sedangkan **faktor penghambat** yang mempengaruhi pencapaian **Indikator Rasio Pelaku Usaha Mikro** antara lain:

1. Kondisi ekonomi (misalnya inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lainnya) yang tidak selalu stabil yang berpengaruh pada usaha yang dijalankan usaha mikro.
2. Kemampuan permodalan pelaku usaha yang tidak seluruhnya kuat mengakibatkan adanya pelaku usaha yang tidak dapat bertahan lebih dari 2 tahun.
3. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan teknologi pelaku usaha untuk dapat mendaftarkan diri secara mandiri dalam sistem Satu Data UMKM agar tercatat dalam data base Dinas Koperasi UKM.
4. Kurang berminatnya pelaku usaha mendaftarkan diri secara mandiri dalam sistem Satu Data UMKM.

Langkah kongkrit yang dilakukan Dinas Koperasi UKM sebagai upaya mengatasi kendala yang ada antara lain:

1. Memperluas pangsa pasar UMKM dengan menyediakan media online sebagai wadah promosi produk UMKM
2. Melaksanakan bimtek dengan cara pemaketan sehingga mampu mengefisiensi waktu dan SDM. Dengan begitu jumlah bimtek yang diselenggarakan dapat lebih banyak kuantitasnya namun dengan penyelesaian administrasi yang efisien
3. Pengembangan SIDARTA (Optimalisasi Pendaftaran dan Update Data Masif pada Aplikasi Sistem Satu Data UMKM Kabupaten Sleman Bagi Pelaku Usaha Secara Mandiri Melalui Sosialisasi Berbasis Digital) untuk menyebarluaskan dan memudahkan pelaku usaha mendaftarkan diri dalam sistem Satu Data UMKM secara mandiri.

Gambar 3.2.1.3. Kegiatan Pelatihan UMKM Tahun 2025 dalam Rangka Mencapai Sasaran II



Sasaran 2:

“ Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Koperasi “

Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kauntitas Koperasi didukung oleh 2 indikator, yaitu Indikator Jumlah Koperasi Baru dan Indikator Persentase Peningkatan Asset Koperasi.

Koperasi baru adalah koperasi yang terbentuk pada tahun n. Sedangkan aset koperasi adalah harta koperasi yang diperoleh dalam periode tertentu. Presentase peningkatan asset koperasi dihitung dari jumlah asset koperasi tahun n dikurangi jumlah asset tahun n-1 dibagi jumlah asset tahun n-1 dikalikan seratus.

Realisasi **Indikator Jumlah Koperasi Baru (data per Agustus 2025)** sebesar 93 koperasi dari target sebesar 5 koperasi. Capaian kinerja pada tahun

2025 sama dengan tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan perubahan target atas tahun 2025, yaitu dengan **capaian sebesar 1.860%**.

Realisasi Indikator Persentase Peningkatan Asset Koperasi merupakan capaian kinerja per Desember 2025. Hal ini dikarenakan pendataan aset koperasi berdasarkan pada laporan RAT yang disusun oleh masing-masing koperasi setiap tahun sekali.

Realisasi **Indikator Persentase Peningkatan Asset Koperasi** sebesar 1,34% koperasi dari target sebesar 0,5%. Capaian kinerja pada tahun 2025 sama dengan tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan perubahan target atas tahun 2025, yaitu dengan **capaian sebesar 267,52%**.

Tabel 3.2.1.10. Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Sasaran 2 berdasarkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Jumlah koperasi baru	Koperasi	5	5	9	1860%	1860%	5%
Persentase peningkatan asset koperasi	Persentase	0,5%	0,5%	1,34%	267,52%	267,52%	0.5%
Rata-rata capaian kinerja					1063,76 %		

Tabel 3.2.1.11. Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Sasaran 2 berdasarkan Perubahan Target 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Perubahan Target 2025	Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Jumlah koperasi baru	Koperasi	5	5	9	1860%	1860%	5%
Persentase peningkatan aset koperasi	Persentase	0,5%	0,5%	1,34%	267,52%	267,52%	0,5%
Rata-rata capaian kinerja					1063,76%		

Tabel 3.2.1.12. Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2 Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja					Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
Jumlah koperasi baru	Koperasi	220%	80%	100%	180%	1860%	5 koperasi	5 Koperasi
Persentase peningkatan aset koperasi	Persentase	4,64%	-4376%	-170%	450%	267,52%	0.5%	0,5%

Berdasarkan Tabel 3.2.1.12. menunjukkan bahwa rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Jumlah Koperasi Baru Tahun 2021-2025 mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2025. Sedangkan untuk Indikator Prosentase peningkatan aset koperasi pada tahun 2025 capaian kinerja menurun dibandingkan tahun 2024.

Selain itu, jika dilihat dari capaian kinerja Indikator Jumlah Koperasi Baru dan Indikator Prosentase peningkatan aset koperasi masing-masing sebesar 1860% dan 267,52% menunjukkan bahwa adanya keberhasilan pencapaian kedua Indikator tersebut terhadap target yang telah ditentukan.

Adapun **faktor pendukung** yang mempengaruhi pencapaian **Indikator Jumlah Koperasi Baru** adalah adanya **Penerbitan Instruksi Presiden No 9**

Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemerintah Kabupaten Indikator Rasio Jumlah Koperasi Baru Sleman telah menindaklanjuti instruksi tersebut dengan memfasilitasi **pendirian KDMP pada 86 Kalurahan**. Hasil dari fasilitasi tersebut adalah pada tahun 2025 telah diterbitkan badan hukum untuk 86 KDMP.

Sedangkan **faktor penghambat** yang mempengaruhi pencapaian **Indikator Rasio Jumlah Koperasi Baru** antara lain:

1. Adanya isu negatif “investasi bodong” yang menyebar di masyarakat sehingga meningkatkan kecurigaan masyarakat terhadap kegiatan usaha koperasi.
2. Memenuhi persyaratan modal usaha bagi koperasi simpan pinjam yang akan berdiri.
3. Memenuhi persyaratan jumlah anggota dan rencana kerja yang telah disusun bagi koperasi yang akan beridiri

Langkah kongkrit yang dilakukan Dinas Koperasi UKM sebagai upaya mengatasi kendala yang ada antara lain:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat berkoperasi.
2. Menginisiasi kerjasama dengan pelaku usaha mikro untuk berkoperasi.

Adapun **faktor pendukung** yang mempengaruhi pencapaian **Persentase Peningkatan Asset Koperasi** antara lain:

1. Penerbitan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah ditindaklanjuti dengan pendirian 86 KDMP di Kabupaten Sleman. Dari 86 KDMP tersebut, terdapat 3 KDMP (2 diantaranya KDMP Mock Up) yang merupakan pengembangan dari koperasi sebelumnya yang sudah memiliki usaha sehingga dapat dilakukan perhitungan volume usahanya pada tahun 2025. Kelebihan dari KDMP adalah mendapat dukungan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seperti; hibah untuk mendukung usaha gerai, mendapat prioritas jika akan bekerjasama dengan SPPG, dan diberikan

bantuan pembiayaan dengan bunga rendah ke LPDB khusus untuk KDMP Mock Up.

2. Koperasi di Kabupaten Sleman banyak yang memiliki usaha simpan pinjam. Kegiatan usaha ini tidak terlalu terdampak dari ketidakstabilan ekonomi daerah.
3. Peningkatan volume usaha koperasi.

Sedangkan **faktor penghambat** yang mempengaruhi pencapaian **Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB** antara lain:

1. Keterbatasan modal yang dimiliki koperasi menghambat pengembangan usaha koperasi.
2. Kurangnya kemampuan pengurus koperasi/pengelola/anggota dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi.

Langkah kongkrit yang dilakukan Dinas Koperasi UKM sebagai upaya mengatasi kendala yang ada antara lain:

1. Memberikan pelayanan penerbitan rekomendasi koperasi calon penerima dana penguatan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menyelenggarakan bimtek pengembangan usaha koperasi untuk meningkatkan kemampuan SDM koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.
3. Membuka layanan klinik koperasi sebagai layanan konsultasi kesehatan koperasi.

Gambar 3.2 1 Kegiatan Pelatihan Koperasi dan UMKM Tahun 2025 dalam Rangka Mencapai Tujuan 1



Sasaran 3:**“Meningkatnya Kualitas dan kuantitas UMKM”**

Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas UMKM didukung oleh 2 indikator, yaitu Indikator Presentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Indikator Peningkatan Omset Pelaku Usaha Mikro.

Peningkatan jumlah pelaku usaha mikro adalah penambahan pelaku usaha mikro yang terdata di Dinas Koperasi UKM. Indikator Presentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro didapat dari jumlah pelaku usaha mikro tahun n dikurangi jumlah pelaku usaha mikro tahun n-1 dibagi jumlah pelaku usaha mikro tahun n-1 dikalikan seratus.

Peningkatan jumlah omset pelaku usaha mikro adalah penambahan hasil penjualan pelaku usaha mikro. Indikator Presentase peningkatan omset pelaku usaha mikro didapat dari Jumlah omset tahun n dikurangi jumlah omset tahun n-1 dibagi jumlah omset tahun n-1 dikalikan seratus.

Realisasi **Indikator Presentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro (data per Agustus 2025)** sebesar 0,12% dari target sebesar 5%. Capaian kinerja pada tahun 2025 sama dengan tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan perubahan target atas tahun 2025, yaitu dengan **capaian sebesar 2,4%**. Rendahnya capaian kinerja Indikator Presentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro disebabkan karena **pada tahun 2025 sedang dilakukan updating/validasi data dalam sistem Satu Data UMKM.**

Realisasi **Indikator Presentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha Mikro (data per Agustus 2025)** sebesar 0,42% dari target sebesar 5%. Capaian kinerja pada tahun 2025 sama dengan tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah dan capaian kinerja jika dibandingkan dengan perubahan target atas tahun 2025, yaitu dengan **capaian sebesar 849,4%**. Tingginya capaian kinerja Indikator Presentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha Mikro disebabkan **karena rendahnya target yang ditetapkan.** Penetapan target yang **dikarenakan penyusunan target awal dalam Renstra 2021-2025 berdasarkan kondisi ekonomi saat pandemi Covid-19.** Dinas Koperasi UKM tidak

melakukan perubahan target pada tahun 2025 dikarenakan penetapan Indikator Kinerja Utama baru pada Renstra 2025-2029.

Tabel 3.2.1.13. Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Sasaran 3 berdasarkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha mikro	Persentase	5%	5%	0,12%	2,4%	2,4%	5%
Peningkatan omset pelaku usaha mikro	Persentase	0,05%	0,05%	0,42%	849,4%	849,4%	0,05%
Rata-rata capaian kinerja					425,9%		

Tabel 3.2.1.14. Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Sasaran 3 berdasarkan Perubahan Target 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Perubahan Target 2025	Perubahan Target 2025
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha mikro	Persentase	5%	5%	0,12%	2,4%	2,4%	5%
Peningkatan omset pelaku usaha mikro	Persentase	0,05%	0,05%	0,42%	849,4%	849,4%	0,05%
Rata-rata capaian kinerja					425,9%		

Tabel 3.2.1.15. Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3 Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja					Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha mikro	Persentase	646,20%	100%	424,60%	7%	2,4%	5%	5%
Peningkatan omset pelaku usaha mikro	Persentase	2160%	1540%	36860%	1960%	849,4%	0,05%	0,05%

Berdasarkan Tabel 3.2.1.15. menunjukkan bahwa capaian kinerja Indikator Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Indikator Peningkatan Omset Pelaku Usaha Mikro mengalami tren yang serupa, yaitu peningkatan terjadi dan paling tinggi pada tahun 2023 dan mengalami penurunan pada tahun 2024 (data tahun 2025 tidak dapat menjadi acuan karena data per Agustus 2025). Hal ini disebabkan karena adanya perubahan kriteria usaha mikro dalam PP 7 tahun 2021 dan peningkatan jumlah pelaku usaha mikro pasca pandemi COVID-19 yang puncaknya pada tahun 2023. Namun demikian, tidak semua pelaku usaha mampu bertahan dalam 24 bulan sehingga banyak pelaku usaha yang setelah tahun 2023 mengalami kebangkrutan dan tutup usaha.

Adapun **faktor pendukung** yang mempengaruhi pencapaian **Indikator Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Mikro** antara lain:

1. Adanya perubahan kriteria usaha mikro dalam PP 7 tahun 2021 yang menetapkan omset usaha mikro meningkat hingga Rp2 miliar.
2. Adanya peningkatan jumlah pelaku usaha mikro pasca pandemi COVID-19.
3. Dinas Koperasi UKM melakukan inovasi dengan melaksanakan kegiatan *non budgeter* dalam rangka penumbuhan kewirausahaan seperti; Gembira (Gerakan Pemuda Indonesia Berwirausaha) dan Satu Sama Bunda.

Sedangkan **faktor penghambat** yang mempengaruhi pencapaian **Indikator Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Mikro** antara lain:

1. Kemampuan permodalan calon pelaku usaha untuk memulai usahanya.
2. Kurangnya skill masyarakat dalam berwirausaha.

3. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan teknologi pelaku usaha untuk dapat mendaftarkan diri secara mandiri dalam sistem Satu Data UMKM agar tercatat dalam data base Dinas Koperasi UKM.
4. Kurang berminatnya pelaku usaha mendaftarkan diri secara mandiri dalam sistem Satu Data UMKM.

Langkah kongkrit yang dilakukan Dinas Koperasi UKM sebagai upaya mengatasi kendala yang ada antara lain:

1. Menyelenggarakan bimtek kewirausahaan untuk menumbuhkan wirausaha baru.
2. Bekerjama dengan stakeholder terkait, seperti Kalurahan dan akademisi dalam pendataan pelaku usaha baru
3. Pengembangan SIDARTA (Optimalisasi Pendaftaran dan Update Data Masif pada Aplikasi Sistem Satu Data UMKM Kabupaten Sleman Bagi Pelaku Usaha Secara Mandiri Melalui Sosialisasi Berbasis Digital) untuk menyebarluaskan dan memudahkan pelaku usaha mendaftarkan diri dalam sistem Satu Data UMKM secara mandiri.

Adapun **faktor pendukung** yang mempengaruhi pencapaian **Indikator Peningkatan Omset Pelaku Usaha Mikro** antara lain:

1. Kolaborasi dengan akademisi untuk pendampingan UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya oleh akademisi.
2. Penambahan anggaran pelatihan penumbuhan kewirausahaan dari aspirasi DPRD.
3. Penambahan SDM CPNS fungsional kewirausahaan yang dapat menambah kapasitas Dinas dalam melaksanakan berbagai kegiatan, misalnya konsultasi dan pendampingan.

Sedangkan **faktor penghambat** yang mempengaruhi pencapaian **Indikator Rasio Pelaku Usaha Mikro** antara lain:

1. Kondisi ekonomi (misalnya inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lainnya) yang tidak selalu stabil yang berpengaruh pada usaha yang dijalankan usaha mikro.

2. Kemampuan permodalan pelaku usaha yang tidak seluruhnya kuat mengakibatkan adanya pelaku usaha yang tidak dapat bertahan lebih dari 2 tahun.
3. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan teknologi pelaku usaha untuk dapat mendaftarkan diri secara mandiri dalam sistem Satu Data UMKM agar tercatat dalam data base Dinas Koperasi UKM.
4. Kurang berminatnya pelaku usaha mendaftarkan diri secara mandiri dalam sistem Satu Data UMKM.

Langkah kongkrit yang dilakukan Dinas Koperasi UKM sebagai upaya mengatasi kendala yang ada antara lain:

1. Memperluas pangsa pasar UMKM dengan menyediakan media online sebagai wadah promosi produk UMKM
2. Melaksanakan bimtek dengan cara pemaketan sehingga mampu mengefisiensi waktu dan SDM. Dengan begitu jumlah bimtek yang diselenggarakan dapat lebih banyak kuantitasnya namun dengan penyelesaian administrasi yang efisien
3. Pengembangan SIDARTA (Optimalisasi Pendaftaran dan Update Data Masif pada Aplikasi Sistem Satu Data UMKM Kabupaten Sleman Bagi Pelaku Usaha Secara Mandiri Melalui Sosialisasi Berbasis Digital) untuk menyebarluaskan dan memudahkan pelaku usaha mendaftarkan diri dalam sistem Satu Data UMKM secara mandiri.
4. Memberikan pelayanan penerbitan rekomendasi Dana Penguatan Modal kepada pelaku usaha mikro.

Gambar 3.2.1.4. Kegiatan Pelatihan UMKM Tahun 2025 dalam Rangka Mencapai Sasaran III



3.2.2. Periode 2025 - 2029

Tujuan :

“Meningkatkan Kinerja Kelembagaan Ekonomi Lokal”

Tujuan Meningkatkan kinerja kelembagaan ekonomi lokal didukung oleh 2 indikator, yaitu Rasio Kewirausahaan Daerah dan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB. Indikator Rasio Kewirausahaan adalah jumlah pelaku usaha dibantu buruh tetap, dibagi total angkatan kerja dikalikan 100%. Sedangkan Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB adalah volume usaha koperasi (semua koperasi yang berdomisili di Sleman) dibagi PDRB ADHB, dikali 100%.

Realisasi Indikator Rasio Kewirausahaan sebesar 4,77% dari target sebesar 4,74%. Capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100,67% dengan tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah sebesar 89,33%, dan bila dibandingkan dengan Perubahan atas Target tahun 2026 sebesar 97,55%.

Realisasi Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB sebesar

2,62% dari target sebesar 2,38%. Capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 110,08% dengan tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah sebesar 107,82%, dan bila dibandingkan dengan Perubahan atas Target tahun 2026 sebesar 109,62%.

Tabel 3.2.2.1. Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Tujuan berdasarkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Rasio Kewirausahaan Daerah	Persentase	4,74%	4,74%	4,77%	100,67%	89,33%	5,34%
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persentase	2,38%	2,38%	2,62%	110,08%	107,82%	2,43%
Rata-rata capaian kinerja					105,38%		

Tabel 3.2.2.2. Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Tujuan berdasarkan Perubahan Target 2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Perubahan Target 2026	Perubahan Target 2026
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Rasio Kewirausahaan Daerah	Persentase	4,74%	4,74%	4,77%	100,67%	97,55%	4,89%
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persentase	2,38%	2,38%	2,62%	110,08%	109,62%	2,39%
Rata-rata capaian kinerja					105,38%		

Tabel 3.2.2.3. Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Tujuan Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja					Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2026
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
Rasio Kewirausahaan Daerah	Persentase	-	-	-	-	100,67%	5,34%	4,89%
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persentase	-	-	-	-	110,08%	2,43%	2,39%

Berdasarkan Tabel 3.2.2.3. menunjukkan bahwa Indikator Rasio Kewirausahaan Daerah dan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB merupakan indikator baru untuk tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Namun demikian, jika dilihat dari capaian kinerja Indikator Rasio Kewirausahaan dan Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB sebesar masing-masing sebesar 100,67% dan 110,08% menunjukkan bahwa adanya keberhasilan pencapaian kedua Indikator tersebut terhadap target yang telah ditentukan.

Hasil *benchmarking* capaian kinerja Indikator Rasio Kewirausahaan Daerah menunjukkan bahwa Indikator Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Sleman sebesar 4,77%, sedangkan Indikator Rasio Kewirausahaan DIY diperkirakan sebesar 4,8% s/d 5,6% (https://www.google.com/search?q=rasio+kewirausahaan+diy+tahun+2025+provinsi+diy&sca_esv=847abbe1d756c357&ei=34ZtaZGCCOqd4-EPtPi-oAs&oq=rasio+kewirausahaan+tahun+2025+provinsi+diy&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcuAik3Jhc2lvIGtld2lyYXVzYWVhYXV4gdGFodW4gMjAyNSBwcm92aW5zaSBkaXkqAggAMggQIRigARjDBDIIECEYoAEYwwRIulpQxA1YxUJwAngAkAEAmAG3AaABNg-qAQQxNC42uAEBYAEAAEBmAlVoAK5EMICCxAAGIAEGLADGKIEwgIIEAAYsAMY7wXCAgoQIRigARjDBBgKwgIEECEYCpgDAIgGAZAGBZIHBDguMTOgB69lsgcENi4xM7gHpRDCBwYyLTguMTPIB70BgAgA&sclient=gws-wiz-serp).

Adapun **faktor pendukung** yang mempengaruhi pencapaian **Indikator Rasio Kewirausahaan Daerah** antara lain:

1. Adanya pengembangan *web marketplace* Sleman Mart yang dapat digunakan untuk menghubungkan konsumen dengan UMKM secara langsung sehingga mempermudah dalam bertransaksi. Dengan adanya pengembangan ini, konsumen akan “lebih dekat” dengan UMKM dan meningkatkan nilai transaksi penjualan UMKM.
2. Operasionalisasi PLUT KUKM Minggir untuk meningkatkan pelayanan baik dalam konsultasi UMKM maupun berbagai pelatihan yang dibutuhkan.
3. Adanya penambahan klas untuk TA Konsultan PLUT, sehingga tidak hanya melayani konsultasi namun juga secara aktif memberikan pelatihan dalam bentuk klas dan merupakan kegiatan *non budgeter*.
4. Adanya penambahan kuantitas bimtek bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam berwirausaha.
5. Penyusun website Mandala (Manajemen Analisis dan Pengelolaan Dana Penguatan Modal) untuk pelayanan pengajuan rekomendasi dana penguatan modal UMKM melalui *on line*.
6. Penyusunan SK Kepala Dinas Nomor 86 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Rekomendasi Pengajuan Dana Penguatan Modal Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman.
7. Kontribusi pinjaman Dana Penguatan Modal yang lebih rendah daripada kredit KUR sehingga memudahkan pelaku usaha mikro untuk mengakses dana pinjaman untuk penguatan permodalan.
8. Menjalankan berbagai kegiatan dari organisasi Saka Wirausaha.

Sedangkan **faktor penghambat** yang mempengaruhi pencapaian **Indikator Rasio Kewirausahaan Daerah** antara lain:

1. Kondisi ekonomi (misalnya inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lainnya) yang tidak selalu stabil yang berpengaruh pada usaha yang dijalankan usaha mikro.
2. Kemampuan permodalan pelaku usaha yang tidak seluruhnya kuat mengakibatkan adanya pelaku usaha yang tidak dapat bertahan lebih dari 2

(dua) tahun.

3. Kurangnya kemampuan usaha mikro dalam berinovasi, memproduksi produk sesuai tuntutan kebutuhan pasar, pengemasan produk yang menarik, dan akses pengurusan perizinan.
4. Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan yang diperlukan UMKM untuk mendukung peningkatan kemampuan pelaku usaha berwirausaha dan perluasan pangsa pasar.

Langkah kongkrit yang dilakukan Dinas Koperasi UKM sebagai upaya mengatasi kendala yang ada antara lain:

1. Memperluas pangsa pasar UMKM dengan menyediakan media online sebagai wadah promosi produk UMKM.
2. Memberikan pelayanan penerbitan rekomendasi pelaku usaha calon penerima Dana Penguatan Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melaksanakan bimtek dengan cara pemaketan sehingga mampu mengefisiensi waktu dan SDM. Dengan begitu jumlah bimtek yang diselenggarakan dapat lebih banyak kuantitasnya namun dengan penyelesaian administrasi yang efisien.
4. Melaksanakan berbagai kegiatan *non budgeter* baik untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam berwirausaha maupun mempertemukan UMKM dengan konsumen melalui pendanaan yang bersumber dari *sponsorship* dan kerjasama.

Adapun **faktor pendukung** yang mempengaruhi pencapaian **Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB** antara lain:

1. Adanya perubahan definisi operasional dalam menghitung jumlah volume usaha koperasi. Pada tahun sebelumnya, penghitungan volume usaha koperasi hanya dilakukan untuk koperasi kab/kota saja. Sedangkan pada tahun 2025, penghitungan volume usaha koperasi hanya dilakukan untuk seluruh koperasi yang berdomisili di Kabupaten Sleman baik statusnya

sebagai koperasi Kab/Kota, Koperasi Provinsi maupun Koperasi Nasional.

2. Penerbitan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah ditindaklanjuti dengan pendirian 86 KDMP di Kabupaten Sleman. Dari 86 KDMP tersebut, terdapat 3 KDMP (2 diantaranya KDMP Mock Up) yang merupakan pengembangan dari koperasi sebelumnya yang sudah memiliki usaha sehingga dapat dilakukan perhitungan volume usahanya pada tahun 2025. Lebih dari KDMP adalah mendapat dukungan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seperti; hibah untuk mendukung usaha gerai, mendapat prioritas jika akan bekerjasama dengan SPPG, dan diberikan bantuan pembiayaan dengan bunga rendah ke LPDB khusus untuk KDMP Mock Up.
3. Koperasi di Kabupaten Sleman banyak yang memiliki usaha simpan pinjam. Kegiatan usaha ini tidak terlalu terdampak dari ketidakstabilan ekonomi daerah.

Sedangkan **faktor penghambat** yang mempengaruhi pencapaian **Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB** antara lain:

1. Keterbatasan modal yang dimiliki koperasi menghambat pengembangan usaha koperasi.
2. Kurangnya kemampuan pengurus koperasi/pengelola/anggota dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi.

Langkah kongkrit yang dilakukan Dinas Koperasi UKM sebagai upaya mengatasi kendala yang ada antara lain:

1. Memberikan pelayanan penerbitan rekomendasi koperasi calon penerima dana penguatan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menyelenggarakan bimtek pengembangan usaha koperasi untuk meningkatkan kemampuan SDM koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.
3. Membuka layanan “klinik koperasi” sebagai layanan konsultasi terkait kesehatan koperasi.

Gambar 3.2.2.1. Kegiatan Pelatihan Koperasi dan UMKM Tahun 2025 dalam Rangka Mencapai Tujuan 1



Sasaran 1 :

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh 2 Indikator Kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah dan.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah adalah Indeks yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yg dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survey yang sudah ditentukan. Sedangkan Predikat AKIP adalah hasil penilaian Kementerian PAN RB.

Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah sebesar 91,85% untuk IKM standard an 87,47% untuk IKM rapat dari target sebesar 86,26%. Capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 103,94% dengan tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah sebesar 104,13%, dan bila dibandingkan dengan Perubahan atas Target tahun 2025 sebesar 104,24%.

Realisasi Indikator Predikat AKIP sebesar A dari target sebesar A. Capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100,24% dengan tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah sebesar 100,24%, dan bila dibandingkan dengan Perubahan atas Target tahun 2026 sebesar 100,24%.

Tabel 3.2.2.4. Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	86,26%	86,26%	IKM standar : 91,85% IKM rapat : 87,47% Rata-rata : 89,66%	101,38%	104,13%	86,10%
Predikat AKIP	Indeks	A 83,40	A 83,40	A* 83,60	100,24%	100,24%	A
Rata-rata capaian kinerja					100,81%		

*merupakan angka realisasi tahun 2024

Tabel 3.2.2.5. Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Sasaran 1 berdasarkan Perubahan Target 2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Perubahan Target 2026	Perubahan Target 2026
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	86,26%	86,26%	IKM standar : 91,85% IKM rapat : 87,47% Rata-rata : 89,66%	103,94%	104,24%	86,01%
Predikat AKIP		A 83,40	A 83,40	A* 83,60	100,24%	100,24%	A
Rata-rata capaian kinerja					100,81%		

*merupakan angka realisasi tahun 2024

Tabel 3.2.2.6. Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Tujuan 1 Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja					Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2026
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Persentase	106,43	98,31%	99,31%	99,78%	101,38%	86,10%	86,01%
Predikat AKIP	Persentase	100%	100%	100%	100%	100,24%	100,24%	A

Berdasarkan Tabel 3.2.2.6. menunjukkan bahwa rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah Tahun 2021-2025 dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami tren positif. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan nilai secara gradual yang menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan.

Selain itu, jika dilihat dari capaian kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah dan Predikat AKIP sebesar masing-masing sebesar 101,38% dan 100,24% menunjukkan bahwa adanya keberhasilan pencapaian kedua Indikator tersebut terhadap target yang telah ditentukan.

Hasil *benchmarking* capaian kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah menunjukkan bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman sebesar 89,66%, sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada akhir tahun 2025 Kabupaten Gunung Kidul sebesar 90,02% (https://www.google.com/search?q=predikat+apip+tahun+2025+kabupaten+gunungkidul&sca_esv=847abbe1d756c357&ei=ZohtacS7BeSy4-EPp92bwQl&oq=predikat+apip+tahun+2025+kabupaten+gunu&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcuAkJ3ByZWRpa2F0IGFwaXAqdGFodW4gMjAyNSBrYWJ1cGF0ZW4gZ3VudSoCCAAyBxAhGKABGAoyBxAhGKABGAoyBxAhGKABGApluBhQ1QNYywxwAXgAkAEAmAGrAaAB2QOqAQMyLjK4AQHIAQD4AQGYAgWgArYEwgIIEAAYsAMY7wXCAgsQABiABBiwAxiiBJgDAIlgGAZAGBZIHazEuNKAHpxayBwMwLjS4B64EwgcfMI0xLjTIBzOACAA&sclient=gws-wiz-serp).

Adapun **faktor pendukung** yang mempengaruhi pencapaian **Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah** antara lain:

1. Efisiensi anggaran dari kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan direvisi agar dapat dimanfaatkan untuk pembelian barang modal yang dapat melengkapi fasilitas ruang rapat, misalnya *smart* TV untuk mendukung fasilitas paparan materi rapat.
2. Pemahaman yang meningkat dari peserta kegiatan setelah dilakukan sosialisasi dan edukasi dalam pengisian kuesioner yang membutuhkan kemampuan teknologi (*barcode*).
3. Adanya peningkatan kuantitas bimtek salah satunya dari aspirasi DPRD yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UKM sehingga meningkatkan potensi jumlah peserta dalam pengisian kuesioner.

Sedangkan **faktor penghambat** yang mempengaruhi pencapaian **Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah** antara lain:

1. Dinas Koperasi UKM memiliki gedung kantor yang kurang representatif baik dari segi lokasi maupun ukuran gedung.
2. Terbatasnya anggaran bimtek yang berpengaruh pada tempat penyelenggaraan pelatihan.
3. Keterbatasan anggaran (selain Pokir, PUPM, dan aspirasi) dalam untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang peserta kegiatan tersebut merupakan sasaran dalam pengisian kuesioner.

Langkah kongkrit yang dilakukan Dinas Koperasi UKM sebagai upaya mengatasi kendala yang ada antara lain:

1. Dinas Koperasi UKM melakukan perubahan layout kantor sehingga sarana rapat lebih memadai.
2. Menjalinkan kerjasama dengan penyedia jasa akomodasi sehingga bisa mendapatkan harga sewa tempat sesuai anggaran Dinas yang tersedia.
3. Menjalinkan kerjasama dan/atau sponsorship dengan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan sehingga dapat menambah sasaran pengisian kuesioner.

Adapun **faktor pendukung** yang mempengaruhi pencapaian **Predikat AKIP** antara lain:

1. Terintegrasinya sistem perencanaan, keuangan, monitoring evaluasi, dan pelaksanaan kinerja.
2. Penentuan Indikator kinerja terukur, dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung visi misi Kabupaten Sleman
3. Penerapan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan.
4. Adanya komitmen pimpinan terkait penerapan budaya satriya ke dalam budaya kerja.
5. Penerapan manajemen resiko dan mitigasi resiko pada kegiatan yang berpotensi memiliki resiko tinggi yang nantinya dapat menimbulkan dampak negatif bagi organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
6. Penetapan SOP dan menjabarkan proses bisnis pada setiap kegiatan.
7. Penyusunan regulasi Kepala Dinas bagi kegiatan tertentu yang memiliki resiko tinggi, yaitu penetapan SK Kepala Dinas Nomor 86 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Rekomendasi Pengajuan Dana Penguatan Modal Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman.
8. Melakukan evaluasi dan penyesuaian sub kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja.

Sedangkan **faktor penghambat** yang mempengaruhi pencapaian Indikator **Predikat AKIP** antara lain:

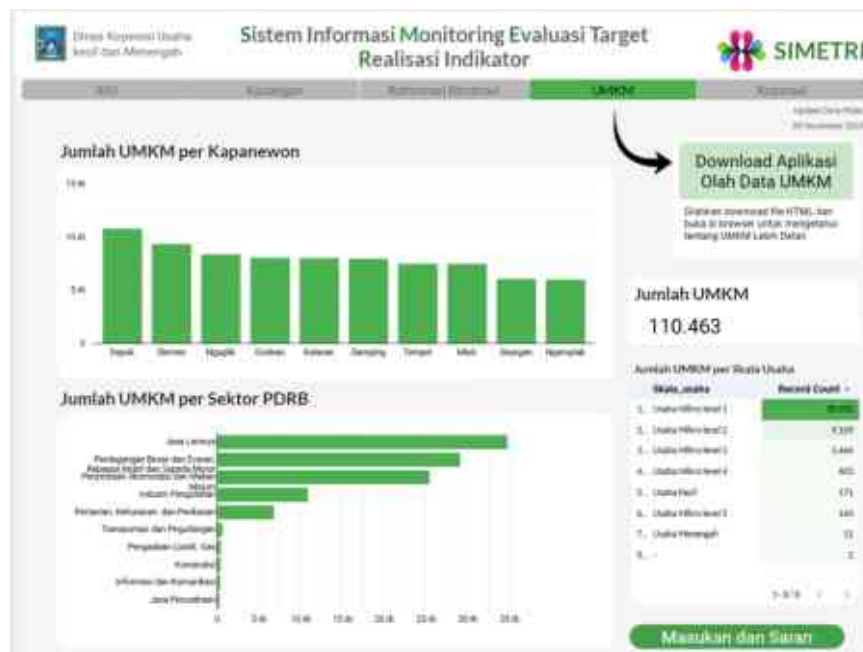
1. Ketersediaan data yang tidak valid dan terkini.
2. Banyaknya data yang diperlukan untuk melakukan monev sekaligus menentukan target dalam perencanaan.
3. Adanya temuan dan rekomendasi dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas yaitu peningkatan target Indikator Kinerja Utama (IKU).

Langkah kongkrit yang dilakukan Dinas Koperasi UKM sebagai upaya mengatasi kendala yang ada antara lain:

1. Penyusunan sistem Satu Data UMKM untuk pendataan pelaku usaha UMKM.

2. Penyusunan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Target Realisasi Indikator (SIMETRI).
3. Melakukan evaluasi atas IKU renstra tahun sebelumnya dan melakukan perubahan IKU baik indikator dan/atau definisi operasionalnya yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Gambar 3.2.2.2. Kegiatan Penyusunan Sistem data terpadu mendukung Sasaran 1



Sasaran 2:

“Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh 1 Indikator Kinerja, yaitu Indikator Rasio Pelaku Usaha Mikro.

Indikator Rasio Pelaku Usaha Mikro adalah jumlah pelaku usaha mikro dibagi jumlah penduduk usia produktif dikalikan 100%. Realisasi Indikator Rasio Pelaku Usaha Mikro sebesar 15,21% dari target sebesar 14,10%. Capaian kinerja pada

tahun 2025 sebesar 107,90% dengan tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah sebesar 101,4%, dan bila dibandingkan dengan Perubahan atas Target tahun 2025 sebesar 106,36%.

Tabel 3.2.2 7 Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Sasaran 1 berdasarkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Rasio pelaku usaha mikro	Persentase	14,10 %	14,10%	15,21%	107,90%	101,4%	15,00%

Tabel 3.2.2.8. Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Sasaran 1 berdasarkan Perubahan Target 2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Perubahan Target 2026	Perubahan Target 2026
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Rasio pelaku usaha mikro	Persentase	14,10%	14,10%	15,21%	107,90%	106,36%	14,30%

Tabel 3.2.2.9. Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1 Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja					Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2026
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
Rasio pelaku usaha mikro	Persentase	103,36 %	108,64%	122,69%	99,93%	107,90%	15,00%	14,30%

Berdasarkan Tabel 3.2.2 9 menunjukkan bahwa rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Rasio Pelaku Usaha Mikro Tahun 2021-2025 mengalami penurunan pada tahun 2024 namun capaian indikator kinerja kembali mengalami kenaikan pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen untuk terus melakukan evaluasi, mitigasi langkah-langkah pencapaian target kinerja dan perbaikan kinerja pada

tahun 2025.

Selain itu, jika dilihat dari capaian kinerja Indikator Rasio Pelaku Usaha Mikro sebesar 107,90% menunjukkan bahwa adanya keberhasilan pencapaian kedua Indikator tersebut terhadap target yang telah ditentukan.

Hasil *benchmarking* capaian kinerja Indikator Rasio Pelaku Usaha Mikro menunjukkan bahwa capaian Indikator Rasio Pelaku Usaha Mikro Kabupaten Sleman sebesar 15,21%, sedangkan Indikator Rasio Pelaku Usaha Mikro DIY sebesar 98,36% bersal dari data UMKM se DIY (https://www.google.com/search?q=rasio+jumlah+pelaku+usaha+mikro+diy+tahun+2025+provinsi+diy&sca_esv=847abbe1d756c357&ei=IlltabWbBfuP4-EPoffr6Aw&ved=0ahUKEwi1tZ EupaSAxX7xzgGHh7Gs0Q4dUDCB&uact=5&oq=rasio+jumlah+pelaku+usaha+mikro+diy+tahun+2025+provinsi+diy&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcniAiO3Jhc2lvIGp1bWxhaCBwZWxha3UgdXNhaGEgbWlrcm8gZGI5IHRhaHVuIDlwMjUgcHJvdmluc2kgZGI5MgUQABjvBTIFEAAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAAY7wVlyBIQgg1YkhRwAXgAkAEAmAF-oAH5BAoBAzluNbgBA8gBAPgBAZgCBqAC-ATCAggQABiwAxjvBcICCAAGIAEGLADGKIEwglIEAAYgAQYogSYAwCIBgQBgWSBwMxLjWgB4QrsgcDMC41uAfvBMIHBTItMS41yAdMgAgA&scient=gws-wiz-serp).

Adapun **faktor pendukung** yang mempengaruhi pencapaian **Indikator Rasio Pelaku Usaha Mikro** antara lain:

1. Operasionalisasi gedung PLUT KUKM Minggir yang dimanfaatkan untuk pelayanan konsultasi, pelatihan usaha, dan ruang pameran produk UMKM.
2. Dinas Koperasi UKM melakukan inovasi dengan melaksanakan kegiatan *non budgeter* dalam rangka penumbuhan kewirausahaan seperti; Gembira (Gerakan Pemuda Indonesia Berwirausaha) dan Satu Sama Bunda.
3. Kolaborasi dengan akademisi untuk pendampingan UMKM oleh akademisi.
4. Penambahan anggaran pelatihan penumbuhan kewirausahaan dari aspirasi DPRD.
5. Penambahan SDM CPNS fungsional kewirausahaan yang dapat menambah kapasitas Dinas dalam melaksanakan berbagai kegiatan.

Sedangkan **faktor penghambat** yang mempengaruhi pencapaian **Indikator Rasio Pelaku Usaha Mikro** antara lain:

1. Kondisi ekonomi (misalnya inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lainnya) yang tidak selalu stabil yang berpengaruh pada usaha yang dijalankan usaha mikro.
2. Kemampuan permodalan pelaku usaha yang tidak seluruhnya kuat mengakibatkan adanya pelaku usaha yang tidak dapat bertahan lebih dari 2 tahun.
3. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan teknologi pelaku usaha untuk dapat mendaftarkan diri secara mandiri dalam sistem Satu Data UMKM agar tercatat dalam data base Dinas Koperasi UKM.
4. Kurang berminatnya pelaku usaha mendaftarkan diri secara mandiri dalam sistem Satu Data UMKM.

Langkah kongkrit yang dilakukan Dinas Koperasi UKM sebagai upaya mengatasi kendala yang ada antara lain:

1. Memperluas pangsa pasar UMKM dengan menyediakan media online sebagai wadah promosi produk UMKM
2. Melaksanakan bimtek dengan cara pemaketan sehingga mampu mengefisiensi waktu dan SDM. Dengan begitu jumlah bimtek yang diselenggarakan dapat lebih banyak kuantitasnya namun dengan penyelesaian administrasi yang efisien
3. Pengembangan SIDARTA (Optimalisasi Pendaftaran dan Update Data Masif pada Aplikasi Sistem Satu Data UMKM Kabupaten Sleman Bagi Pelaku Usaha Secara Mandiri Melalui Sosialisasi Berbasis Digital) untuk menyebarluaskan dan memudahkan pelaku usaha mendaftarkan diri dalam sistem Satu Data UMKM secara mandiri.

Gambar 3.2.2.3. Kegiatan Pelatihan UMKM Tahun 2025 dalam Rangka Mencapai Sasaran II



Sasaran 3:

“Berkembangnya Usaha Koperasi”

Sasaran Berkembangnya Usaha Koperasi didukung oleh 1 Indikator Kinerja, yaitu Indikator Rasio Keanggotaan Koperasi. Indikator Rasio Keanggotaan Koperasi adalah jumlah anggota koperasi dibagi jumlah penduduk usia produktif dikalikan 100%. Realisasi Indikator Rasio Keanggotaan Koperasi sebesar 23,57% dari target sebesar 22,50%. Capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 104,76% dengan tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah sebesar 104,29%, dan bila dibandingkan dengan Perubahan atas Target tahun 2025 sebesar 104,76%.

Tabel 3.2.2.10. Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Sasaran 3 berdasarkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Rasio keanggotaan koperasi	Persentase	22,50 %	22,50%	23,57%	104,76%	104,29%	22,6%

Tabel 3.2.2.11. Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Sasaran 3 berdasarkan Perubahan Target 2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Perubahan Target 2026	Perubahan Target 2026
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Rasio keanggotaan koperasi	Persentase	22,50%	22,50%	23,57%	104,76%	104,76%	22,50%

Tabel 3.2.2.12. Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3 Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja					Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2026
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
Rasio keanggotaan koperasi	Persentase	29,29%	100%	2046,36 %	94,49%	104,70%	22,6%	22,5%

Berdasarkan Tabel 3.2.2 11 menunjukkan bahwa rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Rasio Keanggotaan Koperasi Tahun 2021-2025 mengalami penurunan pada tahun 2024 namun capaian indikator kinerja kembali mengalami kenaikan pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen untuk terus melakukan evaluasi, mitigasi langkah-langkah pencapaian target kinerja dan perbaikan kinerja pada tahun 2025.

Selain itu, jika dilihat dari capaian kinerja Indikator Rasio Keanggotaan Koperasi sebesar 107,90% menunjukkan bahwa adanya keberhasilan pencapaian

kedua Indikator tersebut terhadap target yang telah ditentukan.

Adapun **faktor pendukung** yang mempengaruhi pencapaian **Indikator Rasio Keanggotaan Koperasi** antara lain:

1. Masing-masing koperasi memiliki rencana kerja dan target kenaikan jumlah anggota minimal 12 orang setiap tahunnya.
2. Masing-masing koperasi aktif mensosialisasikan koperasi kepada masyarakat setempat untuk bergabung menjadi anggota koperasi.
3. Peningkatan koperasi baru pada tahun 2024 sebanyak 9 koperasi yang berdampak pada peningkatan jumlah anggota koperasi yang tercatat pada tahun 2025.

Sedangkan **faktor penghambat** yang mempengaruhi pencapaian **Indikator Rasio Keanggotaan Koperasi** antara lain:

1. Adanya perubahan anggaran dasar koperasi dari koperasi primer kab/kota menjadi koperasi primer provinsi atau koperasi primer nasional yang mengakibatkan jumlah anggota koperasi primer kab/kota berpotensi mengalami penurunan.
2. Adanya isu negatif “investasi bodong” yang menyebar di masyarakat sehingga meningkatkan kecurigaan masyarakat terhadap kegiatan usaha koperasi.
3. Adanya koperasi yang tidak aktif. Koperasi yang tidak aktif ini ditindaklanjuti dengan rekomendasi pembubaran koperasi. Apabila koperasi dibubarkan maka akan berdampak pada jumlah anggota koperasi di Kabupaten Sleman.
4. Kompetensi sumber daya manusia Dinas Koperasi UKM yang masih perlu ditingkatkan agar dapat melakukan pembinaan terhadap koperasi dengan lebih baik sehingga koperasi di Kabupaten Sleman dapat menjalankan usahanya dan masuk dalam kategori “sehat”

Langkah kongkrit yang dilakukan Dinas Koperasi UKM sebagai upaya mengatasi kendala yang ada antara lain:

1. Memberikan pelatihan kompetensi kepada pengurus koperasi dan memfasilitasi penerbitan sertifikat kompetensinya dari BNSP untuk

meningkatkan kemampuan pengurus koperasi menjalankan kegiatan usahanya dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi di Kabupaten Sleman.

2. Melaksanakan berbagai kegiatan untuk yang bersifat persuasif untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat bergabung dengan koperasi, misalnya sosialisasi dan magang internship.
3. Mengadakan pelatihan dan uji kompetensi bagi SDM Dinas Koperasi UKM dengan jabatan pengawas koperasi.

Gambar 3.2.2.4. Kegiatan Tahun 2025 dalam Rangka Mencapai Sasaran 3



3.3 Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

3.3.1. Analisis Efisiensi Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2025

Realisasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Program yang mendukung pencapaian Tujuan dan/atau Sasaran dalam IKU dan PK sebagai berikut :

Tabel 3.3.1.1. Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Tahun 2025			
						Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	103,92%	6.891.733.617,00	6.582.872.142,06	95,52%
		1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100,00%	6.891.733.617,00	6.582.872.142,06	95,52%
2.	Berkembangnya UMKM dan Koperasi			Rasio Keanggotaan Koperasi	1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	104,63%	412.722.200,00	393.133.322,48	95,25%
					2. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	104,63%	844.138.850,00	785.341.172,30	90,03%
				Rasio Pelaku Usaha Mikro	1. Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan usaha Menengah (UMKM)	101,10%*	4.171.781.803,00	4.148.960.129,04	99,45%
		2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi	Jumlah Koperasi Baru	1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	1.860%*	412.722.200,00	393.133.322,48	95,25%
					2. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	1.860%*	844.138.850,00	785.341.172,30	90,03%
				Persentase peningkatan asset koperasi	1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	267,52%	28.871.250,00	28.497.072,00	98,70%

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Tahun 2025			
						Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
					2. Program Penilaian Kesehatan Koperasi		144.093.000,00	138.433.359,00	96,07%
					3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		211.632.875,00	206.549.706,00	97,60%
		3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas UMKM	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha mikro	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	2,4%*	4.171.781.803,00	4.148.960.129,04	99,45%
				Peningkatan omset pelaku usaha mikro	1. Program Pengembangan UMKM	849,4%*	3.074.211.325,00	2.967.214.150,58	96,52%

*) data per Agustus 2025

Analisis efisiensi anggaran setiap Program sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah

Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah didukung oleh 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang mendukung Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar Rp6.582.872.142,06 dari anggaran sebesar Rp6.891.733.617,00 atau setara dengan 95,25% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar

95,25% dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tujuan sebesar 103,92% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut yang bersumber dari biaya jamuan tamu Bupati yang sebelumnya dianggarkan untuk **kunjungan dari Kementrian Koperasi ke KDMP di Sleman yang tidak jadi dilaksanakan oleh Kementrian**.

2. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah didukung oleh 1 indikator kinerja yaitu Indeks Predikat AKIP. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang mendukung Indikator Kinerja Indeks Predikat AKIP sebesar Rp6.582.872.142,06 dari anggaran sebesar Rp6.891.733.617,00 atau setara dengan 95,25% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 95,25% dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tujuan sebesar 100% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut yang bersumber dari biaya jamuan tamu Bupati yang sebelumnya dianggarkan untuk **kunjungan dari Kementrian Koperasi ke KDMP di Sleman yang tidak jadi dilaksanakan oleh Kementrian**.

3. Tujuan Berkembangnya UMKM dan Koperasi

Tujuan Berkembangnya UMKM dan Koperasi didukung oleh 2 indikator kinerja yaitu Rasio Keanggotaan Koperasi dan Rasio Pelaku Usaha Mikro. Capaian Kinerja Rasio Keanggotaan Koperasi didukung oleh 2 program yaitu Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program

Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam yang mendukung Indikator Kinerja Rasio Keanggotaan Koperasi sebesar Rp393.133.322,48 dari anggaran sebesar Rp412.722.200,00 atau setara dengan 95,25% dari total anggaran. Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang mendukung Indikator Kinerja Rasio Keanggotaan Koperasi sebesar Rp785.341.172,30 dari anggaran sebesar Rp844.138.850,00 atau setara dengan 90,03% dari total anggaran.

Realisasi keuangan sebesar 95,25% dan 90,03% dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tujuan sebesar 104,63% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut yang bersumber dari alat bahan kantor untuk pelatihan yang **mendapat harga di bawah SHBJ dan efisiensi pada fotocopy.**

Capaian Kinerja Rasio Pelaku Usaha Mikro didukung oleh 1 program yaitu Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan usaha Menengah (UMKM).

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan usaha Menengah (UMKM) yang mendukung Indikator Kinerja Rasio Kewirausahaan Daerah sebesar Rp4.148.960.129,04 dari anggaran sebesar Rp4.171.781.803,00 atau setara dengan 99,45% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 99,45% dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tujuan sebesar 104,76% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut yang bersumber dari **efisiensi biaya makan minum rapat.**

4. Sasaran Meningkatnya Kualitas Koperasi

Sasaran Meningkatnya Kualitas Koperasi didukung oleh 2 indikator kinerja yaitu Jumlah Koperasi Baru dan Persentase peningkatan asset koperasi. Capaian Kinerja Jumlah Koperasi Baru didukung oleh 2 program yaitu Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam yang mendukung Indikator Kinerja Rasio Keanggotaan Koperasi sebesar Rp393.133.322,48 dari anggaran sebesar Rp412.722.200,00 atau setara dengan 95,25% dari total anggaran. Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang mendukung Indikator Kinerja Rasio Keanggotaan Koperasi sebesar Rp785.341.172,30 dari anggaran sebesar Rp844.138.850,00 atau setara dengan 90,03% dari total anggaran.

Realisasi keuangan sebesar 95,25% dan 90,03% dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tujuan sebesar 1.860% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut yang bersumber dari alat bahan kantor untuk pelatihan yang **mendapat harga di bawah SHBJ dan efisiensi pada fotocopy**. Sedangkan untuk **capaian kinerja yang tinggi didukung dengan adanya kebijakan pembentukan KDMP**.

Capaian Kinerja Presentase Peningkatan Aset Koperasi didukung oleh 3 program yaitu Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam yang mendukung Indikator Kinerja Rasio Keanggotaan Koperasi sebesar Rp393.133.322,48 dari anggaran sebesar Rp412.722.200,00 atau setara dengan 95,25% dari total anggaran. Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang mendukung Indikator Kinerja Rasio Keanggotaan Koperasi sebesar Rp785.341.172,30 dari anggaran sebesar Rp844.138.850,00 atau setara dengan 90,03% dari total anggaran. Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebesar Rp206.549.706,00 dari anggaran sebesar Rp211.632.875,00 atau setara dengan 97,60% dari total anggaran.

Realisasi keuangan sebesar 95,25%, 90,03%, dan 97,60% dibandingkan

dengan persentase capaian kinerja tujuan sebesar 267,52% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut yang bersumber dari alat bahan kantor untuk pelatihan yang **mendapat harga di bawah SHBJ dan efisiensi pada fotocopy.**

5. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas UMKM

Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas UMKM didukung oleh 2 indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Peningkatan Omset Pelaku Usaha Mikro. Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Mikro didukung oleh 1 program yaitu Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan usaha Menengah (UMKM).

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan usaha Menengah (UMKM) yang mendukung Indikator Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Mikro sebesar Rp4.148.960.129,04 dari anggaran sebesar Rp4.171.781.803,00 atau setara dengan 99,45% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 99,45% dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tujuan sebesar 2,4% menunjukkan **adanya inefisiensi penggunaan sumber daya** untuk mencapai tujuan. Hal tersebut dikarenakan **sedang dilakukan updating data UMKM dalam Satu Data UMKM.**

Capaian Kinerja Peningkatan Omset Pelaku Usaha Mikro didukung oleh 1 program yaitu Program Pengembangan UMKM.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pengembangan UMKM yang mendukung Indikator Kinerja Rasio Kewirausahaan Daerah sebesar Rp2.967.214.150,58 dari anggaran sebesar Rp3.074.211.325,00 atau setara dengan 96,52% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 96,52% dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tujuan sebesar 849,4% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut yang bersumber dari **siswa lelang pembangunan PLUT sebesar Rp93.293.857,00 dan SPPD sebesar Rp9.000.000,00.**

3.3.2. Periode 2025 - 2029

Realisasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Program yang mendukung pencapaian Tujuan dan/atau Sasaran dalam IKU dan PK sebagai berikut:

Tabel 3.3.2.1. Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Tahun 2025			
						Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
1.	Meningkatkan Kinerja Kelembagaan Ekonomi Lokal			1. Rasio Kewirausahaan Daerah	1. Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan usaha Menengah (UMKM)	100,67%	4.171.781.803,00	4.148.960.129,04	99,45%
					2. Program Pengembangan UMKM	100,67%	3.074.211.325,00	2.967.214.150,58	96,52
				2. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	110,08%	211.632.875,00	206.549.706,00	97,60%
						2. Program pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	110,08%	28.871.250,00	28.497.072,00
			3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	110,08%		144.093.000,00	138.433.359,00	96,07%	

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Tahun 2025			
						Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
		1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100,24%	6.891.733.617,00	6.582.872.142,06	95,52%
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	103,94%	6.891.733.617,00	6.582.872.142,06	95,52%
		2.	Berkembangnya usaha koperasi	Rasio Keanggotaan Koperasi	1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	104,76%	412.722.200,00	393.133.322,48	95,25%
					2. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	104,76%	844.138.850,00	785.341.172,30	90,03%
		3.	Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah	Rasio Pelaku Usaha Mikro	1. Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan usaha Menengah (UMKM)	107,90%	4.171.781.803,00	4.148.960.129,04	99,45%

Analisis efisiensi anggaran setiap Program sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatkan kinerja kelembagaan ekonomi lokal

Tujuan Meningkatkan kinerja kelembagaan ekonomi lokal didukung 2 indikator kinerja, yaitu Rasio Kewirausahaan Daerah dan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB.

Capaian kinerja Rasio Kewirausahaan Daerah didukung 2 program, yaitu Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan usaha Menengah (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan usaha Menengah (UMKM) yang mendukung Indikator Kinerja Rasio Kewirausahaan Daerah sebesar

Rp4.148.960.129,04 dari anggaran sebesar Rp4.171.781.803,00 atau setara dengan 99,45% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 99,45% dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tujuan sebesar 100,67% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut yang bersumber dari **efisiensi biaya makan minum rapat**.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pengembangan UMKM yang mendukung Indikator Kinerja Rasio Kewirausahaan Daerah sebesar Rp2.967.214.150,58 dari anggaran sebesar Rp3.074.211.325,00 atau setara dengan 96,52% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 96,52% dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tujuan sebesar 100,67% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut yang bersumber dari **sisal lelang pembangunan PLUT sebesar Rp93.293.857,00 dan SPPD sebesar Rp9.000.000,00**.

Capaian kinerja Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB didukung 3 program, yaitu Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dan Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebesar Rp206.549.706,00 dari anggaran sebesar Rp211.632.875,00 atau setara dengan 97,60% dari total anggaran.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebesar Rp28.497.072,00 dari anggaran sebesar Rp28.871.250,00 atau setara dengan 98,70% dari total anggaran.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sebesar Rp138.433.359,00 dari anggaran sebesar Rp144.093.000,00 atau setara dengan 96,07% dari

total anggaran.

Realisasi keuangan sebesar 99,45%, 98,70% dan 96,07% dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tujuan sebesar 110,08% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut yang bersumber dari **efisiensi biaya SPPD luar daerah**.

2. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah didukung 2 indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah dan Nilai AKIP. Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah dan Nilai AKIP didukung 1 program, yaitu Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang mendukung Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah dan Nilai AKIP sebesar Rp6.582.872.142,06 dari anggaran sebesar Rp6.891.733.617,00 atau setara dengan 95,52% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 95,52% dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sasaran sebesar 103,94% dan 100% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut yang bersumber dari biaya jamuan tamu Bupati yang sebelumnya dianggarkan untuk **kunjungan dari Kementerian Koperasi ke KDMP di Sleman yang tidak jadi dilaksanakan oleh Kementerian**.

3. Sasaran Berkembangnya usaha koperasi

Sasaran Berkembangnya usaha koperasi didukung 1 indikator kinerja, yaitu Rasio Keanggotaan Koperasi. Capaian kinerja Rasio Keanggotaan Koperasi didukung 2 program, yaitu Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam yang mendukung Indikator Kinerja

Rasio Keanggotaan Koperasi sebesar Rp393.133.322,48 dari anggaran sebesar Rp412.722.200,00 atau setara dengan 95,25% dari total anggaran. Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang mendukung Indikator Kinerja Rasio Keanggotaan Koperasi sebesar Rp785.341.172,30 dari anggaran sebesar Rp844.138.850,00 atau setara dengan 90,03% dari total anggaran.

Realisasi keuangan sebesar 95,25% dan 90,03% dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tujuan sebesar 104,76% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut yang bersumber dari alat bahan kantor untuk pelatihan yang **mendapat harga di bawah SHBJ dan efisiensi pada fotocopy.**

4. Sasaran Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah

Sasaran Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah didukung 1 indikator kinerja, yaitu Rasio Pelaku Usaha Mikro. Capaian kinerja Rasio Pelaku Usaha Mikro didukung 1 program, yaitu Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan usaha Menengah (UMKM).

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan usaha Menengah (UMKM) yang mendukung Indikator Kinerja Rasio Kewirausahaan Daerah sebesar Rp4.148.960.129,04 dari anggaran sebesar Rp4.171.781.803,00 atau setara dengan 99,45% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 99,45% dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tujuan sebesar 107,90% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut yang bersumber dari **efisiensi biaya makan minum rapat.**

3.4 Analisis Program/Kegiatan

3.4.1 Periode 2021-2026

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian seluruh sasaran strategis sebanyak 8 program, 13 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan keseluruhan anggaran sebesar Rp15.779.184.920,00. Adapun Realisasi keuangan sebesar Rp15.251.001.053,46 atau sebesar 96,65%. **Capaian realisasi keuangan tahun 2025 meningkat 5,85% dari tahun 2024** dengan realisasi keuangan 90,80%. Capain kinerja keuangan tahun anggaran 2025 sebesar 96,65% juga **menempati rangking pertama** dalam kinerja keuangan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman.

Tabel 3.4.1.1. Realisasi Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				
2	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1 Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD				
1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD				
1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	18	18	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1 Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	32	32	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD				
1 Laporan koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Laporan	16	16	100,00%
2 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	16	16	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1 Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00%
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
1 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	%	100,00	100,00	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
1 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu				
1 Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	11	11	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	5	100,00%

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
1 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	3	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat				
1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor				
1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	%	100,00	100,00	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan				
1 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel				
1 Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	5	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14	14	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100,00%
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				
1 Persentase KSP/USP Koperasi yang memiliki Izin		34,01	35,64	104,8%
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota				
1 Persentase KSP/USP Koperasi yang memiliki Izin	%	34,01	35,64	104,8%
Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi				

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1 Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi	91	93	102,2%
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
1 Persentase koperasi yang aktif	%	78,40	87,8	112,0%
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1 Persentase koperasi aktif	%	78,40	87,8	112,0%
Sub Kegiatan Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota				
1 Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	5	16	320,0%
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				
1 Persentase KSP/USP Koperasi sehat	%	35,22	30	85,2%
Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota				
1 Persentase KSP/USP Koperasi sehat	%	28,10	30,00	106,8%
Sub Kegiatan Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota				
1 Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	125	110	88,0%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
1 Persentase Pengelola koperasi yang bersertifikasi	%	37,27	40,58	108,9%
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota				
1 Persentase Pengelola koperasi yang bersertifikasi	%	37,27	40,58	108,9%
Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi				
1 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang	460	851	185,0%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
1 Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%	13,73	13,87	101,0%
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota				
1 Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%	13,73	13,87	101,0%
Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan				

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Kabupaten/Kota				
1 Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koperasi	12	5	41,7%
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
1 Jumlah Pelaku Usaha Mikro Baru yang Berizin	Pelaku Usaha	740	1212	163,8%
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan				
1 Jumlah Pelaku Usaha Mikro Baru yang Berizin	Pelaku Usaha	740	1.212	163,8%
Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				
1 Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	500	714	142,8%
Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui kemitraan Usaha Mikro				
1 Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	10	35	350,0%
Sub Kegiatan Fasilitas kemudahan Perizinan Usaha Mikro				
1 Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	150	200	133,3%
Sub Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				
1 Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	orang	300	450	150,0%
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
1 Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	UMKM	20	70	350,0%
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil				
1 Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	UKM	15	70	466,7%
Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				
1 Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	20	108	540,0%

Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan anggaran Rp6.891.733.617,00 dengan realisasi

keuangan Rp6.582.872.142,06 sehingga tingkat **capaian kinerja keuangan sebesar 95,52%**. Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu:

- a. persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dengan target 100,00% terealisasi 100,00% sehingga **capaian kinerja 100,00%**.
- b. persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja dengan target 100,00% terealisasi 100,00% sehingga **capaian kinerja 100,00%**.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah
Keluaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah adalah persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu dengan target persentase sebesar 100,00% dan terealisasi 100,00% sehingga **capaian kinerja 100,00%**.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi didukung dengan 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah memiliki target keluaran (output) sub kegiatan jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebesar 5 dokumen dengan anggaran sebanyak Rp6.561.350,00. Realisasi keluaran (output) sub kegiatan sebesar 5 dokumen sehingga capaian kinerja 100,00% dan realisasi sebesar Rp6.449.134,00 sehingga **capaian kinerja keuangan sebesar 98,29%**.

- b) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Alokasi anggaran pelaksanaan sub kegiatan sebesar Rp1.792.500,00 dengan realisasi keuangan sebesar

Rp1.768.782,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 98,68%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen atau **capaian kinerja sebesar 100,00%.**

c) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Alokasi anggaran pelaksanaan sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA sebesar Rp1.594.500,00 dengan realisasi sebesar Rp1.542.929,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 96,77%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen atau **capaian kinerja sebesar 100%.**

d) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah menggunakan anggaran Rp4.357.500,00 dengan realisasi sebesar Rp4.327.802,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 99,32%. Keluaran (output) sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 18 dokumen terealisasi 14 laporan **capaian kinerja sebesar 100,00%.**

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah adalah persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu dengan target 100,00% terealisasi 100,00% sehingga **capaian kinerja 100,00%.**

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah terdiri dari 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN didukung dengan anggaran sebesar Rp4.731.633.067,00 dengan realisasi

sebesar Rp4.596.196.749,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 97,14%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target 30 orang **terrealisasi 100,00%** yaitu 30 orang.

b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp175.352.875,00 terrealisasi sebesar Rp166.276.347,70 (94,82%). Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan target 12 dokumen terrealisasi 12 dokumen sehingga **capaian kinerja 100,00%**.

c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp4.531.500,00 dengan realisasi 99,54% yaitu sebesar Rp4.510.511,00. Keluaran (output) sub kegiatan adalah:

- laporan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dengan target 4 laporan terrealisasi 4 laporan sehingga **capaian kinerja 100,00%**.
- Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD target 4 laporan terrealisasi 4 laporan sehingga **capaian kinerja 100,00%**.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dengan target 100,00% **terrealisasi 100,00%**.

Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah terdiri dari sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

dengan anggaran sebesar Rp68.686.150,00 dan terealisasi sebesar Rp53.075.228,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 77,27%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen (100,00%).

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah adalah persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dengan target sebesar 100,00% **teralisasi 100,00%.**

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah didukung dengan 8 sub kegiatan sebagai berikut:

a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor didukung dengan anggaran sebesar Rp15.958.700,00 terealisasi sebesar Rp14.299.394,00 (89,60%). Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target 2 paket terealisasi 2 paket **capaian kinerja sebesar 100,00%.**

b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Alokasi anggaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp59.031.850,00 terealisasi sebesar Rp58.346.400,00 atau tercapai sebanyak 98,84%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan dengan target 1 paket **teralisasi 100,00%.**

c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp99.576.700,00 terealisasi sebesar Rp90.430.597,00 atau tercapai sebesar 90,82%. Keluaran (output) sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor adalah jumlah

paket bahan logistik kantor yang disediakan dengan target 2 paket terealisasi 2 paket atau **tercapai 100,00%**.

d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Alokasi anggaran pelaksanaan sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp12.022.700,00 terealisasi sebesar Rp11.466.777,00 atau tercapai sebesar 95,38%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan target 1 paket terealisasi 1 paket atau **tercapai 100,00%**.

e) Fasilitas Kunjungan Tamu

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 100,00% dengan anggaran sebanyak Rp39.610.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp14.125.830,00 atau tercapai sebesar 35,66%. Hal ini diarenakan **kunjungan dari Kementrian Koperasi ke KDMP tidak jadi dilaksanakan**. Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah mencapai 100,00%. Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu yang merupakan keluaran (output) sub kegiatan **tercapai 100,00%** yaitu dari target 12 laporan terealisasi 12 laporan.

f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 100,00% dengan anggaran sebesar Rp71.902.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp56.727.440,00 atau **sebesar 78,90% karena adanya efisiensi biaya perjalanan dinas luar daerah**. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 1 laporan terealisasi 1 laporan atau **tercapai 100,00%**.

g) Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD

Alokasi anggaran sub kegiatan sebesar Rp30.333.950,00 terealisasi sebesar Rp28.996.932,42 atau tercapai sebesar 95,59%. jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada

SKPD dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen atau **tercapai 100,00%.**

h) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 100,00% dengan anggaran sebesar Rp311.920.250,00. Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah **mencapai 100,00%** dan realisasi anggaran sebesar Rp307.002.887,73 dengan kata lain tercapai sebesar 98,42%. jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen.

5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan adalah persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah dengan target 100,00% **terrealisasi 100,00%.**

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari 3 sub kegiatan berikut:

a) Penyediaan jasa surat menyurat

Alokasi anggaran pelaksanaan sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat sebesar Rp4.221.975,00 terealisasi sebesar Rp4.220.000,00 atau sebesar 99,95%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan target 1 laporan terealisasi 1 laporan sehingga **tercapai 100,00%.**

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Alokasi anggaran pelaksanaan sub sebesar Rp157.894.900,00 terealisasi sebesar Rp140.046.724,00 atau tercapai sebesar 88,70%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang

disediakan dengan target 12 dokumen terealisasi 12 dokumen atau **tercapai 100%**.

c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 100,00% dengan anggaran sebesar Rp798.663.800,00. Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah mencapai 100,00% dan realisasi anggaran sebesar Rp741.256.343,45 dengan kata lain tercapai sebesar 92,81%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target 1 laporan **terrealisasi 100,00%**.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD dengan target 100,00% **terrealisasi 100,00%**. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 100,00% dengan anggaran sebesar Rp131.839.350,00. Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah **mencapai 100,00%** dan realisasi anggaran sebesar Rp123.265.139,00 dengan kata lain tercapai sebesar 93,50%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan target 8 unit dan terealisasi 8 unit.

b) Pemeliharaan Mebel

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 100,00% dengan anggaran sebesar Rp16.050.000,00.

Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah mencapai 100,00% dan realisasi anggaran sebesar Rp15.785.000,00 dengan kata lain tercapai sebesar 98,35%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah mebel yang dipelihara dari target 25 unit terealisasi 25 unit atau **tercapai 100,00%**.

c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 100,00% dengan anggaran sebesar Rp38.040.000,00. Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah mencapai 100,00% dan realisasi anggaran sebesar Rp33.101.494,00 dengan kata lain tercapai sebesar 87,02%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target 25 unit terealisasi 25 unit atau **tercapai 100,00%**.

d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 100,00% dengan anggaran sebesar Rp110.158.000,00. Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah mencapai 100,00% dan realisasi anggaran sebesar Rp109.653.700,76 dengan kata lain tercapai sebesar 99,54%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target 2 unit terealisasi 2 unit atau **tercapai 100,00%**.

7. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program pelayanan izin usaha simpan pinjam dengan indikator Prosentase KSP/USP Koperasi yang memiliki izin mempunyai target sebesar 34,01% dan terealisasi sebesar 35,64% atau **capaian kinerja program sebesar 104,8%**. Program ini didukung dengan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk

Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai target sebesar 34,01% dengan realisasi sebesar 35,64% atau **capaian kinerja kegiatan sebesar 104,8%**.

Kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota didukung dengan 1 sub kegiatan yaitu Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan tersebut memiliki keluaran (output) kegiatan yaitu jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dengan target 91 unit usaha terealisasi 91 unit usaha sehingga capaian kinerja **keluaran (output) sub kegiatan sebesar 100%**.

Anggaran untuk Program pelayanan izin usaha simpan pinjam, kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggaran sebesar Rp412.722.200,00 dengan realisasi sebesar Rp393.133.322,48 atau **kinerja keuangan sebesar 95,25%**.

8. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi memiliki indikator kinerja program yaitu persentase koperasi yang aktif dengan target 78,40% dan terealisasi sebesar 87,8% atau **capaian kinerja program sebesar 112,0%**. Program ini didukung dengan kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota dengan target sebesar 78,40%% dengan realisasi sebesar 87,8% atau **capaian kinerja kegiatan sebesar 112,0%**.

Kegiatan ini didukung dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota dengan target keluaran 5 usaha dan terealisasi 16 usaha atau **capaian kinerja sub kegiatan sebesar 320%**.

Anggaran untuk Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp28.871.250,00 dengan realisasi sebesar Rp28.497.072,00 sehingga **capaian kinerja keuangan sebesar 98,70%**.

9. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi memiliki indikator kinerja program yaitu persentase KSP/USP koperasi sehat target 35,22% dan terealisasi sebesar 30% atau **capaian kinerja program sebesar 85,2%**. Tidak tercapainya target kinerja program disebabkan adanya perubahan kertas kerja dari penialian koperasi menjadi pengawasan koperasi yang mana kertas kerja baru memiliki aspek yang lebih luas dalam penilaiannya.

Program ini didukung dengan Kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan target sebesar 28,10% dengan realisasi sebesar 30,00% atau **capaian kinerja kegiatan sebesar 106,8%.**

Kegiatan ini didukung dengan 1 sub kegiatan, yaitu pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota dengan target keluaran 125 unit usaha dan terealisasi sebanyak 110 unit usaha atau **capaian kinerja sub kegiatan sebesar 88%.**

Anggaran untuk Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, dan sub kegiatan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota sebesar Rp144.093.000,00 dengan realisasi sebesar Rp138.433.359,00 atau tingkat **kinerja keuangan sebesar 96,07%.**

10. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program pendidikan dan latihan perkoperasian memiliki indikator kinerja program yaitu persentase pengelola koperasi yang bersertifikat dengan target 37,27% dan terealisasi sebesar 40,58% atau **capaian kinerja program sebesar 108,9%.** Program ini didukung dengan kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotannya dalam daerah kabupaten/kota dengan target sebesar 37,27% dengan realisasi sebesar 40,58% atau **capaian kinerja kegiatan sebesar 108,9%.**

Kegiatan ini didukung dengan 1 sub kegiatan, yaitu peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi dengan target keluaran 460 orang dan

teralisasi sebesar 841 orang atau **capaian kinerja sub kegiatan sebesar 182,83%.**

Anggaran untuk Program pendidikan dan latihan perkoperasian, kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotannya dalam daerah kabupaten/kota, dan sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi sebesar Rp844.138.850,00,00 dengan realisasi sebesar Rp785.341.172,00 atau **kinerja keuangan sebesar 93,03%.**

11. Program Perberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi memiliki indikator kinerja program yaitu persentase peningkatan volume usaha koperasi dengan target 13,73% dan terealisasi sebesar 13,87% atau **capaian kinerja program sebesar 101,10%.**

Program ini didukung dengan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota dengan target sebesar 13,73% dengan realisasi sebesar 13,87% atau **capaian kinerja kegiatan sebesar 101,0%.**

Kegiatan ini didukung dengan 1 sub kegiatan, yaitu pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota dengan target 12 unit usaha dan terealisasi 5 unit usaha atau **capaian kinerja sub kegiatan sebesar 41%.** Ketidaktercapaian target ini **dikarenakan adanya Surat Edaran** dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 570/2254 **tentang Penundaan Penyaluran Dana Penguatan Modal, sehingga proses penerbitan rekomendasi Dana Penguatan Modal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dihentikan selama beberapa bulan.**

Anggaran untuk program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, dan sub kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota sebesar Rp211.632.875,00 dengan realisasi sebesar Rp206.549.706,00 atau tingkat **kinerja keuangan sebesar 97,60%.**

12. Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro memiliki indikator kinerja program yaitu Jumlah pelaku usaha mikro baru yang berizin target 740 pelaku usaha dengan realisasi sebesar 1.212 atau **capaian kinerja program sebesar 163,8%.** Tingginya capaian kinerja program didukung oleh adanya PLUT KUKM yang berlokasi di Minggir yang sudah mulai beroperasi sejak triwulan IV tahun 2025. PLUT KUKM memberikan layanan pendampingan kepada koperasi dan UKM salah satunya pendampingan pengurusan NIB bagi pelaku usaha baru.

Program ini memiliki anggaran sebesar Rp4.171.781.803,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp4.148.960.129,04 **atau tingkat kinerja keuangan program 99,45%.**

Program ini didukung kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan yang memiliki target sebesar 740 UMKM dengan realisasi sebesar 1.2012 UMKM atau **capaian kinerja kegiatan sebesar 163,8%.**

Kegiatan ini didukung dengan 4 sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan yaitu jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro dengan target 300 unit usaha dan terealisasi sebanyak 450 unit usaha atau **capaian kinerja sub kegiatan sebesar 150%**. Anggaran sub kegiatan ini Rp886.946.892,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp880.746.892,09 atau kinerja **keuangan sebesar 99,30%**.

b) Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 10 unit usaha dengan realisasi sebanyak 35 atau **capaian kinerja sub kegiatan sebesar 350%**. Anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp663.147.742,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp631.752.841,07 atau **kinerja keuangan tercapai sebesar 99,78%**.

c) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebanyak 150 unit usaha dengan realisasi sebanyak 200 atau **capaian kinerja sub kegiatan sebesar 133,34%**. Sub Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp298.144.267,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp295.457.435,80 atau **kinerja keuangan tercapai sebesar 99,11%**.

d) Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 500 unit usaha dengan realisasi sebanyak 724 atau **capaian kinerja sub kegiatan sebesar 144,8%**. Sub Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp2.353.572.902,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.341.002.960,08 atau **kinerja keuangan tercapai sebesar 99,47%**.

13. Program Pengembangan UMKM

Program pengembangan UMKM memiliki indikator kinerja program yaitu jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha target 25 usaha mikro dan terealisasi 70 usaha mikro atau **capaian kinerja program sebesar 280%**. Tingginya capaian kinerja program didukung oleh updating sistem Satu Data UMKM yang memvalidasi data UMKM naik kelas.

Program ini didukung dengan kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil dengan target sebesar 20 UMKM dengan realisasi sebesar 70 UMKM atau **capaian kinerja kegiatan sebesar 350,0%**

Kegiatan ini didukung dengan 1 sub kegiatan, yaitu fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi dengan target keluaran 15 unit usaha dan terealisasi sebesar 70 unit usaha atau **capaian kinerja sub kegiatan sebesar 466,7%**.

Anggaran untuk program pengembangan UMKM, kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil, dan sub kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi memiliki anggaran sebesar Rp3.074.211.325,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.967.214.150,58 atau tingkat **kinerja keuangan sebesar 96,52%**.

3.4.2 Periode 2025-2029

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian seluruh sasaran strategis sebanyak 8 program, 13 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan keseluruhan anggaran sebesar Rp15.779.184.920,00. Adapun Realisasi keuangan sebesar Rp15.251.001.053,46 atau sebesar 96,65%. **Capaian realisasi keuangan tahun 2025 meningkat 5,85% dari tahun 2024** dengan

realisasi keuangan 90,80%. Capaian kinerja keuangan tahun anggaran sebesar 96,65% juga menempati **rangking pertama** dalam kinerja keuangan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman.

Tabel 3.4.2.1. Realisasi Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2025

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				
2	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%
2 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100,00	100,00	100,00%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1 Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD				
1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD				
1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	18	18	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1 Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	32	32	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/				

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Triwulan/ Semesteran SKPD				
1 Laporan koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Laporan	16	16	100,00%
2 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	16	16	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1 Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00%
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
1 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	%	100,00	100,00	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
1 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu				
1 Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	11	11	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	5	100,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
1 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
1 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	3	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat				

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor				
1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				
1 Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	%	100,00	100,00	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan				
1 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bulan	12	12	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel				
1 Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	5	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14	14	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100,00%
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				
1 Persentase KSP/USP Koperasi yang memiliki Izin		34,01	35,64	104,8%
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota				
1 Persentase KSP/USP Koperasi yang memiliki Izin	%	34,01	35,64	104,8%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1 Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi	91	93	102,2%
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
1 Persentase koperasi yang aktif	%	78,40	87,8	112,0%
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1 Persentase koperasi aktif	%	78,40	87,8	112,0%

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sub Kegiatan Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota				
1 Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	5	16	320,0%
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				
1 Persentase KSP/USP Koperasi sehat	%	35,22	30	85,2%
Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota				
1 Persentase KSP/USP Koperasi sehat	%	28,10	30,00	106,8%
Sub Kegiatan Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota				
1 Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	125	110	88,0%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
1 Persentase Pengelola koperasi yang bersertifikasi	%	37,27	40,58	108,9%
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota				
1 Persentase Pengelola koperasi yang bersertifikasi	%	37,27	40,58	108,9%
Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi				
1 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang	460	851	185,0%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
1 Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%	13,73	13,87	101,0%
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota				
1 Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%	13,73	13,87	101,0%
Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
1 Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koperasi	12	5	41,7%
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
1 Jumlah Pelaku Usaha Mikro Baru yang Berizin	Pelaku Usaha	740	1212	163,8%
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan				

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KELUARAN KEGIATAN / KELUARAN SUB KEGIATAN			
	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1 Jumlah Pelaku Usaha Mikro Baru yang Berizin	Pelaku Usaha	740	1.212	163,8%
Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				
1 Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	500	714	142,8%
Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui kemitraan Usaha Mikro				
1 Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	10	35	350,0%
Sub Kegiatan Fasilitasi kemudahan Perizinan Usaha Mikro				
1 Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	150	200	133,3%
Sub Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				
1 Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	orang	300	450	150,0%
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
1 Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	UMKM	20	70	350,0%
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil				
1 Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	UKM	15	70	466,7%
Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				
1 Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	20	108	540,0%

Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan anggaran Rp6.891.733.617,00 dengan realisasi keuangan Rp6.582.872.142,06 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 95,52%. Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu:

- a. persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dengan target 100,00% terealisasi 100,00% sehingga **capaian kinerja 100,00%**.

- b. persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja dengan target 100,00% terealisasi 100,00% sehingga **capaian kinerja 100,00%**.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah
Keluaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah adalah persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu dengan target persentase sebesar 100,00% dan terealisasi 100,00% sehingga **capaian kinerja 100,00%**.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi didukung dengan 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah memiliki target keluaran (output) sub kegiatan jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebesar 5 dokumen dengan anggaran sebanyak Rp6.561.350,00. Realisasi keluaran (output) sub kegiatan sebesar 5 dokumen sehingga **capaian kinerja 100,00%** dan realisasi sebesar Rp6.449.134,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 98,29%.

- b) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Alokasi anggaran pelaksanaan sub kegiatan sebesar Rp1.792.500,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.768.782,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 98,68%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen atau **tercapai 100,00%**.

c) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Alokasi anggaran pelaksanaan sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA sebesar Rp1.594.500,00 dengan realisasi sebesar Rp1.542.929,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 96,77%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen atau **terealisasi 100%**.

d) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah menggunakan anggaran Rp4.357.500,00 dengan realisasi sebesar Rp4.327.802,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 99,32%. Keluaran (output) sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 18 dokumen terealisasi 14 laporan atau **terealisasi 100,00%**.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah adalah persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu dengan target 100,00% terealisasi 100,00% sehingga **capaian kinerja 100,00%**.

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah terdiri dari 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN didukung dengan anggaran sebesar Rp4.731.633.067,00 dengan realisasi sebesar Rp4.596.196.749,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 97,14%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target 30 orang **terealisasi 100,00%** yaitu 30 orang.

b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp175.352.875,00 terealisasi sebesar Rp166.276.347,70 (94,82%). Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan target 12 dokumen terealisasi 12 dokumen sehingga **capaian kinerja 100,00%.**

c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp4.531.500,00 dengan realisasi 99,54% yaitu sebesar Rp4.510.511,00. Keluaran (output) sub kegiatan adalah:

- laporan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dengan target 4 laporan terealisasi 4 laporan sehingga **capaian kinerja 100,00%.**
- Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD target 4 laporan terealisasi 4 laporan sehingga **capaian kinerja 100,00%.**

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dengan target 100,00% **terrealisasi 100,00%.**

Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah terdiri dari sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp68.686.150,00 dan terealisasi sebesar Rp53.075.228,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 77,27%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dengan

target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen atau **terealisasi 100,00%**.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah adalah persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dengan target sebesar 100,00% **terealisasi 100,00%**.

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah didukung dengan 8 sub kegiatan sebagai berikut:

a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor didukung dengan anggaran sebesar Rp15.958.700,00 terealisasi sebesar Rp14.299.394,00 (89,60%). Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target 2 paket terealisasi 2 paket atau **terealisasi 100,00%**.

b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Alokasi anggaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp59.031.850,00 terealisasi sebesar Rp58.346.400,00 atau tercapai sebanyak 98,84%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan dengan target 1 paket **terealisasi 100,00%**.

c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp99.576.700,00 terealisasi sebesar Rp90.430.597,00 atau tercapai sebesar 90,82%. Keluaran (output) sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dengan target 2 paket terealisasi 2 paket atau **terealisasi 100,00%**.

d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi anggaran pelaksanaan sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp12.022.700,00 terealisasi sebesar Rp11.466.777,00 atau tercapai sebesar 95,38%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan target 1 paket terealisasi 1 paket atau **terealisasi 100,00%**.

e) Fasilitas Kunjungan Tamu

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 100,00% dengan anggaran sebanyak Rp39.610.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp14.125.830,00 atau tercapai sebesar 35,66%. Hal ini dikarenakan **kunjungan tamu dari Kementrian Koperasi ke KDMP tidak jadi dilaksanakan**. Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah mencapai 100,00%. Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu yang merupakan keluaran (output) sub kegiatan **tercapai 100,00%** yaitu dari target 12 laporan terealisasi 12 laporan.

f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 100,00% dengan anggaran sebesar Rp71.902.000,00. Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah mencapai 100,00% dan realisasi anggaran sebesar Rp56.727.440,00 dengan kata lain tercapai sebesar 78,90%. Hal ini dikarenakan adanya **efisiensi biaya perjalanan dinas luar daerah**.

Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 1 laporan terealisasi 1 laporan atau **terealisasi 100,00%**.

g) Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD

Alokasi anggaran sub kegiatan sebesar Rp30.333.950,00 terealisasi sebesar Rp28.996.932,42 atau tercapai sebesar 95,59%. jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada

SKPD dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen atau **tercapai 100,00%.**

h) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 100,00% dengan anggaran sebesar Rp311.920.250,00. Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah mencapai 100,00% dan realisasi anggaran sebesar Rp307.002.887,73 dengan kata lain tercapai sebesar 98,42%. jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen atau terealisasi **sebesar 100%.**

5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan adalah persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah dengan target 100,00% **terrealisasi 100,00%.**

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari 3 sub kegiatan berikut:

a) Penyediaan jasa surat menyurat

Alokasi anggaran pelaksanaan sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat sebesar Rp4.221.975,00 terealisasi sebesar Rp4.220.000,00 atau sebesar 99,95%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan target 1 laporan terealisasi 1 laporan sehingga **tercapai 100,00%.**

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Alokasi anggaran pelaksanaan sub sebesar Rp157.894.900,00 terealisasi sebesar Rp140.046.724,00 atau tercapai sebesar 88,70%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang

disediakan dengan target 12 dokumen terealisasi 12 dokumen atau **terealisasi sebesar 100%**.

c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 100,00% dengan anggaran sebesar Rp798.663.800,00. Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah mencapai 100,00% dan realisasi anggaran sebesar Rp741.256.343,45 dengan kata lain tercapai sebesar 92,81%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target 1 laporan **terealisasi 100,00%**.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD dengan target 100,00% **terealisasi 100,00%**. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 100,00% dengan anggaran sebesar Rp131.839.350,00. Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah mencapai 100,00% dan realisasi anggaran sebesar Rp123.265.139,00 dengan kata lain tercapai sebesar 93,50%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan target 8 unit dan terealisasi 8 unit atau **terealisasi 100%**.

b) Pemeliharaan Mebel

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 100,00% dengan anggaran sebesar Rp16.050.000,00.

Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah mencapai 100,00% dan realisasi anggaran sebesar Rp15.785.000,00 dengan kata lain tercapai sebesar 98,35%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah mebel yang dipelihara dari target 25 unit terealisasi 25 unit atau **tercapai 100,00%**.

c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 100,00% dengan anggaran sebesar Rp38.040.000,00. Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah mencapai 100,00% dan realisasi anggaran sebesar Rp33.101.494,00 dengan kata lain tercapai sebesar 87,02%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target 25 unit terealisasi 25 unit atau **tercapai 100,00%**.

d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 100,00% dengan anggaran sebesar Rp110.158.000,00. Realisasi sub kegiatan ini secara fisik telah mencapai 100,00% dan realisasi anggaran sebesar Rp109.653.700,76 dengan kata lain tercapai sebesar 99,54%. Keluaran (output) sub kegiatan adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target 2 unit terealisasi 2 unit atau **tercapai 100,00%**.

7. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program pelayanan izin usaha simpan pinjam dengan indikator Prosentase KSP/USP Koperasi yang memiliki izin mempunyai target sebesar 34,01% dan terealisasi sebesar 35,64% atau **capaian kinerja program sebesar 104,8%**. Program ini didukung dengan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk

Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai target sebesar 34,01% dengan realisasi sebesar 35,64% atau **capaian kinerja kegiatan sebesar 104,8%**.

Kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota didukung dengan 1 sub kegiatan yaitu Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan tersebut memiliki keluaran (output) kegiatan yaitu jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dengan target 91 unit usaha terealisasi 91 unit usaha sehingga capaian kinerja **keluaran (output) sub kegiatan sebesar 100%**.

Anggaran untuk Program pelayanan izin usaha simpan pinjam, kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggaran sebesar Rp412.722.200,00 dengan realisasi sebesar Rp393.133.322,48 atau **kinerja keuangan sebesar 95,25%**.

8. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi memiliki indikator kinerja program yaitu persentase koperasi yang aktif dengan target 78,40% dan terealisasi sebesar 87,8% atau **capaian kinerja program sebesar 112,0%**. Program ini didukung dengan kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota dengan target sebesar 78,40%% dengan realisasi sebesar 87,8% atau **capaian kinerja kegiatan sebesar 112,0%**.

Kegiatan ini didukung dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota dengan target keluaran 5 usaha dan terealisasi 16 usaha atau **capaian kinerja sub kegiatan sebesar 320%**.

Anggaran untuk Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp28.871.250,00 dengan realisasi sebesar Rp28.497.072,00 sehingga **capaian kinerja keuangan sebesar 98,70%**.

9. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi memiliki indikator kinerja program yaitu persentase KSP/USP koperasi sehat target 35,22% dan terealisasi sebesar 30% atau **capaian kinerja program sebesar 85,2%**. Tidak tercapainya target kinerja program disebabkan adanya perubahan kertas kerja dari penialian koperasi menjadi pengawasan koperasi yang mana kertas kerja baru memiliki aspek yang lebih luas dalam penilaiannya.

Program ini didukung dengan Kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan target sebesar 28,10% dengan realisasi sebesar 30,00% atau **capaian kinerja kegiatan sebesar 106,8%.**

Kegiatan ini didukung dengan 1 sub kegiatan, yaitu pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota dengan target keluaran 125 unit usaha dan terealisasi sebanyak 110 unit usaha atau **capaian kinerja sub kegiatan sebesar 88%.**

Anggaran untuk Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, dan sub kegiatan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota sebesar Rp144.093.000,00 dengan realisasi sebesar Rp138.433.359,00 atau **tingkat kinerja keuangan sebesar 96,07%.**

10. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program pendidikan dan latihan perkoperasian memiliki indikator kinerja program yaitu persentase pengelola koperasi yang bersertifikat dengan target 37,27% dan terealisasi sebesar 40,58% atau **capaian kinerja program sebesar 108,9%.** Program ini didukung dengan kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotannya dalam daerah kabupaten/kota dengan target sebesar 37,27% dengan realisasi sebesar 40,58% atau **capaian kinerja kegiatan sebesar 108,9%.**

Kegiatan ini didukung dengan 1 sub kegiatan, yaitu peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi dengan target keluaran 460 orang dan

teralisasi sebesar 841 orang atau **capaian kinerja sub kegiatan sebesar 182,83%**.

Anggaran untuk Program pendidikan dan latihan perkoperasian, kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotannya dalam daerah kabupaten/kota, dan sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi sebesar Rp844.138.850,00,00 dengan realisasi sebesar Rp785.341.172,00 atau **kinerja keuangan sebesar 93,03%**.

11. Program Perberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi memiliki indikator kinerja program yaitu persentase peningkatan volume usaha koperasi dengan target 13,73% dan terealisasi sebesar 13,87% atau **capaian kinerja program sebesar 101,10%**.

Program ini didukung dengan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota dengan target sebesar 13,73% dengan realisasi sebesar 13,87% atau **capaian kinerja kegiatan sebesar 101,0%**.

Kegiatan ini didukung dengan 1 sub kegiatan, yaitu pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota dengan target 12 unit usaha dan terealisasi 5 unit usaha atau **capaian kinerja sub kegiatan sebesar 41%**. Ketidaktercapaian target ini dikarenakan adanya **Surat Edaran** dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 570/2254 tentang **Penundaan Penyaluran Dana Penguatan Modal, sehingga proses penerbitan rekomendasi Dana Penguatan Modal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dihentikan selama beberapa bulan**.

Anggaran untuk program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, dan sub kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota sebesar Rp211.632.875,00 dengan realisasi sebesar Rp206.549.706,00 atau tingkat **kinerja keuangan sebesar 97,60%.**

12. Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro memiliki indikator kinerja program yaitu Jumlah pelaku usaha mikro baru yang berizin target 740 pelaku usaha dengan realisasi sebesar 1.212 atau **capaian kinerja program sebesar 163,8%.** Tingginya capaian kinerja program didukung oleh adanya PLUT KUKM yang berlokasi di Minggir yang sudah mulai beroperasi sejak triwulan IV tahun 2025. PLUT KUKM memberikan layanan pendampingan kepada koperasi dan UKM salah satunya pendampingan pengurusan NIB bagi pelaku usaha baru.

Program ini memiliki anggaran sebesar Rp4.171.781.803,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp4.148.960.129,04 atau tingkat **kinerja keuangan program 99,45%.**

Program ini didukung kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan yang memiliki target sebesar 740 UMKM dengan realisasi sebesar 1.2012 UMKM atau **capaian kinerja kegiatan sebesar 163,8%.**

Kegiatan ini didukung dengan 4 sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan yaitu jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro dengan target 300 unit usaha dan terealisasi sebanyak 450 unit usaha atau **capaian kinerja sub kegiatan sebesar 150%**. Anggaran sub kegiatan ini Rp886.946.892,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp880.746.892,09 atau **kinerja keuangan sebesar 99,30%**.

b) Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 10 unit usaha dengan realisasi sebanyak 35 atau **capaian kinerja sub kegiatan sebesar 350%**. Anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp663.147.742,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp631.752.841,07 atau **kinerja keuangan tercapai sebesar 99,78%**.

c) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebanyak 150 unit usaha dengan realisasi sebanyak 200 atau **capaian kinerja sub kegiatan sebesar 133,34%**. Sub Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp298.144.267,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp295.457.435,80 atau **kinerja keuangan tercapai sebesar 99,11%**.

d) Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja output sub kegiatan sebesar 500 unit usaha dengan realisasi sebanyak 724 atau **capaian kinerja sub kegiatan sebesar 144,8%**. Sub Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp2.353.572.902,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.341.002.960,08 atau **kinerja keuangan tercapai sebesar 99,47%**.

13. Program Pengembangan UMKM

Program pengembangan UMKM memiliki indikator kinerja program yaitu jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha target 25 usaha mikro dan terealisasi 70 usaha mikro atau **capaian kinerja program sebesar 280%**. Tingginya capaian kinerja program didukung oleh updating sistem Satu Data UMKM yang memvalidasi data UMKM naik kelas.

Program ini didukung dengan kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil dengan target sebesar 20 UMKM dengan realisasi sebesar 70 UMKM atau **capaian kinerja kegiatan sebesar 350,0%**

Kegiatan ini didukung dengan 1 sub kegiatan, yaitu fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi dengan target keluaran 15 unit usaha dan terealisasi sebesar 70 unit usaha atau **capaian kinerja sub kegiatan sebesar 466,7%**.

Anggaran untuk program pengembangan UMKM, kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil, dan sub kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi memiliki anggaran sebesar Rp3.074.211.325,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.967.214.150,58 atau **tingkat kinerja keuangan sebesar 96,52%**.

Untuk laporan pelaksanaan kegiatan masing-masing Sub Bagian/Tim Kerja dapat diakses melalui <https://drive.google.com/drive/folders/1ybCAypbLZrWv1kgkTDTb36Fzk1v6vvOr?usp=sharing>.

3.5 Inovasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman pada tahun 2025 melakukan pengembangan web marketplace Sleman Mart. Inovasi ini berupa pengembangan dari web marketplace Sleman Mart sebelumnya yang hanya sebagai jendela produk UMKM namun belum dapat mendukung transaksi produk. Pengembangan web marketplace Sleman Mart memiliki tujuan jangka pendek dan jangka menengah, yaitu:

1. **Tujuan jangka pendek** : menyiapkan web marketplace untuk memfasilitasi transaksi pembelian masyarakat umum atas produk UMKM Sleman.
2. **Tujuan jangka menengah** : menyiapkan marketplace yang terdaftar dalam toko daring LKPP untuk mendukung proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pada tahun 2025, Dinas Koperasi UMKM melakukan pengembangan web marketplace Sleman Mart sesuai dengan tujuan nomor 1. Adapun manfaat web marketplace Sleman Mart saat ini antara lain:

1. Menampilkan produk UMKM dengan display menarik dan keterangan yang dibutuhkan termasuk harga yang dapat di update sewaktu-waktu.
2. Memiliki profile umum UMKM Sleman sebagai penjual produk secara lengkap. Namun demikian yang dapat dilihat oleh konsumen hanya nama, alamat, dan no telp UMKM.
3. Memiliki akses admin untuk memverifikasi produk yang akan diunggah oleh UMKM, memonitor transaksi yang terjadi, dan mengunggah informasi terkait kegiatan Dinkop UKM yang diakses oleh masyarakat.
4. Menyediakan media transaksi pembayaran melalui Qris.
5. Langsung menghubungkan antara penjual dengan pembeli.

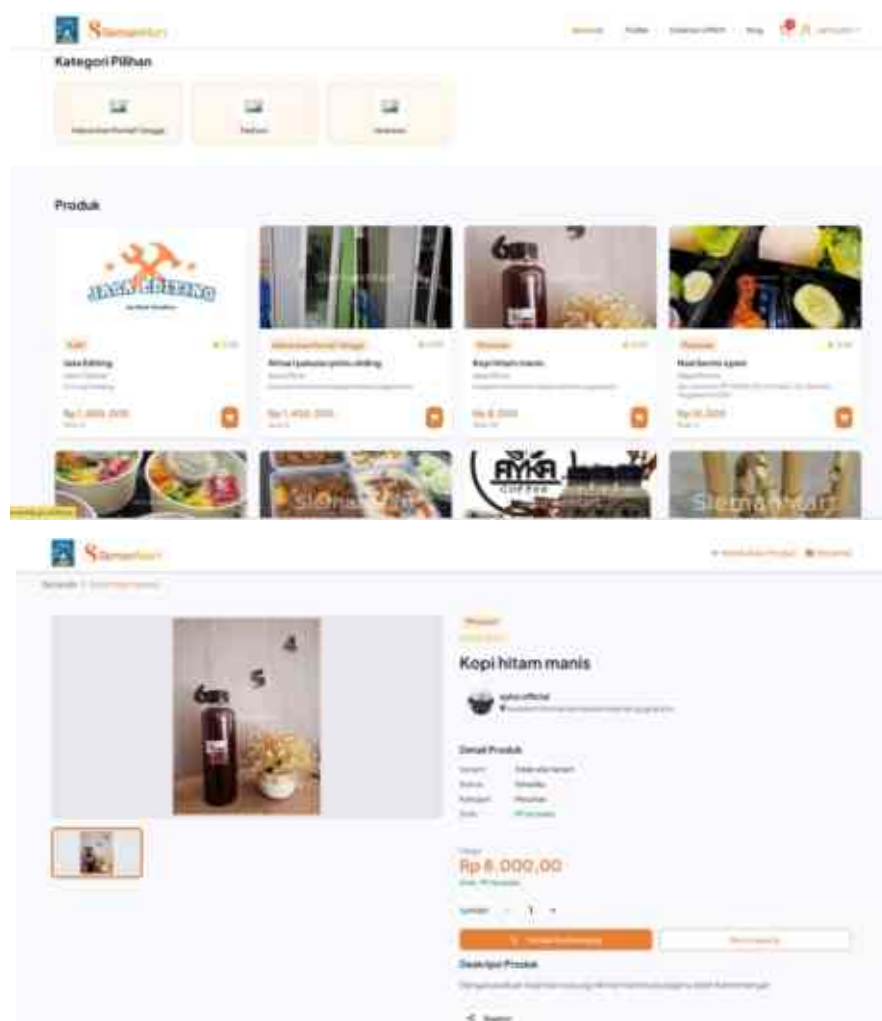
Pengembangan yang dilakukan pada tahun 2025 sebagai pengembangan awal (embrio) menuju tujuan nomor 2, yaitu menyiapkan marketplace yang terdaftar dalam toko daring LKPP untuk mendukung proses pengadaan

barang/jasa pemerintah. Pengembangan lebih lanjut yang diperlukan untuk menyiapkan Sleman Mart dapat terdaftar dalam toko daring LKPP antara lain:

1. Menciptakan fitur/komponen akun Pejabat Pengadaan,
2. Menciptakan fitur/komponen dokumen transaksi,
3. Menciptakan fitur/komponen pajak
4. Menciptakan fitur/komponen rekening tampungan (escrow)
5. Menciptakan fitur/komponen audit trail.

Dalam rangka upaya pengembangan memenuhi 5 (lima) kelengkapan di atas, Dinas Koperasi UKM akan bekerjasama dengan Amikom untuk dapat meraih dana hibah Dikti tahun 2026 guna pengembangan Sleman Mart.

Gambar. 3.5.1. Pengembangan Sleman Mart



3.6 Dukungan Terhadap Tema Prioritas Nasional

3.6.1. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman dalam mendukung tema prioritas nasional “P3DN” memiliki peran yang cukup penting baik dalam kebijakan yang bersifat komitmen maupun program, kegiatan, dan anggaran. Adapun hasil kinerja sebagai berikut:

1) Kebijakan

a) “GEBER GASPOL”

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menginisiasi pelaksanaan program dan penyusunan Surat Edaran Nomor 0586 Tahun 2024 tentang Gerakan Bersama Gunakan Selalu Produk (Berbahan Baku) Lokal “GEBER GASPOL”. Kebijakan GEBER GASPOL ini ditujukan kepada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman, Instansi Vertikal yang berlokasi di Kabupaten Sleman, BUMD, dan Kalurahan. Kebijakan ini merupakan pemanfaatan produk berbahan baku lokal dalam kegiatan pertemuan, rapat, pelatihan, dan lain sebagainya. Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam kebijakan ini, selain sebagai inisiator juga sebagai pendamping UMKM dalam memproduksi makanan dan minuman jamuan pertemuan.

b) Toko Daring “Mbiz Market”

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mendukung program P3DN Kabupaten Sleman berperan sebagai pendamping UMKM yang hendak masuk dalam Mbiz Market. Mbiz Market merupakan salah satu toko daring yang potensial untuk meningkatkan pangsa pasar umkm, meningkatkan penjualan, dan pemerataan pembelian produk UMKM.

2) Program/Kegiatan/subkegiatan yang mendukung/berkaitan/beririsan dengan upaya P3DN sebagai berikut:

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mendukung/berkaitan/beririsan dengan program P3DN Kabupaten Sleman sebagai berikut:

Tabel 3.6.1.1. Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Mendukung Upaya P3DN

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Pemberdayaan Umkm	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro

3) Alokasi Anggaran dan prosentase dari anggaran Dinas

Alokasi/dukungan anggaran dalam rangka P3DN pada Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro sebesar Rp633.147.742,00 atau sebesar 4,01% dari total Anggaran sebesar Rp. 15.779.184.920,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6.1.2. Alokasi Anggaran Program yang Mendukung P3DN Tahun 2025

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Kegiatan	Anggaran Dinas	%
Program Pemberdayaan Umkm				
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	633.147.742,00	15.779.184.920	4,01%

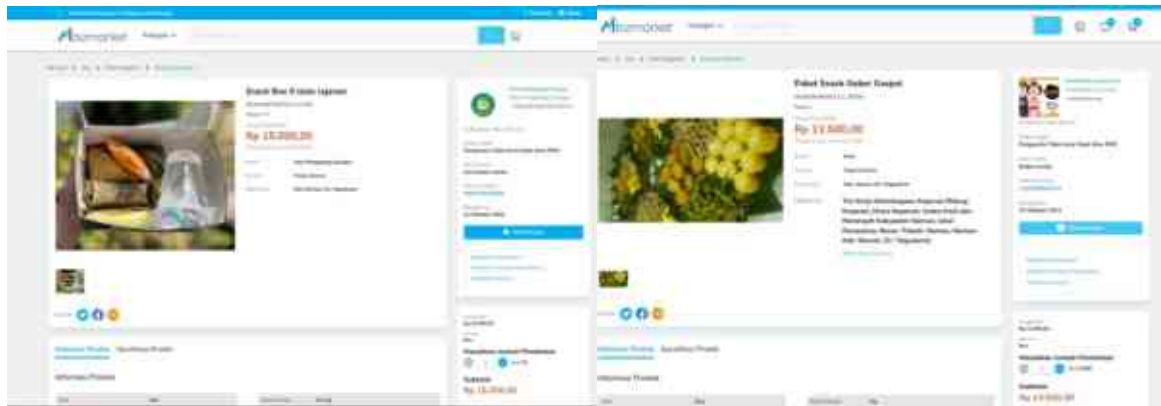
4) Inovasi

Inovasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman melalui kegiatan Gerakan Bersama Gunakan Selalu Produk (Berbahan Baku) Lokal (GEBER GASPOL). Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam kebijakan tersebut meliputi:

- Memberikan pendampingan pendaftaran pada Mbiz Market bagi UMKM,
- Menyediakan ruang/help desk di gedung PLUT untuk kegiatan pendampingan pendaftaran Mbiz Market,
- Mempromosikan produk UMKM berbahan baku lokal “menu Produk Lokal” kepada masyarakat pada saat launching Geber Gaspol melalui bakti sosial berupa snack berbahan baku lokal, dan

- d. Menggunakan produk berbahan lokal untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah setiap hari Rabu dan Jum'at.

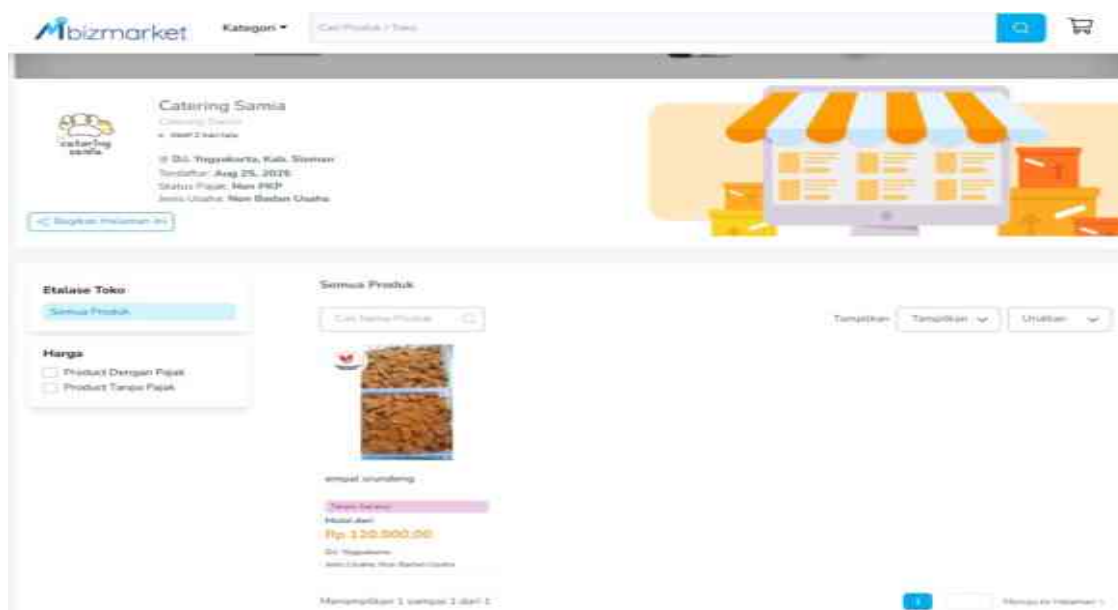
Gambar.3.6.1.1. Contoh menu “Produk Lokal”



Contoh data UMKM hasil Temu Mitra yang ditindaklanjuti dengan mendaftar pada Mbiz market

Nama : Samiasih
 NIB : 220100271787
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Nomor KTP : 3404124109670003
 Jabatan dalam Kepengurusan Forum Komunikasi UMKM Kal. Sukoharjo : Bidang Pemasaran

Dalam kegiatan Workshop Forum Komunikasi UMKM (PUPM) Kalurahan Sukoharjo, Ibu Samiasih mendapatkan kesempatan untuk mengikuti rangkaian acara yang dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 23–24 Juli 2025. Pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan Business Matching yang menghadirkan sepuluh mitra, salah satunya MBiz Market yang siap bermitra dengan para peserta workshop. Ibu Samiasih, yang telah lama bergabung dalam MBiz Market namun belum memajang produknya, pada kesempatan ini berkesempatan berkonsultasi dengan tim MBiz Market mengenai tata cara mengunggah produk.



5) Dampak

Dampak positif/kemanfaatan atas upaya mendukung P3DN adalah:

- Meningkatkan nilai transaksi UMKM,
- Mendorong usaha mikro naik kelas, dan
- Mendukung pencapaian IKU untuk indikator Rasio Kewirausahaan Daerah.

Saat ini, UMKM Kabupaten Sleman yang terdaftar dalam Mbiz Market sebanyak 2.287 UMKM Kabupaten Sleman dengan nilai transaksi sebesar Rp121.731.161.938 (sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah). Sedangkan untuk capaian IKU yang didukung dari kegiatan ini selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6.1 3 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dan 2025

No	Tujuan	Indikator	Target		Realisasi	
			2024	2025	2024	2025
1	Meningkatkan Kinerja Kelembagaan Ekonomi Lokal	Rasio Kewirausahaan Daerah	-	4,74%	-	4,77%

Rasio kewirausahaan daerah dengan target 4,74% dapat direalisasikan sebesar 4,77% atau secara kinerja tercapai 100,64%. Rasio kewirausahaan daerah ini merupakan jumlah pelaku usaha dibantu buruh tetap, dibagi total

angkatan kerja, di kali 100%. Hal ini menunjukkan kemampuan pelaku usaha dan sumbangsihnya dalam menurunkan angka pengangguran.

3.6.2. Pengentasan Kemiskinan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman melalui program dan kegiatan turut mendukung tema prioritas nasional “Pengentasan Kemiskinan” melalui beberapa aspek sebagai berikut:

1) Kebijakan

Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman dalam rangka mendukung Pengentasan Kemiskinan sesuai dengan rencana strategi kebijakan yaitu:

- a. Menumbuhkan wirausaha baru dengan arah kebijakan penyelenggaraan bimtek penumbuhan kewirausahaan yang mengakomodir KK miskin dan/atau rentan miskin, dan
- b. Mengembangkan Koperasi dengan arah kebijakan Meningkatkan Keaktifan Koperasi Sehingga Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku dan Anggota Koeprasi

2) Program/Kegiatan/subkegiatan yang mendukung/berkaitan/beririsan dengan upaya Pengentasan Kemiskinan sebagai berikut:

Tabel 3.6.2.1. Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Mendukung Upaya Pengentasan Kemiskinan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Pemberdayaan Umkm	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro salah satunya melalui kegiatan Bimtek Penumbuhan Wirausaha
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi melalui kegiatan Magang Internship

3) Alokasi/dukungan anggaran dan prosentase terhadap anggaran Dinas

Alokasi/dukungan anggaran dalam rangka pengentasan kemiskinan terdapat pada sub kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro dan Sub Kegiatan

Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6.2.2. Alokasi Anggaran Program yang Mendukung Pengentasan Kemiskinan Tahun 2025

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	%
Program Pemberdayaan Umkm			
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	2.353.572.902,00	14.92%
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian			
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	844.138.850,00	5,35%
Total Anggaran Dinas Koperasi UKM		15.779.184.920	

4) Inovasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman dalam rangka mendukung Pengentasan Kemiskinan telah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 40/Kep.DinkopUKM/2025 tentang Ketentuan Peserta Pelatihan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dalam keputusan tersebut, peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar 10% berasal dari KK Miskin atau Rentan Miskin.

 PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH <i>Salah satu pilar pembangunan ekonomi</i> Jalan Pemuda No. 1, Turi, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman 55571 Telp: (0271) 80473, 8244, 8245, 8246, 8247, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258, 8259, 8260, 8261, 8262, 8263, 8264, 8265, 8266, 8267, 8268, 8269, 8270, 8271, 8272, 8273, 8274, 8275, 8276, 8277, 8278, 8279, 8280, 8281, 8282, 8283, 8284, 8285, 8286, 8287, 8288, 8289, 8290, 8291, 8292, 8293, 8294, 8295, 8296, 8297, 8298, 8299, 8300, 8301, 8302, 8303, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308, 8309, 8310, 8311, 8312, 8313, 8314, 8315, 8316, 8317, 8318, 8319, 8320, 8321, 8322, 8323, 8324, 8325, 8326, 8327, 8328, 8329, 8330, 8331, 8332, 8333, 8334, 8335, 8336, 8337, 8338, 8339, 8340, 8341, 8342, 8343, 8344, 8345, 8346, 8347, 8348, 8349, 8350, 8351, 8352, 8353, 8354, 8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8366, 8367, 8368, 8369, 8370, 8371, 8372, 8373, 8374, 8375, 8376, 8377, 8378, 8379, 8380, 8381, 8382, 8383, 8384, 8385, 8386, 8387, 8388, 8389, 8390, 8391, 8392, 8393, 8394, 8395, 8396, 8397, 8398, 8399, 8400, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407, 8408, 8409, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8419, 8420, 8421, 8422, 8423, 8424, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8455, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8480, 8481, 8482, 8483, 8484, 8485, 8486, 8487, 8488, 8489, 8490, 8491, 8492, 8493, 8494, 8495, 8496, 8497, 8498, 8499, 8500, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8520, 8521, 8522, 8523, 8524, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 8547, 8548, 8549, 8550, 8551, 8552, 8553, 8554, 8555, 8556, 8557, 8558, 8559, 8560, 8561, 8562, 8563, 8564, 8565, 8566, 8567, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 8573, 8574, 8575, 8576, 8577, 8578, 8579, 8580, 8581, 8582, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 8588, 8589, 8590, 8591, 8592, 8593, 8594, 8595, 8596, 8597, 8598, 8599, 8600, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, 8636, 8637, 8638, 8639, 8640, 8641, 8642, 8643, 8644, 8645, 8646, 8647, 8648, 8649, 8650, 8651, 8652, 8653, 8654, 8655, 8656, 8657, 8658, 8659, 8660, 8661, 8662, 8663, 8664, 8665, 8666, 8667, 8668, 8669, 8670, 8671, 8672, 8673, 8674, 8675, 8676, 8677, 8678, 8679, 8680, 8681, 8682, 8683, 8684, 8685, 8686, 8687, 8688, 8689, 8690, 8691, 8692, 8693, 8694, 8695, 8696, 8697, 8698, 8699, 8700, 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708, 8709, 8710, 8711, 8712, 8713, 8714, 8715, 8716, 8717, 8718, 8719, 8720, 8721, 8722, 8723, 8724, 8725, 8726, 8727, 8728, 8729, 8730, 8731, 8732, 8733, 8734, 8735, 8736, 8737, 8738, 8739, 8740, 8741, 8742, 8743, 8744, 8745, 8746, 8747, 8748, 8749, 8750, 8751, 8752, 8753, 8754, 8755, 8756, 8757, 8758, 8759, 8760, 8761, 8762, 8763, 8764, 8765, 8766, 8767, 8768, 8769, 8770, 8771, 8772, 8773, 8774, 8775, 8776, 8777, 8778, 8779, 8780, 8781, 8782, 8783, 8784, 8785, 8786, 8787, 8788, 8789, 8790, 8791, 8792, 8793, 8794, 8795, 8796, 8797, 8798, 8799, 8800, 8801, 8802, 8803, 8804, 8805, 8806, 8807, 8808, 8809, 8810, 8811, 8812, 8813, 8814, 8815, 8816, 8817, 8818, 8819, 8820, 8821, 8822, 8823, 8824, 8825, 8826, 8827, 8828, 8829, 8830, 8831, 8832, 8833, 8834, 8835, 8836, 8837, 8838, 8839, 8840, 8841, 8842, 8843, 8844, 8845, 8846, 8847, 8848, 8849, 8850, 8851, 8852, 8853, 8854, 8855, 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8867, 8868, 8869, 8870, 8871, 8872, 8873, 8874, 8875, 8876, 8877, 8878, 8879, 8880, 8881, 8882, 8883, 8884, 8885, 8886, 8887, 8888, 8889, 8890, 8891, 8892, 8893, 8894, 8895, 8896, 8897, 8898, 8899, 8900, 8901, 8902, 8903, 8904, 8905, 8906, 8907, 8908, 8909, 8910, 8911, 8912, 8913, 8914, 8915, 8916, 8917, 8918, 8919, 8920, 8921, 8922, 8923, 8924, 8925, 8926, 8927, 8928, 8929, 8930, 8931, 8932, 8933, 8934, 8935, 8936, 8937, 8938, 8939, 8940, 8941, 8942, 8943, 8944, 8945, 8946, 8947, 8948, 8949, 8950, 8951, 8952, 8953, 8954, 8955, 8956, 8957, 8958, 8959, 8960, 8961, 8962, 8963, 8964, 8965, 8966, 8967, 8968, 8969, 8970, 8971, 8972, 8973, 8974, 8975, 8976, 8977, 8978, 8979, 8980, 8981, 8982, 8983, 8984, 8985, 8986, 8987, 8988, 8989, 8990, 8991, 8992, 8993, 8994, 8995, 8996, 8997, 8998, 8999, 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9034, 9035, 9036, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041, 9042, 9043, 9044, 9045, 9046, 9047, 9048, 9049, 9050, 9051, 9052, 9053, 9054, 9055, 9056, 9057, 9058, 9059, 9060, 9061, 9062, 9063, 9064, 9065, 9066, 9067, 9068, 9069, 9070, 9071, 9072, 9073, 9074, 9075, 9076, 9077, 9078, 9079, 9080, 9081, 9082, 9083, 9084, 9085, 9086, 9087, 9088, 9089, 9090, 9091, 9092, 9093, 9094, 9095, 9096, 9097, 9098, 9099, 9100, 9101, 9102, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9115, 9116, 9117, 9118, 9119, 9120, 9121, 9122, 9123, 9124, 9125, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9131, 9132, 9133, 9134, 9135, 9136, 9137, 9138, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9150, 9151, 9152, 9153, 9154, 9155, 9156, 9157, 9158, 9159, 9160, 9161, 9162, 9163, 9164, 9165, 9166, 9167, 9168, 9169, 9170, 9171, 9172, 9173, 9174, 9175, 9176, 9177, 9178, 9179, 9180, 9181, 9182, 9183, 9184, 9185, 9186, 9187, 9188, 9189, 9190, 9191, 9192, 9193, 9194, 9195, 9196, 9197, 9198, 9199, 9200, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9210, 9211, 9212, 9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9219, 9220, 9221, 9222, 9223, 9224, 9225, 9226, 9227, 9228, 9229, 9230, 9231, 9232, 9233, 9234, 9235, 9236, 9237, 9238, 9239, 9240, 9241, 9242, 9243, 9244, 9245, 9246, 9247, 9248, 9249, 9250, 9251, 9252, 9253, 9254, 9255, 9256, 9257, 9258, 9259, 9260, 9261, 9262, 9263, 9264, 9265, 9266, 9267, 9268, 9269, 9270, 9271, 9272, 9273, 9274, 9275, 9276, 9277, 9278, 9279, 9280, 9281, 9282, 9283, 9284, 9285, 9286, 9287, 9288, 9289, 9290, 9291, 9292, 9293, 9294, 9295, 9296, 9297, 9298, 9299, 9300, 9301, 9302, 9303, 9304, 9305, 9306, 9307, 9308, 9309, 9310, 9311, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9317, 9318, 9319, 9320, 9321, 9322, 9323, 9324, 9325, 9326, 9327, 9328, 9329, 9330, 9331, 9332, 9333, 9334, 9335, 9336, 9337, 9338, 9339, 9340, 9341, 9342, 9343, 9344, 9345, 9346, 9347, 9348, 9349, 9350, 9351, 9352, 9353, 9354, 9355, 9356, 9357, 9358, 9359, 9360, 9361, 9362, 9363, 9364, 9365, 9366, 9367, 9368, 9369, 9370, 9371, 9372, 9373, 9374, 9375, 9376, 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9388, 9389, 9390, 9391, 9392, 9393, 9394, 9395, 9396, 9397, 9398, 9399, 9400, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9407, 9408, 9409, 9410, 9411, 9412, 9413, 9414, 9415, 9416, 9417, 9418, 9419, 9420, 9421, 9422, 9423, 9424, 9425, 9426, 9427, 9428, 9429, 9430, 9431, 9432, 9433, 9434, 9435, 9436, 9437, 9438, 9439, 9440, 9441, 9442, 9443, 9444, 9445, 9446, 9447, 9448, 9449, 9450, 9451, 9452, 9453, 9454, 9455, 9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461, 9462, 9463, 9464, 9465, 9466, 9467, 9468, 9469, 9470, 9471, 9472, 9473, 9474, 9475, 9476, 9477, 9478, 9479, 9480, 9481, 9482, 9483, 9484, 9485, 9486, 9487, 9488, 9489, 9490, 9491, 9492, 9493, 9494, 9495, 9496, 9497, 9498, 9499, 9500, 9501, 9502, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508, 9509, 9510, 9511, 9512, 9513, 9514, 9515, 9516, 9517, 9518, 9519, 9520, 9521, 9522, 9523, 9524, 9525, 9526, 9527, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533, 9534, 9535, 9536, 9537, 9538, 9539, 9540, 9541, 9542, 9543, 9544, 9545, 9546, 9547, 9548, 9549, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9556, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567, 9568, 9569, 9570, 9571, 9572, 9573, 9574, 9575, 9576, 9577, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592, 9593, 9594, 9595, 9596, 9597, 9598, 9599, 9600, 9601, 9602, 9603, 9604, 9605, 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 9619, 9620, 9621, 9622, 9623, 9624, 9625, 9626, 9627, 9628, 9629, 9630, 9631, 9632, 9633, 9634, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 9641, 9642, 9643, 9644, 9645, 9646, 9647, 9648, 9649, 9650, 9651, 9652, 9653, 9654, 9655, 9656, 9657, 9658, 9659, 9660, 9661, 9662, 9663, 9664, 9665, 9666, 9667, 9668, 9669, 9670, 9671, 9672, 9673, 9674, 9675, 9676, 9677, 9678, 9679, 9680, 9681, 9682, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9688, 9689, 9690, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9698, 9699, 9700, 9701, 9702, 9703, 9704, 9705, 9706, 9707, 9708, 9709, 9710, 9711, 9712, 9713, 9714, 9715, 9716, 9717, 9718, 9719, 9720, 9721, 9722, 9723, 9724, 9725, 9726, 9727, 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734, 9735, 9736, 9737, 9738, 9739, 9740, 9741, 9742, 9743, 9744, 9745, 9746, 9747, 9748, 9749, 9750, 9751, 9752, 9753, 9754, 9755, 9756, 9757, 9758, 9759, 9760, 9761, 9762, 9763, 9764, 9765, 9766, 9767, 9768, 9769, 9770, 9771, 9772, 9773, 9774, 9775, 9776, 9777, 9778, 9779, 9780, 9781, 9782, 9783, 9784, 9785, 9786, 9787, 9788, 9789, 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809, 9810, 9811, 9812, 9813, 9814, 9815, 9816, 9817, 9818, 9819, 9820, 9821, 9822, 9823, 9824, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 9833, 9834, 9835, 9836, 9837, 9838, 9839, 9840, 9841, 9842, 9843, 9844, 9845, 9846, 9847, 9848, 9849, 9850, 9851, 9852, 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9859, 9860, 9861, 9862, 9863, 9864, 9865, 9866, 9867, 9868, 9869, 9870, 9871, 9872, 9873, 9874, 9875, 9876, 9877, 9878, 9879, 9880, 9881, 9882, 9883, 9884, 9885, 9886, 9887, 9888, 9889, 9890, 9891, 9892, 9893, 9894, 9895, 9896, 9897, 9898, 9899, 9900, 9901, 9902, 9903, 9904, 9905, 9906, 9907, 9908, 9909, 9910, 9911, 9912, 9913, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9924, 9925, 9926, 9927, 9928, 9929, 9930, 9931, 9932, 9933, 9934, 9935, 9936, 9937, 9938, 9939, 9940, 9941, 9942, 9943, 9944, 9945, 9946, 9947, 9948, 9949, 9950, 9951, 9952, 9953, 9954, 9955, 9956, 9957, 9958, 9959, 9960, 9961, 9962, 9963, 9964, 9965, 9966, 9967, 9968, 9969, 9970, 9971, 9972, 9973, 9974, 9975, 9976, 9977, 9978, 9979, 9980, 9981, 9982, 9983, 9984, 9985, 9986, 9987, 9988, 9989, 9990, 9991, 9992, 9993, 9994, 9995, 9996, 9997, 9998, 9999, 10000	Menetapkan : KERATU : Pelatihan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan bagi pelaku usaha mikro. KEDUA : Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KERATU berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). KETIGA : Kegiatan pelatihan diumumkan melalui website dinas, media sosial, asosiasi pelaku usaha dan anggota forum komunikasi UMKM. KEMPAT : Pelaku usaha mikro mendaftar dan melakukan registrasi ulang kepada panitia/tim penyelenggara kegiatan. KELIMA : Pelatihan yang berasal dari Program Usulan Partisipasi Masyarakat (PUPM) dan Paket Paket Dewan (POKR) calon peserta diusulkan oleh desa/kaparewon yang mengusulkan dengan ketentuan sebagai berikut: - Calon peserta termasuk penyandang disabilitas ringan, keluarga miskin, dan rentan miskin. - Jumlah calon peserta yang diusulkan adalah sebanyak luasan peserta pelatihan ditambah 20% untuk peserta cadangan. KEENAM : Tim Penyelenggara Kegiatan melakukan seleksi administrasi untuk memilih dan menentukan peserta berdasarkan kriteria yang ada. KETUJUH : Penerimaan Peserta Pelatihan: - Pelaku Usaha Mikro
--	--

Adapun jumlah KK Miskin yang terfasilitasi dalam kegiatan bimtek yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.6.2 1 Jumlah KK Miskin yang Mengikuti Pelatihan Tahun 2025 (Minta Mb Rina)

No	Sub kegiatan	Keluaran	Peserta	Penerima Manfaat 10% KK Miskin	Lokasi
1	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Workshop Forum Komunikasi UMKM Kapanewon	750	192	Prambanan, Seyegan, Turi, Depok, Moyudan, dan Pakem
2	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Bimtek Digital Marketing Tingkat Lanjut	160	26	Kapanewon Prambanan dan Turi
		Bimtek Sleman Mart	150	18	Kabupaten Sleman
3	Penyusunan Basis Data	Bimtek Kewirausahaan	855	114	Kabupaten Sleman

4	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Magang Internship	10	10	KSPPS LKM Kube Sejahtera 091, KSPPS Kube Sejahtera 052, dan KSPPS BMT Insan Mandiri Sejahtera
		Jumlah	1.925	360	

5) Dampak

Dampak positif/kemanfaatan atas upaya mendukung pengentasan kemiskinan adalah:

- Meningkatkan jumlah masyarakat yang berwirausaha baru,
- Mendukung pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan,
- Mendukung pencapaian IKU untuk indikator Rasio Pelaku Usaha Mikro dan Rasio Keanggotaan Koperasi



Pengukuran atas upaya dalam pengentasan kemiskinan melalui capaian indikator rasio pelaku usaha diharapkan dapat menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Secara internal peningkatan capaian indikator sasaran pengentasan kemiskinan juga menjadi pengukuran capaian Indikator Kinerja Daerah. Hasil pengukuran disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6.2.4. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dan 2025

No	Tujuan	Indikator	Target		Realisasi	
			2024	2025	2024	2025
1	Meningkatkan Kinerja Kelembagaan Ekonomi Lokal	Rasio pelaku Usaha Mikro	14%	14,10%	13,99%	15,20%
		Rasio keanggotaan koperasi	22,5	22,50	21,26	23,57

Hasil perbandingan antara jumlah pelaku usaha mikro dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif pada tahun 2025 sebesar 15,20% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 13,99%. Sedangkan untuk jumlah anggota koperasi dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif sebesar 23,57% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 21,26%. Hal ini menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja yang meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan adanya peningkatan tersebut, diharapkan dapat mendukung program pengentasan kemiskinan.

3.6.3. Peningkatan Investasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman melalui program dan kegiatan turut mendukung tema prioritas nasional “Peningkatan Investasi” melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1) Kebijakan

Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman dalam rangka mendukung peningkatan investasi sesuai dengan rencana strategi kebijakan yaitu:

- a. Memperluas pangsa pasar UMKM dengan mendorong terciptanya kerja sama konkret antara UMKM dengan pelaku usaha menengah/besar yang berdampak langsung terhadap peningkatan investasi di daerah;
- b. Menyiapkan produk UMKM berkualitas yang banyak dibutuhkan oleh investor/pelaku usaha menengah/besar dalam menjalankan kegiatan usahanya, dan

- c. Memberikan pendampingan pengembangan gerai KDMP yang berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat.

2) Program/Kegiatan/subkegiatan yang mendukung/berkaitan/beririsan dengan upaya Peningkatan Investasi sebagai berikut:

Tabel 3.6.3.1. Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Mendukung Upaya Peningkatan Investasi

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Pemberdayaan Umkm	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan berupa pendampingan pembentukan badan hukum KDMP.
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan kegiatan pendidikan bagi pengurus KDMP salah satunya dalam pengembangan gerai KDMP.

3) Alokasi/dukungan anggaran dan prosentase terhadap anggaran Dinas

Alokasi/dukungan anggaran dalam rangka peningkatan investasi terdapat pada sub kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro, Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6.3 2 Alokasi Anggaran Program yang Mendukung Peningkatan Investasi Tahun 2025

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	%
Program Pemberdayaan Umkm			
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	633.147.742,00	4,01%
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam			
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	412.722.200,00	2,62%
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian			
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	844.138.850,00	5,35%
Total Anggaran Dinas Koperasi UKM	15.779.184.920		

4) Inovasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman dalam rangka mendukung Peningkatan Investasi melakukan berbagai kegiatan yaitu:

- Penyusunan dan pelaksanaan program yang mempertemukan pelaku UMKM dengan berbagai mitra strategis (instansi pemerintah, BUMN/BUMD, swasta, dan asosiasi usaha),
- Penyediaan forum komunikasi dan negosiasi yang terbuka bagi pelaku usaha untuk mempresentasikan produk, kebutuhan, dan peluang kerja sama.
- Pemberian pendampingan dan konsultasi usaha oleh narasumber atau lembaga terkait dalam bidang pemasaran, distribusi, pembiayaan, dan manajemen bisnis,
- Penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan kerja sama pasca kegiatan, termasuk tindak lanjut terhadap potensi investasi yang muncul, dan
- Pendampingan pengurusan badan hukum KDMP.

Gambar 3.6.3.1. Pendampingan Pengurusan Badan Hukum KDMP



5) Dampak/kemanfaatan

Dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan, pada tahun 2025 telah terbentuk 86 KDMP di setiap kalurahan. Masing-masing KDMP memiliki 7 gerai yang teridi dari:

- Sembako
- Klinik

- Apotek
- Pergudangan/cold storage
- Simpan pinjam
- Kantor
- Usaha lain sesuai dengan kondisi setempat

Saat ini sudah terdapat 19 KDMP dengan 133 gerai yang sudah berjalan usahanya. Sedangkan untuk anggota 86 KDMP mencapai 1.826 orang. Sedangkan untuk kegiatan temu mitra, telah terjalin 10 kerja sama antara UMKM dengan mitra yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6.3.3. Kerja Sama yang Mendukung Peningkatan Investasi Tahun 2025

No	Nama Pelaku Usaha/UMKM	Nama Usaha	Produk	Kapanewon	Mitra	Skema Kerjasama
1	Harpanto	Aysnack	Peyek, Kering Kentang	Moyudan	RS Panti Nugroho	Konsinyasi
2	Winarto	Sambel Pecel Handayani	Sambel Pecel & Telur Asin	Depok	Manna Kampus	Konsinyasi
3	Erna purwaningsih	Latifah Family	Olahan Salak	Sleman	- Progo - Amanda - Kenes	Konsinyasi
4	Yani Astuti	MoCiez	Puding	Depok	Manna Kampus	Konsinyasi
5	Normalia Wijayanti	Fadhil Food	Brownies, Snack & Nasi Box	Turi	RSUD Sleman	Konsinyasi
6	Nurul Hidayah	Niswa anggrek	Tanaman Hias	Gamping	RS Sardjito	Konsinyasi
7	Sapto Hadi Puspito	Kopi YOJO	Kopi	Berbah	Manna Kampus	Konsinyasi
8	Elva Yunita	Kazbira Bumbu Instan	Bumbu Instan	Ngemplak	Manna Kampus	Konsinyasi
9	Aan Permana	Chipsve	8 Macam Keripik	Prambanan	- Hotel Grand Keisha - Bakpia Jiwa Jogja	Konsinyasi
10	Reni haryati	Chorry family	Sagon kress dan stik sukun	Turi	- Hamzah Batik - Kenes - Heha Ocean	Konsinyasi

Selain dampak positif untuk eksternal, kegiatan temu mitra dan pendampingan pengembangan gerai KDMP juga mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama yang selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6.3.4. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dan 2025

No	Tujuan	Indikator	Target		Realisasi	
			2024	2025	2024	2025
1	Meningkatkan Kinerja Kelembagaan Ekonomi Lokal	Rasio Kewirausahaan Daerah	-	4,74%	-	4,77%
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	-	2,38	-	2,68

Realisasi indikator Rasio Kewirausahaan Daerah sebesar 4,77% dari target sebesar 4,74% atau capaian kinerja sebesar 100,64%. Sedangkan indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB sebesar 2,68% dari target sebesar 2,38% atau capaian kinerja sebesar 112,61%. Hal ini menunjukkan adanya pergerakan roda perekonomian ke arah yang positif.

3.6.4. Ketahanan Pangan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman melalui program dan kegiatan turut mendukung tematik Reformasi Birokrasi “Ketahanan Pangan” melalui beberapa aspek sebagai berikut:

1) Kebijakan

- a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman dalam rangka mendukung ketahanan pangan sesuai dengan rencana strategi kebijakan yaitu percepatan pembentukan KDMP di 86 Kalurahan yang salah satunya memiliki usaha gerai di bidang pangan, yaitu distribusi sembako.
- b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman dalam rangka mendukung ketahanan pangan dari sektor industri pangan memfasilitasi pelatihan untuk pengolahan bahan pangan dan pengemasannya.

2) Program/Kegiatan/subkegiatan yang mendukung/berkaitan/beririsan dengan upaya Ketahanan Pangan sebagai berikut:

Tabel 3.6.4.1. Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Mendukung Ketahanan Pangan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Pemberdayaan Umkm	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro salah satunya dengan bimtek olahan pangan dan kemasan.
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan berupa pendampingan pembentukan badan hukum KDMP.
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan kegiatan pendidikan bagi pengurus KDMP salah satunya dalam pengembangan gerai sembako KDMP.

3) Alokasi/dukungan anggaran dan prosentase terhadap anggaran Dinas

Alokasi/dukungan anggaran dalam rangka ketahanan pangan terdapat pada sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan kegiatan pendidikan bagi pengurus KDMP yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6.4.2. Alokasi Anggaran Program yang Mendukung Ketahanan Pangan Tahun 2025

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	%
Program Pemberdayaan Umkm			
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	886.946.892,00	5,62%
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam			

Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	412.722.200,00	2,62%
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian			
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	844.138.850,00	5,35%
Total Anggaran Dinas Koperasi UKM	15.779.184.920		

4) Inovasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman dalam rangka mendukung Ketahanan Pangan, salah satunya melakukan pendampingan dalam pembentukan gerai pangan KDMP. Saat ini terdapat salah satu KDMP, yaitu KDMP Sidomulyo Godean yang dalam menjalankan usaha gerai sembakonya telah bekerjasama dengan Gapoktan Sidomulyo dalam rangka memperluas pasar distribusi beras Sleman di Kabupaten Sleman.

Beras merupakan salah satu komoditas bahan pokok masyarakat yang perlu dijaga produksi dan distribusinya untuk menjaga stabilisasi harga komoditas tersebut. Beras juga memiliki andil dalam tingkal inflasi daerah.

Gambar 3.6.4.1. Contoh Inovasi



5) Dampak/kemanfaatan

Gerei pangan yang dikembangkan dalam KDMP sangat membantu dalam distribusi bahan pokok dan penting kepada masyarakat dan memperluas cakupan layanan gapoktan yang bekerjasama dengan KDMP. Selain dampak positif untuk eksternal, kegiatan pengembangan gerai pangan KDMP juga mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama yang selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6.4.3. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024 dan 2025

No	Tujuan	Indikator	Target		Realisasi	
			2024	2025	2024	2025
1	Meningkatkan Kinerja Kelembagaan Ekonomi Lokal	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	-	2,38	-	2,68

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB sebesar 2,68% dari target sebesar 2,38% atau capaian kinerja sebesar 112,61%. Hal ini menunjukkan adanya pergerakan roda perekonomian ke arah yang positif.

3.6.5. Hilirisasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman melalui program dan kegiatan turut mendukung tematik Reformasi Birokrasi “Hilirisasi” melalui beberapa aspek sebagai berikut:

1) Kebijakan

Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman dalam rangka mendukung hilirisasi sesuai dengan rencana strategi kebijakan yaitu:

- Menyediakan wadah promosi online untuk produk UMKM dalam rangka meningkatkan promosi dan pemasaran UMKM serta memperluas pangsa pasar UMKM,
- Memberikan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM untuk peningkatan kemampuan pemasaran produk melalui *digital marketing*, dan
- Menyediakan gedung pelayanan terpadu (PLUT KUKM) untuk pembinaan dan pelatihan bagi koperasi dan UMKM.

2) Program/Kegiatan/subkegiatan yang mendukung/berkaitan/beririsan dengan upaya Ketahanan Pangan sebagai berikut:

Tabel 3.6.5.1. Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Mendukung Upaya Peningkatan Investasi

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Pemberdayaan Umkm	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi, Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

3) Alokasi/dukungan anggaran dan prosentase terhadap anggaran Dinas

Alokasi/dukungan anggaran dalam rangka mendukung hilirisasi pada Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro sebesar Rp. 309.249.100,00 atau sebesar 4,01% dan Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sebesar Rp3.074.211.325,00 atau 19,48% dari total Anggaran sebesar Rp. 15.779.184.920 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6.5.3. Alokasi Anggaran Program yang Mendukung Peningkatan Investasi Tahun 2025

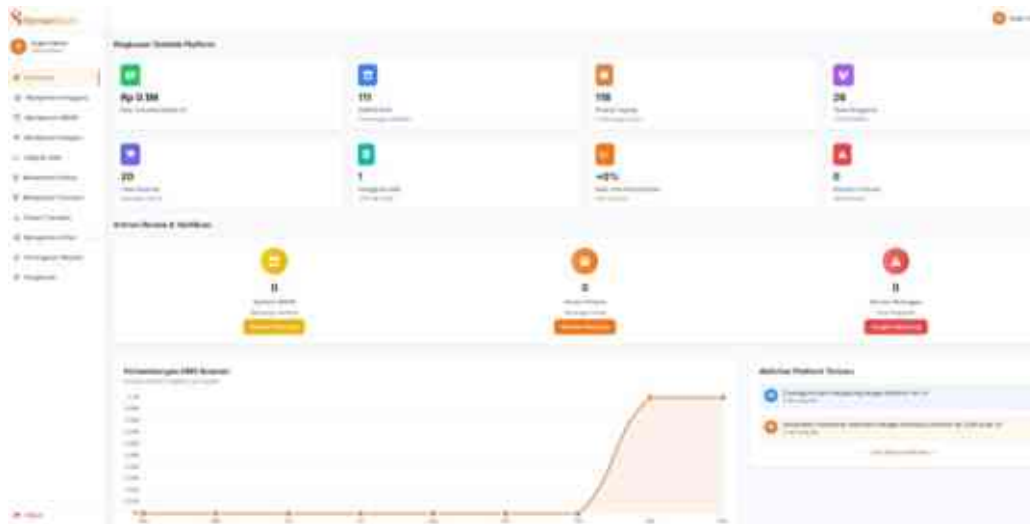
Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	%
Program Pemberdayaan Umkm			
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	633.147.742,00	4,01%
Program Pengembangan Umkm			
Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	3.074.211.325,00	19,48%
Total Anggaran Dinas Koperasi UKM		15.779.184.920	

4) Inovasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman dalam rangka mendukung Hilirisasi melakukan pengembangan terhadap aplikasi Sleman Mart. Pengembangan ini dilakukan agar melalui aplikasi tersebut konsumen

dapat melakukan transaksi pembelian yang terhubung ke UMKM secara langsung. Pengembangan ini juga menampilkan fitur yang lebih menarik, mudah diakses, dan terdapat menu rekap bagi admin sebagai media monitoring dan evaluasi. Saat ini terdapat 111 UMKM yang terdaftar dalam Sleman Mart dengan jumlah produk 118 produk UMKM Sleman.

Gambar 3.6.5.1. Contoh UMKM Yang Terdaftar Dalam Sleman Mart



Selain itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman juga membangun gedung PLUT KUKM sebagai tempat layanan terpadu bagi koperasi dan umkm.



5) Dampak/kemanfaatan

Pengukuran atas upaya dalam hilirisasi melalui capaian indikator rasio kewirausahaan daerah dan rasio pelaku usaha mikro menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi wirausaha dengan beroperasinya kegiatan pelatihan di PLUT KUKM dan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dengan adanya perluasan pemasaran dan pangsa

pasar. Secara internal, dampak positif dirasakan dalam pencapaian Indikator Kinerja Daerah yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6.5.3. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 dan 2024

No	Tujuan	Indikator	Target		Realisasi	
			2024	2025	2024	2025
1	Meningkatkan Kinerja Kelembagaan Ekonomi Lokal	Rasio Kewirausahaan Daerah	-	4,74%	-	4,77%
		Rasio pelaku Usaha Mikro	14%	14,10%	13,99%	15,20%

Hasil perbandingan antara jumlah pelaku usaha dibantu buruh tetap dengan total angkatan kerja dengan target 4,74% tercapai 4,77% atau sebesar 100,64%. Sedangkan hasil perbandingan jumlah pelaku usaha mikro dengan penduduk usia produktif dengan target sebesar 14,10% terealisasi sebesar 15,20% atau 107,80%. Rasio pelaku usaha mikro naik dari capaian tahun 2024 yaitu 13,99% menjadi 15,20% di tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelaku usaha mikro pada usia produktif yang juga berdampak positif pada peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.

3.7 Publikasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka mempromosikan aplikasi Sleman Mart kepada masyarakat umum telah mempublikasikan web marketplace Sleman Mart dalam Koran Merapi dengan segmen pembaca di DIY. Hal ini dilakukan untuk mengenalkan dan lebih mendekatkan produk UMKM Sleman ke masyarakat DIY.

Selain web marketplace Sleman Mart, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga mempublikasikan kegiatan Natasembada yaitu penghargaan bagi forum komunikasi UMKM yang inovatif pada Koran Kedaulatan Rakyat. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan motivasi dan mempererat komunitas tersebut dalam pengembangan UMKM.

Selain kedua kegiatan tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga mempublikasikan berbagai kegiatan UMKM dan Koperasi pada publikasi online di Radar, Kedaulatan Rakyat, Baca Jogja, Hariane, Tribun, Harjo, dan lainnya.



3.8 Penghargaan

Dinas Koperasi dan UKM pada tahun 2025 mendapat penghargaan Public Services with IMPACT Award 2025 DIY yang diselenggarakan oleh MarkPlus Institute. Dalam penghargaan ini, Dinas Koperasi UKM mendapat apresiasi atas berbagai inovasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM seperti; pengembangan Satu Data UMKM dan pengembangan Sleman Mart sebagai web marketplace.



3.9 Manfaat/Outcome

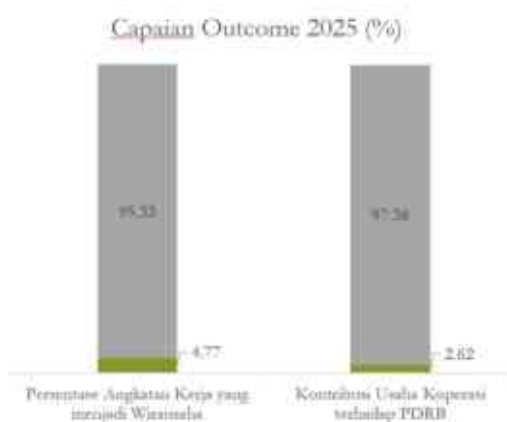
Bidang Koperasi dan UMKM memiliki peran dalam perekonomian daerah. Hal ini ditunjukkan dengan volume usaha koperasi yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Sleman dan pelaku usaha mikro terhadap penduduk usia produktif.

Volume usaha koperasi merupakan nilai seluruh transaksi ekonomi yang dilakukan koperasi pada tahun 2025 yang mencakup penjualan barang/jasa, simpan pinjam, dan kegiatan ekonomi lainnya, yang mencerminkan skala aktivitas dan kinerja ekonomi koperasi secara keseluruhan.

Volume usaha koperasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan perekonomian, baik tingkat mikro maupun makro. Peningkatan volume penjualan/jasa meningkatkan pendapatan, laba anggota dan berkontribusi terhadap PDRB. Hal ini tentunya akan berdampak positif **pada aktivitas perekonomian daerah.**

Sedangkan pelaku usaha mikro adalah individu atau badan usaha perorangan yang menjalankan usaha produktif berskala mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **Pelaku usaha mikro** bertindak sebagai **penyerap tenaga kerja** yang dapat menciptakan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, peningkatan pendapatan, serta inovasi berbasis digital/kreatif. Usaha mikro yang berkembang pesat **membantu menyerap penduduk usia produktif**, sehingga **mengurangi pengangguran dan tingkat kemiskinan daerah.**

Gambar 3.9.1. Capaian Outcome 2025



BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Tahun 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran atas capaian kinerja Tahun 2025 guna mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang menyertainya. Selain itu LKjIP merupakan pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengukuran terhadap kinerja tujuan dan sasaran tahun 2025 disimpulkan bahwa:

1. Capaian kinerja berdasarkan RPJMD Tahun 2021 – 2025

Berdasarkan Renstra Tahun 2021– 2026, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki 2 tujuan dan 3 sasaran yang terdiri dari 5 indikator kinerja. Realisasi kinerja atas tujuan dan sasaran tersebut meliputi: **capaian kinerja $\geq 95\%$ sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran atau 75% dari total capaian kinerja; dan capaian kinerja $< 80\%$ sebanya 1 sasaran atau sebesar 25% dari total capaian kinerja.** Hal ini dikarenakan **pendataan pelaku usaha mikro dalam Satu Data UMKM pada bulan Agustus 2025 sedang dilakukan updating (validasi).**

2. Capaian kinerja berdasarkan RPJMD Tahun 2025– 2029

Berdasarkan Renstra Tahun 2025– 2029, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki 1 tujuan dan 3 sasaran yang terdiri dari 6 indikator kinerja. Realisasi kinerja atas tujuan dan sasaran tersebut meliputi: capaian kinerja $\geq 95\%$ sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran atau 100% dari total capaian kinerja. Hal ini menunjukkan **capaian kinerja Tahun 2025 seluruhnya mampu memenuhi target tujuan dan sasaran tahun 2025** berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Artinya, terjadi peningkatan kinerja kelembagaan ekonomi lokal melalui meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, berkembangnya usaha koperasi dan berkembangnya UMKM di Kabupaten Sleman.

3. Realisasi anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.779.184.920,00 dari total anggaran sebesar Rp15.251.001.053,46 atau capaian kinerja keuangan sebesar 96,65%. **Capaian kinerja keuangan sebesar 96,65% tahun anggaran 2025 meningkat 5,85% dari capaian keuangan tahun anggaran 2024** sebesar 90,80%. Capaian kinerja keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah **menduduki peringkat teratas (peringkat 1)** dalam kinerja keuangan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman.
4. Dinas Koperasi dan UKM pada tahun 2025 mendapat penghargaan Public Services with IMPACT Award 2025 DIY yang diselenggarakan oleh MarkPlus Institute

Berdasarkan hasil laporan di atas, perbaikan tetap perlu dilakukan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan antara lain:

1. Dari sisi perencanaan perlu adanya peningkatan target indikator kinerja karena capaian indikator kinerja pada tahun 2025 telah mencapai 100%,
2. Perlu penyesuaian sub kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan khususnya dalam pengembangan Usaha Mikro, dan
3. Perlu penyesuaian target sub kegiatan yang lebih tinggi melihat capaian kinerja sub kegiatan TA 2025 dalam beberapa sub kegiatan memiliki deviasi yang cukup tinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 diharapkan mampu menggambarkan capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025, selain itu diharapkan LKjIP ini sebagai acuan dalam peningkatan kinerja di periode yang akan datang.

4.2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2024

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman tahun 2024 yang telah dilaksanakan penilaiannya oleh Inspektorat Kabupaten Sleman **memperoleh nilai sebesar 83,60 dengan predikat A kategori memuaskan.**

Tabel 4.2.1. Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP

No	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progress Penyelesaian
1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah agar meningkatkan Target Indikator Kinerja Utama dan target Perjanjian Kinerja yang belum tercapai	1. melakukan perubahan indikator kinerja utama disesuaikan dengan kondisi yang relevan 2. meningkatkan Target Indikator Kinerja Utama 3. melakukan evaluasi berkala dalam pencapaian target IKU	2025 - 2029	2025 - 2029	Sekretariat dan Bidang Perangkat Daerah	1. perubahan indikator kinerja utama beserta peningkatan targetnya dituangkan dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025-2029 2. melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pada minggu pertama setiap bulan

4.3 Langkah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Masa Mendatang

4.3.1 Pelayanan Akses Permodalan UMKM melalui Dana Penguatan Modal

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 54.2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dapat menerbitkan rekomendasi bagi UMKM yang akan mengakses Dana Penguatan Modal.

Sebagai salah satu **upaya mitigasi resiko** dan dalam rangka **memberikan pedoman bagi tim teknis** Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk menerbitkan rekomendasi pengajuan Dana Penguatan Modal, telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Nomor 86/Kep.DinKopUKM/2025 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Rekomendasi Pengajuan Dana Penguatan Modal Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sleman. Dalam regulasi tersebut memuat **kriteria, kertas kerja kelayakan, dan mekanisme pengajuan rekomendasi untuk meminimalisir resiko angsuran yang tidak lancar yang dapat merugikan daerah.**

[illegible]

4.3.2 Penyesuaian Sub Kegiatan

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada masa mendatang, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah melakukan evaluasi atas perencanaan dinas yang dituangkan dalam sub kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, telah diusulkan penyesuaian sub kegiatan untuk tahun 2027 dan seterusnya. Penyesuaian ini baru dapat dilaksanakan pada tahun 2027 dikarenakan penganggaran tahun 2026 telah dilaksanakan pada awal tahun 2025.

Adapun penyesuaian sub kegiatan tersebut meliputi:

1. Menghapus sub kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro. Hal ini dilakukan karena kegiatan fasilitasi pelayanan perizinan dapat diakomodir pada sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. Hal ini dilakukan sebagai upaya **efisiensi sub kegiatan agar tercipta minim sub kegiatan namun kaya dampak/kemanfaatannya.**
2. **Menambah sub kegiatan Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro.** Sub kegiatan ini diperlukan untuk mewadahi kegiatan penumbuhan wirausaha. Hal ini **selaras dengan upaya pencapaian IKU dengan indikator Rasio Pelaku Usaha Mikro.** Dengan adanya sub kegiatan ini diharapkan dapat lebih fokus dalam menumbuhkan wirausaha baru di Kabupaten Sleman.
3. Menambah sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan. Sub kegiatan ini diperlukan untuk mewadahi kegiatan bimtek usaha yang **berfokus pada peningkatan skill UMKM dalam berproduksi.**
4. Menambah sub kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil. Hal ini dikarenakan **mulai tahun 2027 fasilitasi HAKI untuk UMKM yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bappeda akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.**

Penyesuaian sub kegiatan ini telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Adapun rencana pemilihan sub kegiatan yang mendukung tercapainya *output* dan *outcome* dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Sub Kegiatan	Kinerja	Bentuk Kegiatan yang Direncanakan
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	- Satu data UMKM - Monev pengembangan UMKM
Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	- Inti plasma untuk menumbuhkan talent champion - Bimtek penumbuhan usaha - Pendampingan Usaha
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	- Fasilitasi rekomendasi Dana Penguatan Modal - Fasilitasi pengurusan Izin Usaha - Pendampingan pengurusan sertifikasi Halal - Pengembangan kompetensi
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	- Fasilitasi pengurusan HAKI
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	- Bimtek SDM - Bimtek Kewirausahaan, - Bimtek Kapasitas - Bimtek Kompetensi - Bimtek usaha
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	- Temu Mitra/Buyer meet seller - Pendampingan Mbiz market
Produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	- Festival UMKM - Sleman Mart - Bimtek Pemasaran - Promosi/Pameran

Goal:

- Perencanaan dan evaluasi pengembangan UM dengan indikator UM Naik Kelas
- Penumbuhan talent champion
- Peningkatan jumlah Usaha Mikro

Goal :

- Penguatan kelembagaan dan skill usaha UMKM

Goal:

- Perluasan pangsa pasar UMKM
- Peningkatan omset UMKM

LAMPIRAN

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja berjenjang;
2. Dokumen perencanaan level perangkat daerah (Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029, RKPD 2025 (batang tubuh regulasi dan *capture* pada bagian yang memuat uraian target perangkat daerah);
3. Matrik TL LHE lengkap;
4. Daftar Prestasi, beserta dokumentasi piagam/sertifikat, dan dokumentasi seremonialnya; dan
5. Tautan ke Paparan SAKIP Perangkat Daerah 2025 yang terbaru.



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. TINA HASTANI, MM

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan

Nama : KUSTINI SRI PURNOMO

Jabatan : Bupati Sleman

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA kedua akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA.

Sleman, 01 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

KUSTINI SRI PURNOMO



PIHAK KESATU,

Dra. TINA HASTANI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700429 199603 2 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2025

1. Tujuan dan Sasaran Kinerja

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (per Triwulan)			
									I	II	III	IV
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah			1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	%	-	-	-	86.28
		1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.	Predikat AKIP	Baik	-	-	-	A
2	Berkembangnya UMKM dan Koperasi			1.	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	1.	Rasio keanggotaan Koperasi	%	-	-	20	22.53
				2.	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian							
				3.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	2.	Rasio pelaku usaha mikro	%	-	-	8	15
		2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi	1.	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	1.	Jumlah Koperasi baru	koperasi	-	-	3	5
				2.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	2.	Persentase peningkatan asset koperasi	%	-	-	0.3	0.5
		3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas UMKM	1.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha mikro	%	-	-	3	5
				2.	Pengembangan UMKM	2.	Peningkatan omset pelaku usaha mikro	%	-	-	0.04	0.05

2. Kegiatan dan Sub Kegiatan Implementasi APBD Tahun 2025

[illegible]

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Penyelesaian				Anggaran (Rp)
									I	II	III	IV	
				13	Fasilitasi Kunjungan Tamu								8,310,000
				14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								66,902,000
				15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								16,947,000
				16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								128,741,200
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								4,221,975
				18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								155,494,900
				19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								740,345,800
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	-	-	-	100	137,420,800
				21	Pemeliharaan Mebel								16,050,000
				22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								39,420,000
				23	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								89,550,000
2	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	7	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	24	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah		Persentase KSP/ USP Koperasi yang memiliki izin	%	-	-	30	34.01	87,752,200

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Penyelesaian				Anggaran (Rp)
									I	II	III	IV	
					Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
3	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	8	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	25	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Koperasi yang aktif	%	-	-	60	79.14	28,871,250
4	Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	9	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase KSP/USP Koperasi sehat	%	-	-	20	28.1	134,235,000
5	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	10	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	27	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Persentase pengelola Koperasi yang bersertifikat	%	-	-	30	37.27	705,916,850
6	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	11	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	28	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%	-	-	10	13.73	199,132,875
7	Pemberdayaan	12	Pemberdayaan	29	Pemberdayaan Melalui		Jumlah	%	-	-	500	740	

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Penyelesaian				Anggaran (Rp)
									I	II	III	IV	
	Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Kemitraan Usaha Mikro		pelaku usaha mikro baru yang berizin						633,147,742
				30	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro								298,114,267
				31	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								949,946,892
				32	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro								1,840,179,002
8	Pengembangan UMKM	13	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	33	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	pelaku usaha	-	-	13	15	3,169,850,325

3. Program dan Anggaran

	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.493.289.417	APBD Tahun 2025
2.	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	87.752.200	APBD Tahun 2025
3.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	28.871.250	APBD Tahun 2025
4.	Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	134.235.000	APBD Tahun 2025
5.	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	705.916.850	APBD Tahun 2025
6.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	199.132.875	APBD Tahun 2025
7.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	3.721.387.903	APBD Tahun 2025
8.	Pengembangan UMKM	3.169.850.325	APBD Tahun 2025
	Jumlah (Rp)	14.540.435.820	

PIHAK KEDUA



KUSTINI SRI PURNOMO



Sleman, 01 Januari 2025

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Sleman



Dra. TINA HASTANI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700429 199603 2 006



**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUTIASIH, S.P., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan

Nama : HARDA KISWAYA

Jabatan : Bupati Sleman

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA kedua akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA.

Sleman, 15 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,



HARDA KISWAYA

PIHAK KESATU,



SUTIASIH, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19670405 199803 2 007

LAMPIRAN PERUBAHAN KETIGA ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2025

1. Tujuan dan Sasaran Kinerja

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Rumus/ Cara Penghitungan	Satuan	Target (per Triwulan)				No	Program Pendukung Indikator Tujuan Sasaran
										I	II	III	IV		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah			1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	%	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dicapai oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Indeks yang diperoleh dari hasil survey kepuasana masyarakat yang digunakan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survey yang sudah ditentukan	%	-	-	-	86.28	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
		1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2	Predikat AKIP	Baik	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil penilaian Kemeterian PAN RB	Baik	-	-	-	A	2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Rumus/ Cara Penghitungan	Satuan	Target (per Triwulan)				No	Program Pendukung Indikator Tujuan Sasaran
										I	II	III	IV		
2	Berkembangnya UMKM dan Koperasi			1	Rasio keanggotaan Koperasi	%	Rasio keanggotaan koperasi adalah perbandingan antara jumlah anggota koperasi dengan jumlah penduduk usia produktif	Jumlah anggota koperasi dibagi jumlah penduduk usia produktif dikalikan seratus	%	-	-	20	22.53	1.	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
														2.	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
				2	Rasio pelaku usaha mikro	%	Rasio pelaku usaha mikro adalah perbandingan antara jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah dengan jumlah penduduk usia produktif pada tahun n	Jumlah pelaku usaha mikro dibagi jumlah penduduk usia produktif dikalikan seratus	%	-	-	8	15	2.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi	1	Jumlah Koperasi baru	koperasi	Koperasi baru adalah koperasi yang terbentuk pada tahun n	Jumlah koperasi baru pada tahun n	koperasi	-	-	3	5	1.	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
				2	Persentase peningkatan aset koperasi	%	Aset koperasi adalah harta koperasi yang diperoleh dalam periode tertentu	Jumlah aset koperasi tahun n dikurangi jumlah aset tahun n-1 dibagi jumlah aset tahun n-1 dikalikan seratus	%	-	-	0.3	0.5	2.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Rumus/ Cara Penghitungan	Satuan	Target (per Triwulan)				No	Program Pendukung Indikator Tujuan Sasaran
										I	II	III	IV		
		3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas UMKM	1	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha mikro	%	Peningkatan jumlah pelaku usaha mikro adalah pertambahan pelaku usaha mikro yang terdata di Dinas Koperasi UKM	Jumlah pelaku usaha mikro tahun n dikurangi jumlah pelaku usaha mikro tahun n-1 dibagi jumlah pelaku usaha mikro tahun n-1 dikalikan 100	%	-	-	3	5	1.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
				2	Peningkatan omset pelaku usaha mikro	%	Peningkatan jumlah omset pelaku usaha mikro adalah pertambahan hasil penjualan pelaku usaha mikro	Jumlah omset tahun n dikurangi jumlah omset tahun n-1 dibagi jumlah omset tahun n-1 dikalikan seratus	%	-	-	0.04	0.05	2.	Pengembangan UMKM

2. Program dan Anggaran

Program		Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.493.289.417	6.891.733.617	Perubahan APBD 2025
2.	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	87.752.200	412.722.200	
3.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	28.871.250	28.871.250	
4.	Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	134.235.000	144.093.000	
5.	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	705.916.850	844.138.850	
6.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	199.132.875	211.632.875	
7.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	3.721.387.903	4.171.781.803	
8.	Pengembangan UMKM	3.169.850.325	3.074.211.325	
Jumlah (Rp)		14.540.435.820	15.779.184.920	

Sleman, 15 Agustus 2025

PIHAK KEDUA



HARDA KISWAYA

PIHAK KESATU



SUTIASIH, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670405 199803 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Istiqomah Tjatur Sulistijaningtyas, ST,MT .
Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. Tina Hastani, MM
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 01 Januari 2025



PIHAK KEDUA,

Dra. Tina Hastani, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19700429 199603 2 006

PIHAK PERTAMA,

Siti Istiqomah Tjatur Sulistijaningtyas,
ST,MT
Pembina Tingkat I, IV/a
NIP 19720602 199003 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN

Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan				Rumus Perhitungan
				I	II	III	IV	
1.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	20%	50%	75%	100%	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah layanan yang seharusnya terpenuhi dikali 100%
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	20%	50%	75%	100%	Jumlah layanan sarpras kerja yang terpenuhi dibagi jumlah layanan sarpras kerja yang seharusnya terpenuhi dikali 100%
		Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan tepat waktu	20%	50%	75%	100%	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun kali 100%
		Administrasi Keuangan Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	20%	50%	75%	100%	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun kali 100%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	20%	50%	75%	100%	Jumlah layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dibagi layanan pengelolaan kepegawaian

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan				Rumus Perhitungan
				I	II	III	IV	
								yang ada kali 100%
		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat dasarana daerah	20%	50%	75%	100%	Jumlah kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas yang seharusnya tersedia kali 100%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum	20%	50%	75%	100%	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum yang seharusnya tersedia kali 100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	20%	50%	75%	100%	Jumlah BMD yang dipeliharaa dibagi Jumlah BMD yang seharusnya a kali 100%

Program		Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Rp 6.493.289.417,00	
		Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 31.332.850,00	
		Administrasi Keuangan Daerah	Rp 4.911.517.442,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 19.159.750,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 348.775.900,00	
		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 900.062.675,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 282.440.800,00	

Sleman, 01 Januari 2025



PIHAK KEDUA,

Dra. Tina Hastani, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19700429 199603 2 006

PIHAK PERTAMA,

Siti Istiqomah Tjatur Sulistijaningtyas,
ST,MT
Pembina Tingkat I, IV/a
NIP 19720602 199003 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Pratika Damayanti, SE, M.E..

Jabatan : Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sleman

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. Tina Hastani, MM

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 01 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

Dra. Tina Hastani, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19700429 199603 2 006

PIHAK PERTAMA,

Dewi Pratika Damayanti, SE, M.E
Pembina, IV/a
NIP 19730623 199803 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN

Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan				Rumus Perhitungan
				I	II	III	IV	
1.	Program Pelayanan izin Usaha Simpan Pinjam		Persentase KSP/USP koperasi yang memiliki izin				34.01%	Jumlah usaha KSP/USP koperasi yang memiliki izin dibagi total KSP/USP yang ada dikalikan 100%
		Penerbitan izin usaha USP untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persentase KSP/USP koperasi yang memiliki izin				34.01%	
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase koperasi yang aktif				79.14%	Jumlah koperasi yang aktif dibagi total jumlah koperasi dikalikan 100%
		Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi, KSP/USP yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persentase koperasi yang aktif				79.14%	Jumlah koperasi yang aktif dibagi total jumlah koperasi dikalikan 100%
3.	Program penilaian Kesehatan KASP/USP koperasi		Persentase KSP/USP koperasi sehat				28.10%	Jumlah KSP/USP dengan predikat sehat dibagi KSP/USP yang dinilai kesehatannya dikalikan 100%
		Penilaian Kesehatan KASP/USP koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatan				75	Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatan
4.	Program Pendidikan dan Latihan Koperasi		Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat				37.27%	Jumlah pengelola koperasi yang bersertifikat dibagi jumlah total pengelola koperasi dikalikan 100%
		Pendidikan dan Latihan koperasi bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat				37.27%	
5.	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi		Persentase peningkatan volume usaha kopereasi				13.73%	Volume usaha koperasi tahun n dikurangi volume usaha koperasi tahun

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan				Rumus Perhitungan
				I	II	III	IV	
								n-1 dibagi volume usaha koperasi tahun n-1 dikalikan 100%
		Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan volume usaha kopereasi				13.73%	

Program		Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1.	Program Pelayanan izin Usaha Simpan Pinjam		Rp	87.752.200,00	
		Penerbitan izin usaha USP untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Rp	87.752.200,00	
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Rp	28.871.250,00	
		Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi, KSP/USP yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Rp	28.871.250,00	
3.	Program penilaian Kesehatan KASP/USP koperasi		Rp	134.235.000,00	
		Penilaian Kesehatan KASP/USP koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Rp	134.235.000,00	
4	Program Pendidikan dan Latihan Koperasi		Rp	705.916.850,00	
		Pendidikan dan Latihan koperasi bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Rp	705.916.850,00	
5.	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi		Rp	199.132.875,00	
		Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Rp	199.132.875,00	

Sleman, 01 Januari 2025

PIHAK KEDUA,



Dra. Tina Hastani, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19700429 199603 2 006

PIHAK PERTAMA,



Dewi Pratika Damayanti, SE, M.E
Pembina, IV/a
NIP 19730623 199803 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni Budiningsih, SE,MSi
Jabatan : Kepala Bidang Usaha Mikro, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sleman

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. Tina Hastani, MM
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 01 Januari 2025

PIHAK KEDUA,



Dra. Tina Hastani, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19700429 199603 2 006

PIHAK PERTAMA,

Sri Wahyuni Budiningsih, SE,M.Si
Pembina, IV/a
NIP 19701109 199703 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN

Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III

Bidang : Usaha Mikro

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Triwulan				Rumus Perhitungan
				I	II	III	IV	
1.	Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah		Jumlah pelaku usaha mikro baru yang berijin				740	Jumlah UM tahun n
		Pemberdayaan UM yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro baru yang berijin				740	Jumlah UM tahun n
2.	Program Pengembangan UMKM		Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha				15	Jumlah wirausaha baru tahun n
		Pengembangan UM dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha				15	Jumlah wirausaha baru tahun n

Program		Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah		Rp 3.721.387.903,00	
		Pemberdayaan UM yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Rp 3.721.387.903,00	
2	Program Pengembangan UMKM		Rp 3.169.850.325,00	
		Pengembangan UM dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil	Rp 3.169.850.325,00	

Sleman, 01 Januari 2025

PIHAK KEDUA,



Dra. Tina Hastani, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19700429 199603 2 006

PIHAK PERTAMA,

Sri Wahyuni Budiningsih, SE,M.Si
Pembina, IV/a
NIP 19701109 199703 2 003



PERUBAHAN KESATU ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Makkia Azmiati, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi pada
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Siti Istiqomah Tjatur Sulistijaningtyas, ST., MT

Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Sleman

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan pencapaian target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 15 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,

SITI ISTIQOMAH TJATUR
SULISTIJANINGTYAS, ST., MT
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19720602 199903 2 005

PIHAK PERTAMA,

CITRA MAKKIA AZMIATI, S.E., M.M.
Penata Tingkat I, III/d
NIP 19850510 201001 2 038

PERUBAHAN KESATU ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN

PK Kepala Subbagian
Bagian : Sekretariat
Subbagian : Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
Tahun Anggaran : 2025

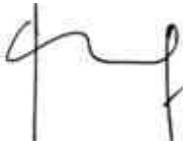
No	Nama Sub Kegiatan	Output	Bobot Output	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (4 Dokumen)	100	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	60	50
				Triwulan IV	40	100
	Jumlah Bobot				100	
2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD (2 Dokumen)	100	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	50	50
				Triwulan IV	50	100
Jumlah Bobot				100		
3.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1) Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (2 Dokumen)	100	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	25	50
				Triwulan IV	15	100
Jumlah Bobot				100		
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (10 Dokumen)	100	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	60	50
				Triwulan IV	40	100
Jumlah Bobot				100		
5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1) Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (32 orang/bulan)	100	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	50	50
				Triwulan IV	50	100
Jumlah Bobot				100		

No	Nama Sub Kegiatan	Output	Bobot Output	Triwulan	Bobot per Triwulan	Target (%)
6.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	1) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD (12 Dokumen)	100	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	50	50
				Triwulan IV	50	100
	Jumlah Bobot				100	
7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (2 Dokumen)	100	Triwulan I	-	-
				Triwulan II	-	-
				Triwulan III	50	50
				Triwulan IV	50	100
	Jumlah Bobot				100	

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 6.561.350,00	
2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 1.792.500,00	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 1.594.500,00	
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 4.357.500,00	
5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4.731.633.067,00	
6.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Rp. 175.352.875,00	
7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 4.531.500,00	
	Jumlah	Rp. 4.925.823.292,00	

Sleman, 15 Agustus 2025

Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sleman,



SITI ISTIQOMAH TJATUR
SULISTIJANINGTYAS, ST., MT
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19720602 199903 2 005

Kepala Subbagian Subbagian Keuangan,
Perencanaan dan Evaluasi,



CITRA MAKKIA AZMIATI, S.E., M.M.
Penata Tingkat I, III/d
NIP 19850510 201001 2 038

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mengimplementasikan pencapaian visi dan misi Kabupaten Sleman dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program kegiatan. Adapun rencana program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Rencana Strategis
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, 2021-2026

Table 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasarn, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir period Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah - Penanggung jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Meningkatnya kualitas pelayanan public perangkat daerah				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	%	84.96	85.83		85.92		86.10		86.19		86.28		86.37			Kasubbag Umum dan Kepegawain	Kab. Sleman	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Predikat APIP		A	A		A		A		A		A		A			Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	Kab. Sleman	
		2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					9.263.966.360		11.221.257.713		11.491.458.359		11.697.519.943		11.915.728.932		12.146.798.421				
		2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	5.543.442.811	100	5.400.530.465	100	5.427.533.117	100	5.454.670.783	100	5.481.944.137	100	5.509.353.858				
				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		100		100		100		100		100					
Berkembangnya UMKM dan Koperasi				Rasio keanggotaan koperasi	%	1	1		1		1		1		1		1					
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi			Jumlah Koperasi Baru	koperasi	5	5		5		5		5		5		5			Bidang Koperasi	Kab. Sleman	
				Persentase peningkatan aset koperasi	%	0,5	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5					
		2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase KSP/ USP koperasi yang memiliki izin	%	11.2	15.41	29.400.000	19.61	29.400.000	23.81	30.628.372	28.01	31.532.102.	32.21	32.496.502	36.41	33.525.170				
		2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang aktif	%	72.68	76.21	33.520.500	76.5	34.071.800	76.78	35.495.367	77.05	36.542.703	77.31	37.660.351	77.57	38.852.479				
		2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Persentase KSP/USP koperasi sehat	%	24.00	14.00	119.070.500	14.75	112.470.700	15.50	117.169.881	16.25	120.627.129	17.00	124.316.473	17.75	128.251.678				

Rencana Strategis
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, 2021-2026

		2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat	%	15.90	19.10	743.647.655	22.31	813.544.665	25.51	847.535.681	28.71	872.543.312	31.91	899.229.782	35.11	927.694.665				
		2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%	23.46	1.70	771.491.600	1.70	477.019.172	1.70	496.949.689	1.70	511.612.830	1.70	527.260.352	1.70	543.950.640				
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas UMKM			Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha mikro	%	64.88*)	5		5		5		5		5		5			Bidang Usaha Mikro	Kab. Sleman	
				Peningkatan omset pelaku usaha mikro	%	-29,89	0,05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05					
		2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pelaku usaha mikro yang berizin (IUMK/NIB)	%	8	8	1.512.997.994	11	3.519.109.964	13	3.666.143.221	17	3.774.317.495	21	3.889.753.842	27	4.012.882.979				
		2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase wirausaha baru	%	65	65	510.395.300	70	835.110.947	75	870.003.082	75	895.673.591	80	923.067.494	80	952.286.953				

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021- 2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan , capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Koperasi dan UKM dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Koperasi dan UKM harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Sleman, Dinas Koperasi dan UKM berkontribusi untuk mewujudkan misi ke 1, yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan Misi ke 3, yaitu: Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan.

Indikator kinerja dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021-2026 merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam mendukung pencapaian visi misi Kabupaten Sleman dalam melaksanakan program-program selama kurun waktu tahun 2021-2026. Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian output dan outcome program Dinas Koperasi dan UKM yang menjadi indikator pada RPJMD. Adapun rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Koperasi dan UKM yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan diperlukan sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 2029;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2025-2029.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sleman.
5. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

- (1) Renstra PD memuat strategi pembangunan Perangkat Daerah, arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV	: PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V	: PENUTUP
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 16 September 2025



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 16 September 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 51

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM

Tujuan Renstra Dinas Koperasi dan UKM 2025-2029 memperhatikan sasaran dari RPJMD Kabupaten Sleman dan NSPK. Tujuan dari Dinas Koperasi berbentuk kondisi ideal dari suatu ruang lingkup pada 5 (lima) tahun mendatang yang menjadi kewenangan dari Dinas Koperasi dan UKM. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, perlu adanya sebuah langkah konkrit dan terukur untuk menjadi landasan dari usaha mencapai tujuan yang disebut dengan sasaran. Adapun sasaran Dinas Koperasi dan UKM sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Indikator Tujuan dan Sasaran

Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Rasio Kewirausahaan Daerah	Kewirausahaan adalah kemampuan individu berinovasi dalam kegiatan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja	Jumlah pelaku usaha dibantu buruh tetap, dibagi total angkatan kerja x 100%	%	4,74	4,89	5,02	5,14	5,24	5,34	Satu Data UMKM dan BPS
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Volume usaha koperasi adalah total nilai pendapatan dari barang dan jasa usaha koperasi dalam 1 tahun	Volume usaha koperasi (semua yang domisili di Sleman) dibagi PDRB ADHB, dikali 100%	%	2,38 - 2,51	2,39 - 2,55	2,4 - 2,58	2,41 - 2,61	2,42 - 2,64	2,43 - 2,66	ODS Koperasi dan BPS
Rasio pelaku usaha mikro	Pelaku usaha mikro adalah Individu yang memiliki usaha dengan kategori mikro	Jumlah pelaku usaha mikro dibagi jumlah penduduk usia produktif dikalikan 100	%	14.1	14.3	14.4	14.6	14.8	15	Satu Data UMKM dan BPS

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Berkembangnya usaha koperasi	Rasio keanggotaan koperasi	Jumlah Individu yang menjadi anggota dan tergabung dalam koperasi dibuktikan dengan tercatat dalam anggaran dasar koperasi	%	22.5	22.5	22.6	22.6	22.6	22.6	ODS Koperasi dan BPS
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Survei Kepuasan Masyarakat adalah angka yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan	Angka hasil survey IKM yang dilakukan Perangkat Daerah	Indeks	86.00	86.01	86.03	86.05	86.07	86.10	Survei

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Tahun						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Predikat AKIP	Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian PAN RB atas Laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran	Penilaian AKIP oleh Inpektorat Daerah		A	A	A	A	A	A	Menpan RB

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

[illegible]

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Tabel 4.2 Uraian Bidang Urusan, Program, Outcome, Kegiatan, SubKegiatan, Output, beserta dengan Target dan Pagu Indikatif

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				Rp 10.33 8.485. 645		Rp 14.62 3.862. 907		Rp 13.82 8.489. 000		Rp 13.8 40.4 67.0 00		Rp 14.0 11.0 40.0 00		Rp 14.745 .554.0 00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 5.441. 663.2 42		Rp 6.782. 797.2 04		Rp 6.625. 580.0 00		Rp 6.62 7.94 8.00 0		Rp 6.66 1.66 5.00 0		Rp 6.806. 852.00 0	
Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran (%)	100	100	Rp 971.7 79.45 0	100	Rp 1.727. 463.7 00	100	Rp 1.586. 870.0 00	100	Rp 1.58 8.98 8.00 0	100	Rp 1.61 9.13 9.00 0	100	Rp 1.748. 976.00 0	
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	0	0		0		0		0		0		0		
2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp 19.15 9.750		Rp 20.19 0.400		Rp 18.54 7.000		Rp 18.5 72.0 00		Rp 18.9 24.0 00		Rp 20.442 .000	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
Meningkatnya layanan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah: 1. Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	Rp 19.15 9.750	100	Rp 20.19 0.400	100	Rp 18.54 7.000	100	Rp 18.5 72.0 00	100	Rp 18.9 24.0 00	100	Rp 20.442 .000	
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		
2.17.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				Rp 19.15 9.750		Rp 20.19 0.400		Rp 18.54 7.000		Rp 18.5 72.0 00		Rp 18.9 24.0 00		Rp 20.442 .000	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	Rp 19.15 9.750	1	Rp 20.19 0.400	1	Rp 18.54 7.000	1	Rp 18.5 72.0 00	1	Rp 18.9 24.0 00	1	Rp 20.442 .000	
2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 213.9 78.50 0		Rp 334.0 98.00 0		Rp 306.9 06.00 0		Rp 307. 317. 000		Rp 313. 147. 000		Rp 338.25 9.000	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah: 1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6. Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 7. Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100	100	Rp 213.9 78.50 0	100	Rp 334.0 98.00 0	100	Rp 306.9 06.00 0	100	Rp 307. 317. 000	100	Rp 313. 147. 000	100	Rp 338.25 9.000	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

[illegible]

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	12		1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		3		3		3		3		3		
2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Rp 6.192.300		Rp 7.875.000		Rp 7.234.000		Rp 7.244.000		Rp 7.381.000		Rp 7.973.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	Rp 6.192.300	2	Rp 7.875.000	2	Rp 7.234.000	2	Rp 7.244.000	2	Rp 7.381.000	2	Rp 7.973.000	
2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Rp 569.400		Rp 42.926.000		Rp 39.432.000		Rp 39.485.000		Rp 40.234.000		Rp 43.461.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	Rp 569.400	1	Rp 42.926.000	1	Rp 39.432.000	1	Rp 39.485.000	1	Rp 40.234.000	1	Rp 43.461.000	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Rp 72.34 6.300		Rp 115.5 71.60 0		Rp 106.1 66.00 0		Rp 106. 307. 000		Rp 108. 324. 000		Rp 117.01 1.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	Rp 72.34 6.300	3	Rp 115.5 71.60 0	3	Rp 106.1 66.00 0	3	Rp 106. 307. 000	3	Rp 108. 324. 000	3	Rp 117.01 1.000	
2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Rp 12.02 2.700		Rp 11.75 4.800		Rp 10.79 8.000		Rp 10.8 13.0 00		Rp 11.0 18.0 00		Rp 11.901 .000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	Rp 12.02 2.700	1	Rp 11.75 4.800	1	Rp 10.79 8.000	1	Rp 10.8 13.0 00	1	Rp 11.0 18.0 00	1	Rp 11.901 .000	
2.17.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				Rp 10.25 7.600		Rp 14.10 0.000		Rp 12.95 2.000		Rp 12.9 70.0 00		Rp 13.2 16.0 00		Rp 14.276 .000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	Rp 10.25 7.600	12	Rp 14.10 0.000	12	Rp 12.95 2.000	12	Rp 12.9 70.0 00	12	Rp 13.2 16.0 00	12	Rp 14.276 .000	
2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Rp 66.90 2.000		Rp 63.43 6.000		Rp 58.27 3.000		Rp 58.3 51.0 00		Rp 59.4 58.0 00		Rp 64.226 .000	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	6	Rp 66.90 2.000	6	Rp 63.43 6.000	6	Rp 58.27 3.000	6	Rp 58.3 51.0 00	6	Rp 59.4 58.0 00	6	Rp 64.226 .000	
2.17.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				Rp 16.94 7.000		Rp 40.27 7.800		Rp 37.00 0.000		Rp 37.0 49.0 00		Rp 37.7 52.0 00		Rp 40.779 .000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	Rp 16.94 7.000	1	Rp 40.27 7.800	1	Rp 37.00 0.000	1	Rp 37.0 49.0 00	1	Rp 37.7 52.0 00	1	Rp 40.779 .000	
2.17.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Rp 28.74 1.200		Rp 38.15 6.800		Rp 35.05 1.000		Rp 35.0 98.0 00		Rp 35.7 64.0 00		Rp 38.632 .000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	1	Rp 28.74 1.200	1	Rp 38.15 6.800	1	Rp 35.05 1.000	1	Rp 35.0 98.0 00	1	Rp 35.7 64.0 00	1	Rp 38.632 .000	
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				Rp 456.2		Rp 1.084.		Rp 995.8		Rp 997.		Rp 1.01 6.07		Rp 1.097.	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	1		6		6		6		6		6		
2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Rp 3.000. 000		Rp 5.000. 000		Rp 4.593. 000		Rp 4.59 9.00 0		Rp 4.68 6.00 0		Rp 5.062. 000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	Rp 3.000. 000	1	Rp 5.000. 000	1	Rp 4.593. 000	1	Rp 4.59 9.00 0	1	Rp 4.68 6.00 0	1	Rp 5.062. 000	
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Rp 92.70 0.000		Rp 234.3 00.00 0		Rp 215.2 31.00 0		Rp 215. 518. 000		Rp 219. 608. 000		Rp 237.21 8.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	Rp 92.70 0.000	12	Rp 234.3 00.00 0	12	Rp 215.2 31.00 0	12	Rp 215. 518. 000	12	Rp 219. 608. 000	12	Rp 237.21 8.000	
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Rp 360.5 01.20 0		Rp 844.7 56.80 0		Rp 776.0 05.00 0		Rp 777. 040. 000		Rp 791. 785. 000		Rp 855.27 6.000	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6	6	Rp 360.5 01.20 0	6	Rp 844.7 56.80 0	6	Rp 776.0 05.00 0	6	Rp 777. 040. 000	6	Rp 791. 785. 000	6	Rp 855.27 6.000	
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 282.4 40.00 0		Rp 289.1 18.50 0		Rp 265.5 88.00 0		Rp 265. 942. 000		Rp 270. 989. 000		Rp 292.71 9.000	
Meningkatnya layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah : 1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2. Jumlah Mebel yang Dipelihara 3. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	Rp 282.4 40.00 0	100	Rp 289.1 18.50 0	100	Rp 265.5 88.00 0	100	Rp 265. 942. 000	100	Rp 270. 989. 000	100	Rp 292.71 9.000	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	20		20		20		20		20		20		
2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Rp 137.4 20.00 0		Rp 137.5 37.50 0		Rp 126.3 44.00 0		Rp 126. 512. 000		Rp 128. 913. 000		Rp 139.25 0.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	9	Rp 137.4 20.00 0	9	Rp 137.5 37.50 0	9	Rp 126.3 44.00 0	9	Rp 126. 512. 000	9	Rp 128. 913. 000	9	Rp 139.25 0.000	
2.17.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				Rp 16.05 0.000		Rp 13.15 5.000		Rp 12.08 4.000		Rp 12.1 00.0 00		Rp 12.3 30.0 00		Rp 13.319 .000	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	20	Rp 16.05 0.000	20	Rp 13.15 5.000	20	Rp 12.08 4.000	20	Rp 12.1 00.0 00	20	Rp 12.3 30.0 00	20	Rp 13.319 .000	
2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan				Rp 39.42 0.000		Rp 48.87 6.000		Rp 44.89 8.000		Rp 44.9		Rp 45.8		Rp 49.485 .000	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
Peralatan dan Mesin Lainnya										58.000		11.000			
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	Rp 39.420.000	10	Rp 48.876.000	10	Rp 44.898.000	10	Rp 44.958.000	10	Rp 45.811.000	10	Rp 49.485.000	
2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Rp 89.550.000		Rp 89.550.000		Rp 82.262.000		Rp 82.372.000		Rp 83.935.000		Rp 90.665.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi (Unit)	2	2	Rp 89.550.000	2	Rp 89.550.000	2	Rp 82.262.000	2	Rp 82.372.000	2	Rp 83.935.000	2	Rp 90.665.000	
Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan (%)	100	100	Rp 4.469.883.792	100	Rp 5.055.333.504	100	Rp 5.038.710.000	100	Rp 5.038.960.000	100	Rp 5.042.526.000	100	Rp 5.057.876.000	
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100		100		
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan				Rp 14.214.750		Rp 14.631.700		Rp 13.441.000		Rp 13.459.000		Rp 13.715.000		Rp 14.813.000	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Meningkatnya layanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah: 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	100	100	Rp 14.21 4.750	100	Rp 14.63 1.700	100	Rp 13.44 1.000	100	Rp 13.4 59.0 00	100	Rp 13.7 15.0 00	100	Rp 14.813 .000	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
	Perangkat Daerah (Dokumen)														
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	10		10		10		10		10		10		
2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Rp 6.470. 250		Rp 7.000. 000		Rp 6.430. 000		Rp 6.43 9.00 0		Rp 6.56 1.00 0		Rp 7.087. 000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	Rp 6.470. 250	5	Rp 7.000. 000	5	Rp 6.430. 000	5	Rp 6.43 9.00 0	5	Rp 6.56 1.00 0	5	Rp 7.087. 000	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
2.17.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				Rp 1.792. 500		Rp 1.680. 000		Rp 1.543. 000		Rp 1.54 5.00 0		Rp 1.57 5.00 0		Rp 1.701. 000	
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	2	2	Rp 1.792. 500	2	Rp 1.680. 000	2	Rp 1.543. 000	2	Rp 1.54 5.00 0	2	Rp 1.57 5.00 0	2	Rp 1.701. 000	
2.17.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				Rp 1.594. 500		Rp 1.594. 500		Rp 1.465. 000		Rp 1.46 7.00 0		Rp 1.49 5.00 0		Rp 1.614. 000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	2	2	Rp 1.594. 500	2	Rp 1.594. 500	2	Rp 1.465. 000	2	Rp 1.46 7.00 0	2	Rp 1.49 5.00 0	2	Rp 1.614. 000	
2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 4.357. 500		Rp 4.357. 200		Rp 4.003. 000		Rp 4.00 8.00 0		Rp 4.08 4.00 0		Rp 4.411. 000	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	10	Rp 4.357. 500	10	Rp 4.357. 200	10	Rp 4.003. 000	10	Rp 4.00 8.00 0	10	Rp 4.08 4.00 0	10	Rp 4.411. 000	
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 4.455. 669.0 42		Rp 5.040. 701.8 04		Rp 5.025. 269.0 00		Rp 5.02 5.50 1.00 0		Rp 5.02 8.81 1.00 0		Rp 5.043. 063.00 0	
Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah: 1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Persentase dokumen laporan keuangan tersedia tepat waktu	100	100	Rp 4.455. 669.0 42	100	Rp 5.040. 701.8 04	100	Rp 5.025. 269.0 00	100	Rp 5.02 5.50 1.00 0	100	Rp 5.02 8.81 1.00 0	100	Rp 5.043. 063.00 0	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

[illegible]

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	37	37		37		37		37		37		37		
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Rp 4.275.784.667		Rp 4.851.073.004		Rp 4.851.073.000		Rp 4.851.073.000		Rp 4.851.073.000		Rp 4.851.073.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	37	37	Rp 4.275.784.667	37	Rp 4.851.073.004	37	Rp 4.851.073.000	37	Rp 4.851.073.000	37	Rp 4.851.073.000	37	Rp 4.851.073.000	
2.17.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Rp 175.352.875		Rp 185.397.600		Rp 170.309.000		Rp 170.536.000		Rp 173.772.000		Rp 187.706.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	12	12	Rp 175.352.875	12	Rp 185.397.600	12	Rp 170.309.000	12	Rp 170.536.000	12	Rp 173.772.000	12	Rp 187.706.000	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
	si Keuangan SKPD (Dokumen)														
2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				Rp 4.531. 500		Rp 4.231. 200		Rp 3.887. 000		Rp 3.89 2.00 0		Rp 3.96 6.00 0		Rp 4.284. 000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	Rp 4.531. 500	2	Rp 4.231. 200	2	Rp 3.887. 000	2	Rp 3.89 2.00 0	2	Rp 3.96 6.00 0	2	Rp 4.284. 000	
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				Rp 87.75 2.200		Rp 87.75 2.200		Rp 80.61 0.000		Rp 80.7 18.0 00		Rp 82.2 50.0 00		Rp 88.845 .000	
Meningkatnya kualitas layanan izin	Persentase KSP/USP koperasi	32,8 6	34,0 1	Rp 87.75 2.200	0		0		0		0		0		

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
usaha simpan pinjam	yang memiliki izin (%)														
	Persentase koperasi simpan pinjam yang berijin (%)	0	0		10,4 4	Rp 87.75 2.200	12,6 1	Rp 80.61 0.000	14,9 6	Rp 80.7 18.0 00	17,4 8	Rp 82.2 50.0 00	20,1 7	Rp 88.845 .000	
2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp 87.75 2.200		Rp 87.75 2.200		Rp 80.61 0.000		Rp 80.7 18.0 00		Rp 82.2 50.0 00		Rp 88.845 .000	
Masyarakat perkoperasian Kabupaten Sleman	Peningkatan jumlah koperasi yang berizin	3,67	4,00	Rp 87.75 2.200	4,50	Rp 87.75 2.200	5,00	Rp 80.61 0.000	5,50	Rp 80.7 18.0 00	6,00	Rp 82.2 50.0 00	6,50	Rp 88.845 .000	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	30	30		35		43		55		69		85		
2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp 87.75 2.200		Rp 87.75 2.200		Rp 80.61 0.000		Rp 80.7 18.0 00		Rp 82.2 50.0 00		Rp 88.845 .000	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	30	30	Rp 87.75 2.200	35	Rp 87.75 2.200	43	Rp 80.61 0.000	55	Rp 80.7 18.0 00	69	Rp 82.2 50.0 00	85	Rp 88.845 .000	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				Rp 28.87 1.250		Rp 78.87 1.200		Rp 72.45 2.000		Rp 72.5 49.0 00		Rp 73.9 25.0 00		Rp 79.853 .000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase koperasi yang aktif (%)	78,1 5	78,4	Rp 28.87 1.250	78,6 5	Rp 78.87 1.200	78,9	Rp 72.45 2.000	79,1 5	Rp 72.5 49.0 00	79,4	Rp 73.9 25.0 00	79,6 5	Rp 79.853 .000	
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah				Rp 28.87 1.250		Rp 78.87 1.200		Rp 72.45 2.000		Rp 72.5 49.0 00		Rp 73.9 25.0 00		Rp 79.853 .000	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota															
Jumlah jaringan pelayanan koperasi yang dilakukan pemantauan	Peningkatan kepatuhan jaringan pelayanan koperasi	78,15	78,40	Rp 28.871.250	78,65	Rp 78.871.200	78,90	Rp 72.452.000	79,15	Rp 72.549.000	79,40	Rp 73.925.000	79,65	Rp 79.853.000	
	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	10	10		15		17		20		23		25		
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				Rp 28.871.250		Rp 78.871.200		Rp 72.452.000		Rp 72.549.000		Rp 73.925.000		Rp 79.853.000	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	10	10	Rp 28.87 1.250	15	Rp 78.87 1.200	17	Rp 72.45 2.000	20	Rp 72.5 49.0 00	23	Rp 73.9 25.0 00	25	Rp 79.853 .000	
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				Rp 114.8 71.25 0		Rp 184.3 64.76 9		Rp 169.3 60.00 0		Rp 169. 586. 000		Rp 172. 804. 000		Rp 186.66 0.000	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase KSP/USP koperasi sehat (%)	0	0	Rp 114.8 71.25 0	0		0		0		0		0		
	Persentase KSP/USP koperasi sehat dan cukup sehat (%)	28,5 7	35,2 2		35,9 7	Rp 184.3 64.76 9	36,9 7	Rp 169.3 60.00 0	38,2 2	Rp 169. 586. 000	39,7 2	Rp 172. 804. 000	41,4 7	Rp 186.66 0.000	
2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu)				Rp 114.8 71.25 0		Rp 184.3 64.76 9		Rp 169.3 60.00 0		Rp 169. 586. 000		Rp 172. 804. 000		Rp 186.66 0.000	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
Daerah Kabupaten/Kota															
KSP/USP Koperasi	Peningkatan KSP/USP Koperasi Sehat	28,5 7	35,2 2	Rp 114.8 71.25 0	35,9 7	Rp 184.3 64.76 9	36,9 7	Rp 169.3 60.00 0	38,2 2	Rp 169. 586. 000	39,7 2	Rp 172. 804. 000	41,4 7	Rp 186.66 0.000	
	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	75	100		100		100		100		100		100		
2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				Rp 114.8 71.25 0		Rp 184.3 64.76 9		Rp 169.3 60.00 0		Rp 169. 586. 000		Rp 172. 804. 000		Rp 186.66 0.000	
Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	75	100	Rp 114.8 71.25 0	100	Rp 184.3 64.76 9	100	Rp 169.3 60.00 0	100	Rp 169. 586. 000	100	Rp 172. 804. 000	100	Rp 186.66 0.000	
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN				Rp 687.9		Rp 1.091.		Rp 1.002.		Rp 1.00		Rp 1.02		Rp 1.104.	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
LATIHAN PERKOPERASIAN				26.85 0		116.8 50		315.0 00		3.65 2.00 0		2.69 6.00 0		703.00 0	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase pengurus/pengaw as dan pengelola koperasi yang sudah memiliki sertifikat uji kompetensi (%)	0	0	Rp 687.9 26.85 0	48,7 3	Rp 1.091. 116.8 50	53,9	Rp 1.002. 315.0 00	58,9 5	Rp 1.00 3.65 2.00 0	63,9 8	Rp 1.02 2.69 6.00 0	68,9 9	Rp 1.104. 703.00 0	
	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat (%)	35,7 7%	37,2 7%		0		0		0		0		0		
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp 687.9 26.85 0		Rp 1.091. 116.8 50		Rp 1.002. 315.0 00		Rp 1.00 3.65 2.00 0		Rp 1.02 2.69 6.00 0		Rp 1.104. 703.00 0	
pengurus, pengawas dan pengelola koperasi	peningkatan pengurus, pengawas, pengelola koperasi yang sudah memiliki sertifikat uji kompetensi	11,8 7	15	Rp 687.9 26.85 0	20	Rp 1.091. 116.8 50	25	Rp 1.002. 315.0 00	30	Rp 1.00 3.65 2.00 0	35	Rp 1.02 2.69 6.00 0	40	Rp 1.104. 703.00 0	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	425	460		728		728		728		728		728		
2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				Rp 687.9 26.85 0		Rp 1.091. 116.8 50		Rp 1.002. 315.0 00		Rp 1.00 3.65 2.00 0		Rp 1.02 2.69 6.00 0		Rp 1.104. 703.00 0	
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	425	460	Rp 687.9 26.85 0	728	Rp 1.091. 116.8 50	728	Rp 1.002. 315.0 00	728	Rp 1.00 3.65 2.00 0	728	Rp 1.02 2.69 6.00 0	728	Rp 1.104. 703.00 0	
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				Rp 199.1 32.87 5		Rp 299.1 32.60 0		Rp 274.7 87.00 0		Rp 275. 154. 000		Rp 280. 374. 000		Rp 302.85 7.000	
Meningkatnya produktivitas koperasi A	Persentase peningkatan volume usaha koperasi (%)	13,5 2	13,7 3	Rp 199.1 32.87 5	9,42	Rp 299.1 32.60 0	12,6 2	Rp 274.7 87.00 0	16,1 7	Rp 275. 154. 000	20,0 8	Rp 280. 374. 000	24,3 4	Rp 302.85 7.000	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp 199.1 32.87 5		Rp 299.1 32.60 0		Rp 274.7 87.00 0		Rp 275. 154. 000		Rp 280. 374. 000		Rp 302.85 7.000	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi di Kabupaten Sleman	4,12	6,58	Rp 199.1 32.87 5	9,42	Rp 299.1 32.60 0	12,6 2	Rp 274.7 87.00 0	16,1 7	Rp 275. 154. 000	20,0 8	Rp 280. 374. 000	24,3 4	Rp 302.85 7.000	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	10	11		12		13		14		15		16		

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				Rp 199.1 32.87 5		Rp 299.1 32.60 0		Rp 274.7 87.00 0		Rp 275. 154. 000		Rp 280. 374. 000		Rp 302.85 7.000	
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	10	11	Rp 199.1 32.87 5	12	Rp 299.1 32.60 0	13	Rp 274.7 87.00 0	14	Rp 275. 154. 000	15	Rp 280. 374. 000	16	Rp 302.85 7.000	
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,				Rp 3.159. 775.9 03		Rp 5.449. 859.6 84		Rp 3.006. 315.0 00		Rp 3.01 2.99		Rp 3.10 8.11		Rp 3.517. 722.00 0	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)										4.00 0		5.00 0			
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Jumlah pelaku usaha mikro baru yang berizin (Pelaku Usaha)	2675	2680	Rp 3.159. 775.9 03	0		0		0		0		0		
	Persentase peningkatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berizin (%)	0	0		0,8	Rp 5.449. 859.6 84	0,81	Rp 3.006. 315.0 00	0,82	Rp 3.01 2.99 4.00 0	0,83	Rp 3.10 8.11 5.00 0	0,84	Rp 3.517. 722.00 0	
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				Rp 3.159. 775.9 03		Rp 5.449. 859.6 84		Rp 3.006. 315.0 00		Rp 3.01 2.99 4.00 0		Rp 3.10 8.11 5.00 0		Rp 3.517. 722.00 0	
Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Baru yang Berizin	7	8	Rp 3.159.	9	Rp 5.449.	10	Rp 3.006.	11	Rp 3.01 2.99	12	Rp 3.10 8.11	13	Rp 3.517.	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
				775.9 03		859.6 84		315.0 00		4.00 0		5.00 0		722.00 0	
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	740	814		895		200		200		200		200		
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	30	137		137		137		137		137		137		
	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	740	740		740		0		0		0		0		
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	0	0		0		695		695		695		695		
	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	0	0		0		5		5		5		5		

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	500	500		545		555		561		567		574		
2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro				Rp 78.14 7.742		Rp 714.8 56.80 0		Rp 656.6 77.00 0		Rp 657. 553. 000		Rp 670. 030. 000		Rp 723.75 8.000	
Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	30	137	Rp 78.14 7.742	137	Rp 714.8 56.80 0	137	Rp 656.6 77.00 0	137	Rp 657. 553. 000	137	Rp 670. 030. 000	137	Rp 723.75 8.000	
2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				Rp 298.1 14.26 7		Rp 244.7 99.26 7		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	
Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	740	740	Rp 298.1 14.26 7	740	Rp 244.7 99.26 7	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				Rp 949.9 46.89 2		Rp 1.723. 140.1 17		Rp 102.7 76.00 0		Rp 105. 188. 000		Rp 139. 536. 000		Rp 287.44 5.000	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	740	814	Rp 949.9 46.89 2	895	Rp 1.723. 140.1 17	200	Rp 102.7 76.00 0	200	Rp 105. 188. 000	200	Rp 139. 536. 000	200	Rp 287.44 5.000	
2.17.07.2.01.0009 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil				Rp -		Rp -		Rp 5.000. 000		Rp 5.00 0.00 0		Rp 5.00 0.00 0		Rp 5.000. 000	
Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)		0	Rp -	0	Rp -	5	Rp 5.000. 000	5	Rp 5.00 0.00 0	5	Rp 5.00 0.00 0	5	Rp 5.000. 000	
2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				Rp 1.833. 567.0 02		Rp 2.767. 063.5 00		Rp 541.8 62.00 0		Rp 545. 253. 000		Rp 593. 549. 000		Rp 801.51 9.000	
Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	500	500	Rp 1.833. 567.0 02	545	Rp 2.767. 063.5 00	555	Rp 541.8 62.00 0	561	Rp 545. 253. 000	567	Rp 593. 549. 000	574	Rp 801.51 9.000	
2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan				Rp -		Rp -		Rp 1.700. 000.0 00		Rp 1.70 0.00 0.00 0		Rp 1.70 0.00 0.00 0		Rp 1.700. 000.00 0	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan															
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	0	0	Rp -	0	Rp -	695	Rp 1.700. 000.0 00	695	Rp 1.70 0.00 0.00 0	695	Rp 1.70 0.00 0.00 0	695	Rp 1.700. 000.00 0	
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Rp 618.4 92.07 5		Rp 649.9 68.40 0		Rp 2.597. 070.0 00		Rp 2.59 7.86 6.00 0		Rp 2.60 9.21 1.00 0		Rp 2.658. 062.00 0	
Meningkatnya daya saing UMKM	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha (UMKM)	20	25	Rp 618.4 92.07 5	0		0		0		0		0		
	Persentase peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi	4,0	5,0		5,5	Rp 649.9 68.40 0	6	Rp 2.597. 070.0 00	6,5	Rp 2.59 7.86 6.00 0	7	Rp 2.60 9.21 1.00 0	7,5	Rp 2.658. 062.00 0	

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
	wirausaha mapan (%)														
2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				Rp 618.4 92.07 5		Rp 649.9 68.40 0		Rp 2.597. 070.0 00		Rp 2.59 7.86 6.00 0		Rp 2.60 9.21 1.00 0		Rp 2.658. 062.00 0	
produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha Mapan	4,60	5,00	Rp 618.4 92.07 5	5,50	Rp 649.9 68.40 0	6,00	Rp 2.597. 070.0 00	6,50	Rp 2.59 7.86 6.00 0	7,00	Rp 2.60 9.21 1.00 0	7,50	Rp 2.658. 062.00 0	
	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	250	250		150		150		150		150		150		

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Output/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Ouput	Base line 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	Targe t	Pagu	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	0	0				5		5		5		5		
2.17.08.2.01.0005 - Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro				Rp -		Rp -		Rp 2.000.000.000		Rp 2.000.000.000		Rp 2.000.000.000		Rp 2.000.000.000	
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	0	0	Rp -		Rp -	5	Rp 2.000.000.000	5	Rp 2.000.000.000	5	Rp 2.000.000.000	5	Rp 2.000.000.000	
2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				Rp 618.492.075		Rp 649.968.400		Rp 597.070.000		Rp 597.866.000		Rp 609.211.000		Rp 658.062.000	
Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan	250	250	Rp 618.492.075	150	Rp 649.968.400	150	Rp 597.070.000	150	Rp 597.866.000	150	Rp 609.211.000	150	Rp 658.062.000	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	INDIKATOR	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Baseline	TARGET TAHUN						Sumber Data	Alasan Pemilihan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Survei Kepuasan Masyarakat adalah angka yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggara pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan	Angka hasil survey IKM yang dilakukan Perangkat Daerah	Indeks	86.00	86.00	86.01	86.03	86.05	86.07	86.10	Survei	Survey Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan perangkat daerah dan evaluasi untuk memperbaiki kinerja

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

NO	INDIKATOR	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Baseline	TARGET TAHUN						Sumber Data	Alasan Pemilihan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-
													pelayanan
2	Predikat AKIP	Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian PAN RB atas Laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta	Penilaian AKIP oleh Inpektorat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	A	Penilaian Menpan RB	Nilai AKIP digunakan untuk mengukur akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah sebagai pertanggungjawaban atas ketercapaian keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam pelaksana

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

NO	INDIKATOR	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Baseline	TARGET TAHUN						Sumber Data	Alasan Pemilihan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-
		pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Predikat AKIP terdiri dari: 1. predikat AA nilai absolute= >85-100 interpretasi= memuaskan 2. predikat A nilai absolute= >75-85 interpretasi= sangat baik 3. predikat B nilai absolute= >65-75 interpretasi= baik 4. predikat CC nilai absolute= >50-65											naan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran, sistem manajemen kinerja serta komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

NO	INDIKATOR	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Baseline	TARGET TAHUN						Sumber Data	Alasan Pemilihan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-
		interpretasi= cukup baik 5. predikat D nilai absolute= 0-30 interpretasi= kurang											yang baik
3	Rasio kewirausahaan Daerah	Kewirausahaan adalah kemampuan individu berinovasi dalam kegiatan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja	Jumlah pelaku usaha dibantu buruh tetap, dibagi total angkatan kerja x 100%	%	4,56	4,74	4,89	5,02	5,14	5,24	5,34	Satuda dan BPS	Indikator ini digunakan untuk melihat pelaku UMKM yang berkembang
4	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Volume usaha koperasi adalah total nilai pendapatan dari barang dan jasa usaha koperasi dalam 1 tahun	Volume usaha koperasi (semua yang domisili di Sleman) dibagi PDRB ADHB, dikali 100%	%	2,38 - 2,51	2,39 - 2,55	2,4 - 2,58	2,41 - 2,61	2,42 - 2,64	2,43 - 2,66		ODS dan BPS	Indikator ini untuk melihat kinerja dan produktivitas koperasi
5	Rasio pelaku usaha mikro	Pelaku usaha mikro adalah Individu yang memiliki usaha	Jumlah pelaku usaha mikro dibagi jumlah	%	13.99	14.11	14.27	14.41	14.59	14.79	15	Satuda dan BPS	Indikator ini digunakan untuk

Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

NO	INDIKATOR	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Baseline	TARGET TAHUN						Sumber Data	Alasan Pemilihan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-
		dengan kategori mikro	penduduk usia produktif dikalikan 100										melihat minat masyarakat di usia produktif dalam berwirausaha
6	Rasio keanggotaan koperasi	Rasio keanggotaan koperasi	Jumlah Individu yang menjadi anggota dan tergabung dalam koperasi dibuktikan dengan tercatat dalam anggaran dasar koperasi	%	21,26	22.53	22.54	22.55	22.56	22.57	22.58	ODS dan BPS	Indikator ini digunakan untuk melihat minat masyarakat menjadi anggota koperasi

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Rasio Pelaku Usaha Mikro	%	13.99	14.11	14.27	14.41	14.59	14.79	15	
2	Rasio Keanggotaan Koperasi	%	21,26	22.53	22.54	22.55	22.56	22.57	22.58	
3	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	4,68	5	5,5	6	6,5	7	7,5	

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Sektor Usaha Koperasi Tahun 2021-2024

No	Uraian Data	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Koperasi Unit Desa (KUD)	17	17	16	17	17
2	Koperasi Pondok Pesantren	4	4	4	3	3
3	Koperasi Kerajinan/Industri	1	1	1	1	1
4	Koperasi Pegawai Negeri RI	69	70	68	67	65
5	Koperasi Karyawan	28	25	25	24	22
6	Koperasi Angkatan Darat	7	5	6	6	6
7	Koperasi Angkatan Udara	4	4	3	2	2
8	Koperasi Kepolisian	2	2	2	2	2
9	Koperasi Serba Usaha	90	87	81	80	79
10	BMT/KJKS	36	0	0	0	0
11	Koperasi Pasar	4	4	3	3	3
12	Koperasi Simpan Pinjam	67	66	67	66	65
13	Koperasi Angkutan Darat	2	4	3	3	3
14	Koperasi Angkutan Udara			1	1	1
15	Koperasi Wisata	1	1	1	1	1
16	Koperasi Wanita	9	10	10	10	10
17	Koperasi Veteran	1	1	1	1	1
18	Koperasi Wredatama	5	5	5	5	5
19	Koperasi Pepabri	12	13	13	13	13
20	Koperasi Mahasiswa	8	8	6	5	5
21	Koperasi Pedagang Kaki Lima	0	0	0	0	0
22	Koperasi Pertanian	13	13	15	15	16
23	Koperasi Perikanan	0	1	0	0	0
24	Koperasi Peternakan	4	4	4	3	3
25	Koperasi Pusat/Sekunder	2	0	2	2	2
26	Kopti	1	1	1	1	1
27	Koperasi Jasa	20	0	0	0	
Jumlah Koperasi		407	346	338	331	326

Rancangan
Awal

RENCANA KERJA



2025

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. SLEMAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						7.240.157.270,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.240.157.270,00							0,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						7.240.157.270,00							0,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.441.664.042,00						-	0,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	14.214.750,00			-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak Memperkua t Ketahanan Ekonomi	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	6.470.250,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak Memperkua t Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	1.792.500,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak Memperkua t Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	1.594.500,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak Memperkua t Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	4.357.500,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.455.669.042,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	4.275.784.667,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	175.352.875,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4.531.500,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	19.159.750,00			-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak Memperkua t Ketahanan Ekonomi	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	19.159.750,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak Memperkua t Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	213.978.500,00			-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak Memperkua t Ketahanan Ekonomi	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	6.192.300,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak Memperkua t Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	569.400,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak Memperkua t Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	72.346.300,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	12.022.700,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				0 Laporan	10.257.600,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				0 Laporan	66.902.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				0 Dokumen	16.947.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	28.741.200,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	456.201.200,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	92.700.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	360.501.200,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	282.440.800,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	137.420.800,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak Memperkua t Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				25 Unit	16.050.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak Memperkua t Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	39.420.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak Memperkua t Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	89.550.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak Memperkua t Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	-			-	30.094.875,00						-	0,00	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	30.094.875,00			-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak Memperkua t Ketahanan Ekonomi	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				30 Unit Usaha	30.094.875,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-			-	3.235.000,00						-	0,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	3.235.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				5 Unit Usaha	3.235.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-			-	55.040.450,00						-	0,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	55.040.450,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				50 Unit Usaha	55.040.450,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-			-	179.613.250,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	179.613.250,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				170 Orang	179.613.250,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-			-	147.815.925,00						-	0,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	147.815.925,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				30 Unit Usaha	147.815.925,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-			-	764.201.653,00						-	0,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	764.201.653,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>				10 Unit Usaha	78.147.742,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak Memperkua t Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan</i>				25 Unit Usaha	88.114.267,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak Memperkua t Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>				20 Unit Usaha	274.946.892,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak Memperkua t Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			<i>Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata</i>				1 Unit Usaha	322.992.752,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak Memperkua t Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
8.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-			-	618.492.075,00						-	0,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-			-	618.492.075,00			-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak Memperkua t Ketahanan Ekonomi	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				20 Unit Usaha	618.492.075,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Memperkuat Ketahanan Ekonomi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	J U M L A H							7.240.157.270,00							0,00		



PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN 2025



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SLEMAN**



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 356 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, disebutkan bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi dasar penetapan dalam perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perubahan perencanaan tahunan Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.
4. Bupati adalah Bupati Sleman.
5. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan, dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

- a. BAB IPENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
- d. BAB IV PENUTUP

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

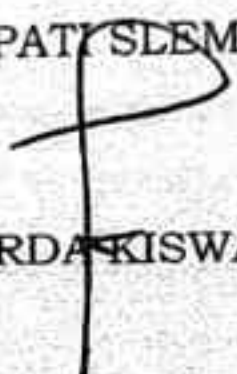
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI SLEMAN,


HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 25 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,


SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 20

						Persentase peningkatan asset koperasi	0.5%	0.5%
		Rasio pelaku usaha mikro	11 %	15 %	Meningkatnya kualitas dan kuantitas UMKM	Persentase peningkatan jumlah usaha mikro	5%	5%
						Peningkatan omset pelaku usaha mikro	0.05%	0.05%

Tabel 3.2 Perubahan Target Indikator Program
pada
Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025

No	Program	Indikator Program	Target Semula 2025	Perbaikan Target Tahun 2025
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100,00%	100,00%
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	100,00%	100,00%
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase KSP/USP koperasi yang memiliki izin	34,01 %	34,01 %
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang aktif	79,14%	79,14%
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP koperasi yang sehat	28,10%	35,22%
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat	37,27%	37,27%

6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	13,73%	13,73%
7	Program Pembedayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro baru berizin	740	2.680
8	Program Pengembangan UMKM	Jumlah Usaha mikro	15	25

Dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja ini sudah mendukung program prioritas nasional (astacita) antara lain:

1. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur,
2. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dan
3. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Selain itu di dalam dokumen ini sudah memasukkan program yang sudah mendukung program prioritas Bupati, antara lain:

1. Pengentasan kemiskinan,
2. Peningkatan akses dan kapasitas UMKM, dan penciptaan wirausaha muda, dan
3. Mewujudkan ekosistem pariwisata, kebudayaan, keolahragaan, dan ekonomi kreatif.

Rencana perubahan sub kegiatan dituangkan dalam matrik sebagaimana berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. SLEMAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								15.121.853.145,00	14.540.435.820,00	16.030.691.920,00	908.838.775,00						0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.121.853.145,00	14.540.435.820,00	16.030.691.920,00	908.838.775,00							0,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							15.121.853.145,00	14.540.435.820,00	16.030.691.920,00	908.838.775,00							0,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 %	100 %	5.956.632.917,00	6.493.289.417,00	6.747.238.517,00	-5.956.632.917,00							0,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu				100 %	100 %	129.214.750,00	31.332.850,00	14.305.850,00	-114.908.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi	BKAD, Bappeda, Inspektorat, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	121.470.250,00	23.588.350,00	6.561.350,00	-114.908.900,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.792.500,00	1.792.500,00	1.792.500,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.594.500,00	1.594.500,00	1.594.500,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	14 Laporan	4.357.500,00	4.357.500,00	4.357.500,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu				100 %	100 %	4.455.669.042,00	4.911.517.442,00	4.911.517.442,00	455.848.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi	BKAD, Bappeda, Inspektorat, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	4.275.784.667,00	4.731.633.067,00	4.731.633.067,00	455.848.400,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	175.352.875,00	175.352.875,00	175.352.875,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.531.500,00	4.531.500,00	4.531.500,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</i>				100 %	100 %	19.159.750,00	19.159.750,00	19.159.750,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	19.159.750,00	19.159.750,00	19.159.750,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum</i>				100 %	100 %	248.775.900,00	348.775.900,00	555.134.000,00	306.358.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	6.192.300,00	6.192.300,00	6.192.300,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	15.709.000,00	15.709.000,00	15.709.000,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	93.951.700,00	93.951.700,00	93.951.700,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	12.022.700,00	12.022.700,00	12.022.700,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				0 Laporan	12 Laporan	8.310.000,00	8.310.000,00	8.310.000,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				0 Laporan	1 Laporan	66.902.000,00	66.902.000,00	56.902.000,00	-10.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				0 Dokumen	1 Dokumen	16.947.000,00	16.947.000,00	25.126.050,00	8.179.050,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	28.741.200,00	128.741.200,00	336.920.250,00	308.179.050,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah</i>				100 %	100 %	821.372.675,00	900.062.675,00	964.680.675,00	143.308.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.221.975,00	4.221.975,00	4.221.975,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	155.494.900,00	155.494.900,00	155.494.900,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	661.655.800,00	740.345.800,00	804.963.800,00	143.308.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)				100 %	100 %	282.440.800,00	282.440.800,00	282.440.800,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	137.420.800,00	137.420.800,00	137.420.800,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	16.050.000,00	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	39.420.000,00	39.420.000,00	39.420.000,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	89.550.000,00	89.550.000,00	89.550.000,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase KSP/USP Koperasi yang memiliki izin				34.01 %	34.01 %	30.095.000,00	87.752.200,00	412.722.200,00	-30.095.000,00							0,00	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP Koperasi yang memiliki izin				34.01 %	34.01 %	30.095.000,00	87.752.200,00	412.722.200,00	382.627.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi	Koperasi di Kabupaten Sleman		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				30 Unit Usaha	91 Unit Usaha	30.095.000,00	87.752.200,00	412.722.200,00	382.627.200,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang aktif				79.14 %	78,4 %	28.871.250,00	28.871.250,00	28.871.250,00	-28.871.250,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang aktif				79.14 %	78.4 %	28.871.250,00	28.871.250,00	28.871.250,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi	Koperasi di Kabupaten Sleman		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	28.871.250,00	28.871.250,00	28.871.250,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
4.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSPI/USP KOPERASI	Persentase KSPI/USP Koperasi Sehat				28.10 %	28.10 %	134.235.000,00	134.235.000,00	118.601.000,00	-134.235.000,00							0,00		
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	KSPI/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya				75 Koperasi	75 Koperasi	134.235.000,00	134.235.000,00	118.601.000,00	-15.634.000,00			-	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi	Koperasi di Kabupaten Sleman		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPI/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				125 Unit Usaha	125 Unit Usaha	134.235.000,00	134.235.000,00	118.601.000,00	-15.634.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
5.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat				37.27 %	37.27 %	701.079.250,00	705.916.850,00	684.138.850,00	-701.079.250,00							0,00		
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat				37.27 %	37.27 %	701.079.250,00	705.916.850,00	684.138.850,00	-16.940.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi	Koperasi di Kabupaten Sleman		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																			
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				460 Orang	460 Orang	701.079.250,00	705.916.850,00	684.138.850,00	-16.940.400,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
6.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan volume usaha koperasi				13.73 %	13.73 %	384.208.875,00	199.132.875,00	199.132.875,00	-384.208.875,00							0,00		
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan volume usaha koperasi				13.73 %	13.73 %	384.208.875,00	199.132.875,00	199.132.875,00	-185.076.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi	Koperasi di Kabupaten Sleman		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																			
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	384.208.875,00	199.132.875,00	199.132.875,00	-185.076.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
7.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah pelaku usaha mikro baru yang berijin				740 pelaku usaha	740 pelaku usaha	3.460.381.903,00	3.721.387.903,00	4.880.775.903,00	-3.460.381.903,00							0,00		
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro baru yang berjin				740 pelaku usaha	740 pelaku usaha	3.460.381.903,00	3.721.387.903,00	4.880.775.903,00	1.420.394.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi	Pelaku UMKM di Kabupaten Sleman		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																			
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	783.147.742,00	633.147.742,00	633.147.742,00	-150.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																			
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	388.114.267,00	298.114.267,00	298.114.267,00	-90.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																			
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				300 Unit Usaha	300 Unit Usaha	1.144.946.892,00	949.946.892,00	949.946.892,00	-195.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																			
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	1.144.173.002,00	1.840.179.002,00	2.999.567.002,00	1.855.394.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
8.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha				15 pelaku usaha	15 pelaku usaha	4.426.348.950,00	3.169.850.325,00	2.959.211.325,00	-4.426.348.950,00							0,00		
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha				15 pelaku usaha	15 pelaku usaha	4.426.348.950,00	3.169.850.325,00	2.959.211.325,00	-1.467.137.625,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi	Pelaku UMKM di Kabupaten Sleman		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																			
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	4.426.348.950,00	3.169.850.325,00	2.959.211.325,00	-1.467.137.625,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan produktivitas ekonomi Meningkatkan produktivitas ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		J U M L A H							15.121.853.145,00	14.540.435.820,00	16.030.691.920,00	908.838.775,00						0,00			

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 Triwulan I, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan dan perubahan target indikator kinerja sub kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut sebagai panduan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan, sehingga dapat berjalan sesuai rencana dan bermanfaat bagi masyarakat.

BUPATI SLEMAN,

HARDA KISWAYA



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 865473, (0274) 868405, Pesawat 7832, Faksimile (0274) 865473
Laman: www.slemankab.go.id, Pos-el: dinkop_ukm@slemankab.go.id

**TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

No	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progress Penyelesaian
1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah agar meningkatkan Target Indikator Kinerja Utama dan target Perjanjian Kinerja yang belum tercapai	1. melakukan perubahan indikator kinerja utama disesuaikan dengan kondisi yang relevan 2. meningkatkan Target Indikator Kinerja Utama 3. melakukan evaluasi berkala dalam pencapaian target IKU	2025 - 2030	2025 - 2030	Sekretariat dan Bidang Perangkat Daerah	1. perubahan indikator kinerja utama beserta peningkatan targetnya dituangkan dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025-2030 2. melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pada minggu pertama setiap bulan

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah
Kabupaten Sleman


Sutiasih, S.P., MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196704051998032007

LAMPIRAN 4
DATA PRESTASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2025

No	Nama Penghargaan / Prestasi	Foto Piagam / Piala	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	Public Services with IMPACT Award 2025 DIY	  		

Sleman, 30 Desember 2025

Kepala Dinas Koperasi,
 Usaha Kecil dan Menengah




Sutiasih, SP., MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196704051998032007

LAMPIRAN 5
TAUTAN FILE PAPARAN SAKIP
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2025

